

**ANALISIS BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
CAR BANK-BANK GO PUBLIC
DI INDONESIA**



TE 80/95

Sar
a

Oleh
S a r t o n o

MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1994**

**ANALISIS BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
CAR BANK-BANK GO PUBLIC
DI INDONESIA**

TESIS

**Telah Disetujui Oleh Panitia Penguji
Pada Tanggal 9 September 1994
Memenuhi Persyaratan Pendidikan Pascasarjana
Program Magister
Program Studi Ilmu Manajemen**

Oleh
Sartono

TF 80/95
Sar
a

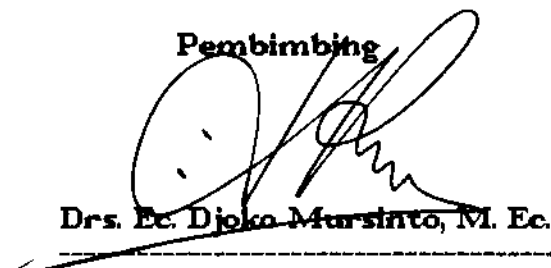
Menyetujui

Pembimbing Ketua


DR. IBM. Santika, SE.

NIP. 130 531 808

Pembimbing


Drs. Ec. Djoko Mursinto, M. Ec.

NIP. 130 935 811

**Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Manajemen**


DR. H. Suroso Imam Zadjuli, SE.

NIP. 130 355 369

**ANALISIS BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
CAR BANK-BANK GO PUBLIC
DI INDONESIA**

TESIS

**Telah Disetujui Oleh Panitia Penguji
Pada Tanggal 9 September 1994
Memenuhi Persyaratan Pendidikan Pascasarjana
Program Magister
Program Studi Ilmu Manajemen**

Oleh

Sartono

Menyetujui

Konsultan



DR. H. Sarmanu, MS.

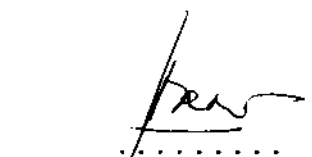
NIP. 130 701 125


TESIS INI TELAH DIUJI/DINILAI


OLEH

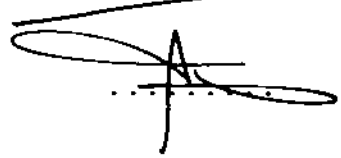
PANITIA PENGUJI TESIS PROGRAM PASCASARJANA UNAIR
PROGRAM STUDI ILMU MANAJEMEN

KETUA : Drs. Ec. Budiman CHR. MA., Ph. D. 

ANGGOTA : 1. Drs. Ec. H. Warsono, ME. 

2. DR. IBM. Santika, SE. 

3. Drs. Ec. Djoko Mursinto, M. Ec. 

4. DR. H. Sarmanu, MS. 

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa akhirnya penelitian dan penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Tesis ini berjudul "Analisis Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi CAR Bank-Bank Go Public Di Indonesia", disusun guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Pascasarjana/ Strata-2 dalam bidang Ilmu Manajemen pada Universitas Airlangga.

Pemilihan judul ini didasari oleh suatu pemikiran bahwa CAR perbankan merupakan salah satu faktor penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian. Di samping itu kegiatan perbankan Indonesia dewasa ini secara bertahap telah mengikuti globalisasi perbankan, sehingga agar dapat berkembang secara sehat dan mampu bersaing dengan perbankan internasional maka permodalan harus mengikuti ukuran yang berlaku secara internasional.

Tesis ini mencoba menguraikan dan menganalisis beberapa faktor penting yang memengaruhi CAR, yang meliputi beberapa variabel yang membentuk modal bank dan yang membentuk Aktiva Tertimbang Menurut Risiko. Dengan mengetahui sejauh mana pengaruh faktor-faktor tersebut, diharapkan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi manajemen dalam usaha pengendalian CAR khususnya serta tingkat kesehatan bank pada umumnya.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis sangat banyak berhutang budi atas jasa yang demikian besar dari Bapak Dr. Ida Bagus Made Santika, SE., selaku Pembimbing Utama, dan Bapak Drs. Ec. Djoko Mursinto, M.Ec., selaku Pembimbing.

Dorongan dan petunjuk petunjuk yang selalu beliau sampaikan secara arif dan bijaksana, telah menimbulkan motivasi yang tinggi bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Untuk itulah dalam kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terima kasih. Rasa terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Ec. Budiman Chr., MA., PhD., selaku mantan Ketua Program Studi Ilmu Manajemen Program Pascasarjana Universitas Airlangga, atas nasihat dan dorongan semangat yang beliau berikan.

Melalui kesempatan ini penulis ingin pula menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Rektor Universitas Airlangga, yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan Program Pascasarjana.
2. Bapak Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga beserta seluruh staf, yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan selama menempuh pendidikan.
3. Bapak Rektor Universitas Diponegoro beserta Bapak Direktur Politeknik dan Bapak Dekan Fakultas Ekonomi, yang telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan.
4. Bapak Dr.H. Suroso Imam Zadjuli, SE., selaku Ketua Program Studi Ilmu Manajemen Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
5. Bapak Dr. H. Sarmanu, MS. selaku konsultan, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan.
6. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Manajemen Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
7. Pimpinan dan staf Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, Bursa Efek Jakarta, dan Bursa Efek Surabaya.

8. Seluruh staf Perpustakaan : Pascasarjana, Fakultas Ekonomi, dan Perpustakaan Pusat Universitas Airlangga.
9. Rekan-rekan mahasiswa/i Program Studi Ilmu Manajemen Program Pascasarjana Universitas Airlangga angkatan 1991/92.

Di samping itu penulis ingin pula menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada, Bapak Drs. Ec. H. Warsono, ME., Bapak Mayor (Pol) dr. Hermawan Ludirja, MS., Bapak Takdir Rahmadi, SH., LLM., Ibu Dra. Tri Ratnawati, MS., Trisno Nugroho, SE., Drs. Didik Siswantoro, Akt., kanda Bambang SS, Hartoyo AR, Heri Ispriyahadi, SE, Sumarno, SE, M. Fauzi, SE., Tony Harsoyo, SE., Agus Priyadi, SE., Cholidin, SE., Ir. Guntur Sutopo MSc., Drs. Gunarto, SH., Akt., Drs. M. Fauroni, Noorca Agus W, SE., H. M. Asrori, SE., Koesdiyanto, SE., beserta keluarga dan semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan selama penulis menempuh pendidikan.

Pada akhirnya kepada Ayahnda (almarhum) dan Ibunda tercinta beserta kakak dan adik-adik tersayang, penulis mengucapkan terima kasih atas pengorbanannya. Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan karunia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan segala kerendahan hati. Kiranya semoga tesis ini dapat bermanfaat dalam memperkaya ilmu pengetahuan.

Surabaya, Agustus 1994

S a r t o n o

INTISARI

ANALISIS BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CAR BANK-BANK GO PUBLIC DI INDONESIA

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh beberapa faktor yang terdiri atas : 1) modal disetor, 2) agio saham, 3) laba ditahan, 4) tagihan/penempatan berisiko pada bank lain, 5) surat berharga berisiko yang dimiliki, 6) kredit berisiko yang diberikan, dan 7) rekening administratif berisiko terhadap CAR bank-bank go public di Indonesia. Di samping itu juga ingin mengetahui mana diantara ke tujuh variabel tersebut di atas yang mempunyai pengaruh dominan terhadap CAR bank-bank go public.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder atas 11 bank yang telah go public dalam periode tahun 1990 - 1993.

Setelah dilakukan pengujian dengan menggunakan Multiple Linear Regression Analysis dengan memanfaatkan penggabungan data antara cross section dengan time series dari 11 bank yang diteliti, hasil yang diperoleh menunjukkan :

1. Beberapa faktor yang terdiri dari modal disetor, agio saham, laba ditahan, tagihan/penempatan berisiko pada bank lain, surat berharga berisiko yang dimiliki, kredit berisiko yang diberikan, serta rekening administratif berisiko, secara serentak menunjukkan pengaruh yang sangat bermakna terhadap CAR bank-bank go public di Indonesia. Dengan demikian hipotesis pertama diterima.
2. Diantara variabel-variabel bebas yang diteliti, modal disetor mempunyai pengaruh yang dominan dan sangat bermakna terhadap CAR bank-bank go public di Indonesia. Dengan demikian hipotesis ke dua ditolak.
3. Dilihat dari pengaruh masing-masing faktor terhadap CAR bank-bank go public maka :
 - a. Modal disetor, agio saham, dan kredit berisiko yang diberikan mempunyai pengaruh yang sangat bermakna terhadap CAR bank-bank go public di Indonesia.
 - b. Laba ditahan dan tagihan/penempatan berisiko pada bank lain mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap CAR bank-bank go public di Indonesia.
 - c. Surat berharga berisiko yang dimiliki dan rekening administratif berisiko tidak mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap CAR bank-bank go public di Indonesia.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	14
1.3. Tujuan Penelitian	15
1.4. Manfaat Penelitian	15
1.5. Sistematika Penulisan	16
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS	18
2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu	18
2.2. Tinjauan Teoritis	20
2.2.1. Pengertian, Fungsi dan Jenis-Jenis Bank	20
2.2.2. Perusahaan dan Bank Go Public	27
2.2.3. Kesehatan Bank	32
2.2.4. Modal Bank	37

2.2.5. Capital Adequacy Ratio (CAR)	42
2.2.6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capital Adequacy Ratio (CAR)	45
2.3. Hipotesis	49
2.4. Model Analisis	49
III. METODOLOGI	53
3.1. Identifikasi Variabel	53
3.2. Definisi Operasional Variabel	54
3.3. Populasi	58
3.4. Jenis dan Sumber Data	60
3.5. Pengumpulan Data	61
3.6. Teknik Analisis Data	62
IV. KEADAAN UMUM PERBANKAN DI INDONESIA	66
4.1. Sejarah Perkembangan Perbankan Di Indonesia ..	66
4.2. Deregulasi Perbankan Indonesia	73
4.2.1. Periode Deregulasi Sebelum Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 (Sebelum Pakto 1988).....	74
4.2.2. Periode Deregulasi Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 (Pakto 1988) Beserta Kebijakan Lanjutannya	76
4.3. Undang-Undang Perbankan 1992	82
4.4. Peranan Bank Sentral Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia	84

V. DESKRIPSI HASIL PENELITIAN	89
5.1. Keadaan Umum Obyek Penelitian	89
5.2. Capital Adequacy Ratio (CAR)	103
5.3. Modal Disetor	106
5.4. Agio Saham	108
5.5. Laba Ditahan	110
5.6. Tagihan/Penempatan Berisiko Pada Bank Lain	113
5.7. Surat Berharga Berisiko Yang Dimiliki	115
5.8. Kredit Berisiko Yang Diberikan	117
5.9. Rekening Administratif Berisiko	119
VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	122
6.1. Pembuktian Hipotesis	122
6.2. Pembahasan Hasil Penelitian	129
6.3. Prospek Bank-Bank Go Public	138
VII. KESIMPULAN DAN SARAN	153
7.1. Kesimpulan	153
7.2. Saran	156
DAFTAR PUSTAKA	160
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman
1.1. Dana Perbankan Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Tahun 1981/82 - 1992/93	4
1.2. Jumlah Bank Dan Kantor Bank Sebelum Dan Sesudah Pakto 1988	7
2.1. Perbandingan Faktor Dan Komponen Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Beserta Bobotnya Antara Ketentuan Paktri 1991 Dan Pakmei 1993	35
2.2. Penggolongan Predikat Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/5/BPPP Tanggal 29 Mei 1993	36
3.1. Jumlah Bank-Bank Go Public Di Indonesia Sampai Akhir Mei 1993	59
5.1. Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank-Bank Go Public Yang Diteliti Per 31 Desember 1990, 1991, 1992, Dan 1993	105
5.2. Jumlah Modal Disetor Bank-Bank Go Public Yang Diteliti Per 31 Desember 1990, 1991, 1992, Dan 1993	107
5.3. Agio Saham Bank-Bank Go Public Yang Diteliti Per 31 Desember 1990, 1991, 1992, Dan 1993	109

5.4. Laba Ditahan Yang Diperhitungkan Dalam Komponen CAR Bank-Bank Go Public Yang Diteliti Per 31 Desember 1990, 1991, 1992, Dan 1993	112
5.5. Tagihan/Penempatan Berisiko Pada Bank Lain Bank-Bank Go Public Yang Diteliti Per 31 Desember 1990, 1991, 1992, Dan 1993	114
5.6. Surat Berharga Berisiko Yang Dimiliki Bank-Bank Go Public Yang Diteliti Per 31 Desember 1990, 1991, 1992, Dan 1993	116
5.7. Kredit Berisiko Yang Diberikan Oleh Bank-Bank Go Public Yang Diteliti Per 31 Desember 1990, 1991, 1992, Dan 1993	118
5.8. Rekening Administratif Berisiko Yang Dimiliki Bank-Bank Go Public Yang Diteliti Per 31 Desember 1990, 1991, 1992, Dan 1993	120
6.1. Rekapitulasi Hasil Regresi Linear Berganda Berdasarkan Data Pooling Antara Cross Section Dan Time Series Atas Variabel-Variabel Penelitian .	124
6.2. Total Pertumbuhan Keuangan Perbankan Di Indonesia 1990 - 1993	140
6.3. Total Pertumbuhan Keuangan Bank-bank Go Public Yang Diteliti 1990 - 1993	149
6.4. Perbandingan Pangsa Kredit Bank Pemerintah Dan Bank Swasta Nasional 1989 - 1993	150

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :	Halaman
1. Jumlah Modal Disetor Bank-Bank Go Public Yang Diteliti Per 31 Desember 1990, 1991, 1992, Dan 1993	164
2. Perhitungan Agio Saham Bank-Bank Go Public Yang Diteliti Per 31 Desember 1990, 1991, 1992, Dan 1993	165
3. Laba Ditahan Yang Diperhitungkan Dalam Komponen CAR Bank-Bank Go Public Yang Diteliti Per 31 Desember 1990, 1991, 1992, Dan 1993	166
4. Perhitungan Tagihan/Penempatan Berisiko Pada Bank Lain, Bank-Bank Go Public Yang Diteliti Per 31 Desember 1990, 1991, 1992, Dan 1993	167
5. Perhitungan Surat Berharga Berisiko Yang Dimiliki Bank-Bank Go Public Yang Diteliti Per 31 Desember 1990, 1991, 1992, Dan 1993	169
6. Perhitungan Kredit Berisiko Yang Diberikan Bank-Bank Go Public Yang Diteliti Per 31 Desember 1990, 1991, 1992, Dan 1993	170
7. Perhitungan Rekening Administratif Berisiko Panin Bank Per 31 Desember 1990, 1991, 1992, Dan 1993	171

8. Perhitungan Rekening Administratif Berisiko Lippo Bank Per 31 Desember 1990, 1991, 1992, Dan 1993	172
9. Perhitungan Rekening Administratif Berisiko Bank Surya Per 31 Desember 1990, 1991, 1992, Dan 1993	173
10. Perhitungan Rekening Administratif Berisiko BII Per 31 Desember 1990, 1991, 1992, Dan 1993	174
11. Perhitungan Rekening Administratif Berisiko Bank Niaga Per 31 Desember 1990, 1991, 1992, Dan 1993	175
12. Perhitungan Rekening Administratif Berisiko Bank Danamon Per 31 Desember 1990, 1991, 1992, Dan 1993	176
13. Perhitungan Rekening Administratif Berisiko Bank Bali Per 31 Desember 1990, 1991, 1992, Dan 1993	177
14. Perhitungan Rekening Administratif Berisiko Tamara Bank Per 31 Desember 1990, 1991, 1992, Dan 1993	178
15. Perhitungan Rekening Administratif Berisiko BDNI Per 31 Desember 1990, 1991, 1992, Dan 1993	179
16. Perhitungan Rekening Administratif Berisiko Bank Duta Per 31 Desember 1990, 1991, 1992, Dan 1993	180

17. Perhitungan Rekening Administratif Berisiko Bank Umum Nasional Per 31 Desember 1990, 1991, 1992, Dan 1993	181
18. Contoh Formulir Perhitungan CAR Bagi Bank Umum	182
19. Perhitungan CAR Panin Bank Per 31 Desember 1990, 1991, 1992, Dan 1993	185
20. Perhitungan CAR Lippo Bank Per 31 Desember 1990, 1991, 1992, Dan 1993	186
21. Perhitungan CAR Bank Surya Per 31 Desember 1990, 1991, 1992, Dan 1993	187
22. Perhitungan CAR BII Per 31 Desember 1990, 1991, 1992, Dan 1993	188
23. Perhitungan CAR Bank Niaga Per 31 Desember 1990, 1991, 1992, Dan 1993	189
24. Perhitungan CAR Bank Danamon Per 31 Desember 1990, 1991, 1992, Dan 1993	190
25. Perhitungan CAR Bank Bali Per 31 Desember 1990, 1991, 1992, Dan 1993	191
26. Perhitungan CAR Tamara Bank Per 31 Desember 1990, 1991, 1992, Dan 1993	192
27. Perhitungan CAR BDNI Per 31 Desember 1990, 1991, 1992, Dan 1993	193
28. Perhitungan CAR Bank Duta Per 31 Desember 1990, 1991, 1992, Dan 1993	194
29. Perhitungan CAR Bank Umum Nasional Per 31 Desember 1990, 1991, 1992, Dan 1993	195

30. List Data Variabel-Variabel Penelitian	196
31. Hasil Analisis Regresi	198
32. Correlation Matrix	200
33. List Data Residual Dan Variabel-Variable Bebas	201
34. List Data Rank Variables	203
35. Hasil Rank Korelasi Spearman	205
36. Tabel Uji Statistik Durbin Waston	209
37. Rasio Antara Jumlah Saham Yang Diemisikan Dengan Jumlah Saham Yang Ditempatkan Dan Disetor Penuh Periode 1990 - 1994	210

BAB I

PENDAHULUAN

M I L I K
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
S U R A B A Y A

1.1. Latar Belakang Masalah

Perbankan di Indonesia yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Berkaitan dengan hal tersebut pelayanan jasa perbankan merupakan salah satu sarana yang diharapkan dapat memenuhi peranan strategis yang dimaksud. Dalam rangka peningkatan pelayanan jasa perbankan, maka pemerintah perlu memberikan kesempatan yang lebih luas kepada dunia perbankan nasional untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian sehingga perbankan dapat selalu mengikuti perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat dan disertai dengan tantangan-tantangan yang semakin luas.

Pemberian kesempatan terhadap perbankan tersebut dapat diwujudkan dengan tindakan pemerintah untuk menghilangkan atau mengurangi ketentuan-ketentuan yang membuat suatu bank

tidak bisa melakukan inovasi-inovasi. Menurut Trenggono Purwosuprodjo (1992 : 11) tindakan semacam ini disebut dengan istilah deregulasi. Deregulasi dimaksudkan untuk mengurangi kekakuan yang timbul akibat regulasi, artinya jika dalam perkembangannya suatu regulasi dirasa menghambat maka ketentuan-ketentuan yang mengikat perlu dikendorkan kembali.

Dengan tindakan deregulasi diharapkan dapat berperan untuk menghilangkan distorsi-distorsi dalam perekonomian nasional. Distorsi dalam perekonomian adalah setiap langkah tindakan (umumnya dari pemerintah) yang berakibat pada tidak berlangsungnya kegiatan ekonomi menurut hukum-hukum ekonomi yang wajar. Demikian pula dengan dilakukannya deregulasi perbankan maka akan menghapuskan distorsi di dalam sektor perbankan, serta mampu membuat fungsi perantara dari bank menjadi lebih wajar dan lebih mencerminkan sulitnya menghimpun dan menyalurkan dana-dana (Sjahrir : 1986 : 4-5).

Beberapa kejadian penting yang berkaitan dengan deregulasi perbankan di Indonesia dimulai dari dikeluarkannya deregulasi perbankan 1 Juni 1983 (Pakjun 1983) yang menghapuskan distorsi di dalam sektor perbankan yang di masa sebelumnya dianggap diperlukan karena kebutuhan pembangunan saat itu. Kemudian menyusul era deregulasi perbankan yang ke dua ditandai dengan keluarnya Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 (Pakto 1988) beserta kebijakan lanjutannya antara lain Pakdes 1988, Pakmar 1989, Pakjan 1990, Paktri 1991, dan Paket Kebijakan 29 Mei 1993.

Dikeluarkannya deregulasi perbankan 1 Juni 1983 atau yang lebih sering dikenal dengan Pakjun 1983 dimaksudkan untuk melepaskan ketergantungan pendanaan bank-bank kepada Bank Indonesia dengan cara mengurangi kredit likuiditas. Di samping itu juga memberikan kebebasan bagi bank-bank untuk menetapkan sendiri kebijaksanaan perkreditannya termasuk penetapan suku bunga deposito maupun kredit, kecuali kredit kepada sektor-sektor yang berprioritas tinggi. Pemberian kebebasan ini pada prinsipnya untuk mendorong bank-bank meningkatkan penghimpunan dana masyarakat dalam rangka efisiensi penggunaan dana dalam perekonomian.

Dampak positif langsung dari sejak dikeluarkannya deregulasi perbankan Juni 1983 ini terlihat pada peningkatan yang amat pesat jumlah dana masyarakat yang dihimpun melalui perbankan sebagaimana tampak pada Tabel 1.1. Dari Tabel 1.1. terlihat bahwa sejak deregulasi perbankan 1983 peningkatan dana masyarakat yang dihimpun melalui perbankan jauh lebih pesat dibandingkan dengan sebelum deregulasi. Di samping itu juga tampak bahwa peningkatan dana yang berasal dari deposito jauh lebih pesat dibandingkan dengan dana yang berbentuk giro dan tabungan.

Keberhasilan perbankan dalam pengumpulan dana yang berasal dari masyarakat tersebut baru merupakan salah satu tahap untuk dapat digunakan secara produktif bagi perekonomian. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kegiatan usaha perbankan dan untuk membantu perbankan memanfaatkan

TABEL 1.1.

**DANA PERBANKAN DALAM RUPIAH & VALUTA ASING
TAHUN 1981/82 - 1992/93
(DALAM MILYAR RUPIAH)**

NO.	AKHIR PERIODE	GIRO	DEPOSITO	TABUNGAN	JUMLAH
1.	1981/82	5.398,0	2.982,0	490,0	8.868,0
2.	1982/83	6.031,0	5.782,0	584,0	12.397,0
3.	1983/84	6.965,0	7.779,0	754,0	15.493,0
4.	1984/85	7.187,7	8.726,0	774,1	16.687,8
5.	1985/86	7.040,7	12.590,4	1.211,8	20.842,9
6.	1986/87	7.561,8	14.911,8	1.586,4	24.060,0
7.	1987/88	8.480,6	20.654,3	1.835,0	30.969,9
8.	1988/89	10.543,1	26.474,4	2.485,3	39.502,8
9.	1989/90	15.978,1	36.350,4	6.863,6	59.192,1
10.	1990/91	17.949,0	49.839,6	9.722,2	77.510,8
11.	1991/92	21.428,1	56.812,3	17.471,0	95.711,4
12.	1992/93*)	23.899,5	65.623,3	23.245,0	112.767,8
	1992/93 (Proyeksi)	-	-	-	117.026,0
	1993/94 (Proyeksi)	-	-	-	136.927,0

Sumber : Laporan Tahunan Bank Indonesia 1992/93,
Nota Keuangan & RAPBN 1993/94.

Keterangan : *) Posisi sampai dengan akhir Maret 1993.

dana yang belum sempat disalurkan secara produktif, maka sebagai pelengkap dari deregulasi tersebut, pada bulan Februari 1984 telah dikeluarkan pula instrumen berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan fasilitas diskonto. Pengeluaran SBI ini di samping dimaksudkan untuk dapat digunakan oleh perbankan sebagai suatu cara penanaman jangka pendek yang menarik bagi dana yang belum sempat disalurkan, juga dimaksudkan sebagai instrumen kebijakan moneter dalam

pelaksanaan operasi pasar terbuka. Kemudian pada bulan Pebruari 1985 diperkenalkan pula instrumen lain berupa Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Instrumen ini dikeluarkan dalam rangka pengembangan alat kebijakan moneter yang dapat meningkatkan pengaturan likuiditas perekonomian melalui pasar terbuka. SBI bersama SBPU juga dimaksudkan untuk menggalakkan kegiatan pasar uang.

Babak ke dua era deregulasi perbankan Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 atau yang lebih dikenal dengan istilah Pakto 1988, kemudian diikuti dengan serangkaian kebijaksanaan keuangan dan perbankan lainnya seperti Pakdes 1988, Pakmar 1989, dan Pakjan 1990. Tujuan dari kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut adalah untuk lebih mendorong mobilisasi dana masyarakat, meningkatkan ekspor non migas, mengefisiensikan perbankan, mengembangkan pasar modal, serta meningkatkan kemampuan pengendalian kebijaksanaan moneter.

Kesempatan-kesempatan yang dapat diperoleh akibat dikeluarkannya Pakto 1988 serta kebijaksanaan lanjutannya yang berkaitan dengan perbankan di Indonesia antara lain terbukanya peluang untuk :

1. Meningkatkan pengerahan dana masyarakat yang dituangkan dalam penyempurnaan dan perluasan sarana, antara lain :
 - a. Kemudahan untuk membuka kantor cabang bank.
 - b. Kemudahan untuk mendirikan bank swasta baru, bank campuran, dan bank perkreditan rakyat.

2. Meningkatkan ekspor non migas dengan memberikan kemudahan bagi bank untuk menjadi bank devisa dan usaha pedagang valuta asing serta pemberian kesempatan pendirian bank campuran dan pembukaan kantor cabang bagi bank asing, termasuk penyempurnaan mekanisme swap.
3. Meningkatkan efisiensi perbankan melalui penciptaan iklim berusaha yang lebih menggairahkan pengerahan dana dan pelayanan kebutuhan masyarakat, yang dilakukan antara lain dengan perlakuan batas maksimum pemberian kredit kepada debitur, debitur grup, pemegang saham, pengurus, dan pegawai lembaga keuangan yang bersangkutan.

Sejak diberlakukannya Pakto 1988, ternyata dunia perbankan dengan cepat memanfaatkan peluang-peluang yang ada, hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah bank beserta kantor cabangnya seperti terlihat pada Tabel 1.2.

Dari Tabel 1.2. terlihat bahwa pada tahun 1988 terdapat 111 buah bank umum. Hanya dalam kurun waktu 2 tahun terjadi terjadi penambahan 71 buah bank umum baru sehingga jumlahnya menjadi 182 buah pada akhir Juni 1991, sedangkan jumlah kantor bank umum meningkat dari 1.728 buah menjadi 4.050 buah kantor bank umum. Demikian pula untuk BPR antara tahun 1988 hingga akhir Juni 1991 terjadi penambahan 403 bank dan kantor bank. Hal tersebut menunjukkan meningkatnya persaingan dunia perbankan di Indonesia, dan persaingan yang ketat pasca deregulasi ini mengakibatkan kondisi-kondisi sebagai berikut (Ratna Dewiyanti : 1992 : 9) :

TABEL 1.2.

**JUMLAH BANK DAN KANTOR BANK
SEBELUM DAN SESUDAH PAKTO 1988**

JENIS BANK	1988		JUNI 1991	
	BANK	KANTOR	BANK	KANTOR
1. Bank-bank Umum				
Bank Umum Pemerintah	5	815	5	962
Bank Umum Swasta Nasional	63	559	116	2.466
Bank Asing/Campuran	11	21	29	49
2. Bank-bank Pembangunan				
Bank Pembangunan Pemerintah	1	22	1	41
Bank Pembangunan Daerah	27	262	27	386
Bank Pembangunan Swasta	1	6	1	19
3. Bank-bank Tabungan				
Bank Tabungan Pemerintah	1	15	1	43
Bank Tabungan Swasta	2	28	2	85
Sub jumlah (1 + 2 + 3)	111	1.728	182	4.050
4. Bank Perkreditan Rakyat				
a. BPR non Badan Kredit Desa				
BPR Baru			403	403
Bank Pasar/Bank Desa	203	203	179	179
BPKD	217	217	217	217
Pegawai	1	1	1	1
b. BPR Badan Kredit Desa				
Bank Desa	3.293	3.293	3.291	3.291
Lumbung Desa	2.056	2.056	2.056	2.056
c. LKDP	1.936	1.936	1.936	1.936
Sub jumlah (a + b + c)	7.706	7.706	8.109	8.109

Sumber : Prospek No. 16 Tahun II, 25 Januari 1992.

1. Persaingan yang ketat dalam merebut dana bank.
2. Munculnya produk-produk baru perbankan.

3. Adanya suku bunga yang kompetitif antar bank.
4. Adanya perubahan orientasi perbankan dari seller's oriented menjadi buyer's oriented.
5. Penggunaan teknologi komputer yang pada mulanya merupakan alat pengolahan data untuk keperluan informasi bagi manajemen telah berkembang menjadi alat untuk meningkatkan pelayanan terhadap nasabah.
6. Masalah efisiensi dan produktivitas menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian manajemen secara lebih seksama.
7. Kesulitan memperoleh staf perbankan yang dapat memenuhi kebutuhan (siap pakai).

Setelah lebih kurang 2 tahun masa Pakto 1988, ternyata belum seluruh bank mampu merubah gaya manajemen, strategi dan pola operasionalnya dalam menghadapi perubahan serta mempersiapkan perbankan Indonesia menghadapi era globalisasi. Tingkat persaingan antar bank yang semakin ketat serta tuntutan pengembangan usaha yang secepat-cepatnya dari pemilik modal seolah-olah menyebabkan adanya penghalalan segala cara yang menjurus kepada dikesampingkannya prinsip kehati-hatian yang seharusnya menjadi dasar operasional manajemen bank, sehingga banyak bank yang mengalami kesulitan. Kasus permainan valas oleh Bank Duta dan Bank Summa yang mengalami musibah karena penyaluran kredit yang menyimpang dari ketentuan "legal lending limit" merupakan contoh dari kondisi ini. Jika kondisi demikian dibiarkan,

selain merugikan bank yang bersangkutan juga merugikan beberapa pihak bahkan akan menurunkan kredibilitas perbankan nasional di mata masyarakat maupun di dunia perbankan luar negeri.

Melihat kenyataan ini maka Bank Indonesia selaku pemegang otoritas moneter berwenang memandang perlu untuk mengatur kembali industri perbankan melalui pola pembinaan dan pengawasan bank. Pengaturan tersebut diwujudkan dengan keluarnya Paket Kebijakan 28 Februari 1991 yang berjudul "Himpunan Ketentuan Lanjutan Pakto 27, 1988 tentang Penyempurnaan Pengawasan dan Pembinaan Bank 28 Februari 1991". Penekanan yang diberikan dalam kebijakan ini adalah agar dalam pengelolaan suatu bank dilakukan atas dasar prinsip kehati-hatian atau prudential regulation dengan memperhatikan tingkat kesehatan yang telah ditetapkan agar bank sebagai lembaga kepercayaan dapat dipertahankan.

Dengan pertimbangan pentingnya penyediaan modal minimum bank atau yang lebih populer diistilahkan dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) dalam kriteria kesehatan bank, maka dalam Paket Kebijakan 28 Februari 1991 dibuat ketentuan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/67/Kep/Dir tanggal 28 Februari 1991 dan telah diedarkan ke semua bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank di seluruh Indonesia melalui Surat Edaran No. 23/11/BPPP tertanggal 28 Februari 1991 perihal kewajiban penyediaan modal minimum bank. Ketentuan ini disempurnakan

melalui Paket Kebijakan 29 Mei 1993 yang berjudul "Himpunan Ketentuan Perbankan Yang Disempurnakan Tanggal 29 Mei 1993". Dalam surat keputusan tersebut dinyatakan bahwa sejalan dengan standar yang ditetapkan oleh Bank for International Settlement (BIS), terhadap seluruh bank di Indonesia diwajibkan untuk menyediakan modal minimum sebesar 8 % (delapan persen) secara bertahap dengan tahap pencapaian 7 % (tujuh persen) pada akhir Maret 1993 dan 8 % (delapan persen) pada akhir Desember 1993.

Pentingnya Capital Adequacy Ratio (CAR) ini juga karena faktor modal bank merupakan faktor yang sangat menentukan bagi bank dalam rangka mengembangkan usaha serta untuk menampung risiko yang mungkin timbul apabila bank mengalami kerugian. Modal bank yang cukup akan membawa bank ke arah pengembangan usaha yang optimal sehingga diharapkan akan memperoleh keuntungan yang optimal pula dan kalau terjadi risiko kerugian maka akan dapat ditutup dengan modal yang ada. Sebaliknya apabila terjadi kekurangan maupun kelebihan modal bagi suatu bank, ke duanya akan sama-sama membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi bank yang bersangkutan.

Kekurangan modal bagi suatu bank berarti bank tidak dapat menjamin risiko terhadap aktiva dalam arti luas, baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin pada kewajiban yang masih bersifat administratif yang disediakan bagi pihak ke tiga. Risiko ini dapat timbul dalam bentuk risiko kredit,

risiko karena fluktuasi harga surat-surat berharga, dan tingkat bunga serta nilai tukar valuta asing. Hal ini selain akan mengurangi tingkat kesehatan bank juga akan mengurangi tingkat kepercayaan pihak luar terutama nasabah terhadap bank. Di lain pihak kelebihan modal bagi suatu bank, meskipun di satu sisi dapat dianggap sebagai peluang namun apabila tidak mampu dimanfaatkan oleh bank yang bersangkutan akan mengakibatkan keuntungan yang diperoleh kurang dapat optimal.

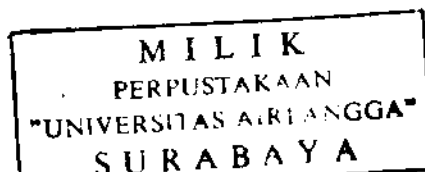
Di samping itu kegiatan perbankan Indonesia dewasa ini secara bertahap telah mengikuti globalisasi perbankan maka agar dapat berkembang secara sehat dan mampu bersaing dengan perbankan internasional, perbankan Indonesia perlu menyesuaikan Capital Adequacy Ratio (CAR) dengan ukuran yang berlaku secara internasional yaitu standar yang telah ditetapkan oleh Bank for International Settlements (BIS) yang berpusat di Basle, Swiss. Perlu diketahui bahwa formula yang ditentukan oleh Bank for International Settlement (BIS) pada tahun 1988 adalah "rasio minimum 8 persen permodalan terhadap aktiva yang mengandung risiko". Latar belakang ketentuan CAR sebesar 8 persen ini adalah akibat adanya ketimpangan struktur dan sistem perbankan pada era tahun 1980-an. Ketimpangan tersebut diamati secara seksama oleh ahli-ahli moneter dan perbankan negara-negara maju termasuk beberapa pakar dari IMF dan World Bank, dan mereka menemukan 3 (tiga) indikasi yang mendukung ketimpangan yaitu sebagai berikut (Muchdarsyah Sinungan : 1993 : 160) :

1. Krisis pinjaman negara-negara Amerika Latin telah mengganggu arus perputaran uang internasional.
2. Persaingan yang tidak fair antara bank-bank Jepang dengan bank-bank Amerika dan Eropa di pasar keuangan internasional, dimana bank-bank Jepang memberikan pinjaman amat lunak karena ketentuan CAR di negara tersebut amat ringan yaitu 2 sampai 3 % saja.
3. Sebagai akibat dari persaingan yang tidak fair tersebut, maka situasi pinjaman internasional menjadi terganggu dan turut pula mempengaruhi situasi perdagangan internasional. Hal yang demikian jika dibiarkan, dapat membahayakan situasi likuiditas internasional.

Ke tiga indikasi moneter inilah yang dijadikan sebagai dasar bagi Bank for International Settlement (BIS) dalam menetapkan ketentuan dan perhitungan CAR yang harus diikuti oleh bank-bank di seluruh dunia, sebagai suatu level permainan kompetisi yang fair dalam pasar keuangan global.

Mengingat pentingnya CAR dalam penentuan kriteria kesehatan bank, dalam rangka pengembangan usaha, untuk menampung risiko yang mungkin timbul, serta dalam rangka mengikuti globalisasi perbankan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini akan berusaha menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi CAR dengan obyek penelitian pada Bank-Bank Go Public di Indonesia.

Ada berbagai faktor yang mempengaruhi besar kecilnya



CAR suatu bank. Beberapa faktor tersebut diantaranya adalah : modal disetor, agio saham, laba ditahan, tagihan/penempatan berisiko pada bank lain, surat berharga berisiko yang dimiliki, kredit berisiko yang diberikan, serta rekening administratif berisiko.

Modal disetor, agio saham, dan laba ditahan merupakan bagian terbesar dari variabel-variabel yang membentuk modal bank. Hal ini berarti fluktuasi dari ke tiga variabel tersebut akan mengakibatkan naik turunnya jumlah modal bank. Sedangkan tagihan/penempatan berisiko pada bank lain, surat berharga berisiko yang dimiliki, kredit berisiko yang diberikan, dan rekening administratif berisiko merupakan kelompok aktiva produktif terbesar yang membentuk Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang dimiliki oleh suatu bank. Hal ini berarti fluktuasi dari ke empat variabel tersebut akan mengakibatkan naik turunnya jumlah ATMR suatu bank.

Oleh karena besarnya CAR ditentukan oleh proporsi antara modal bank dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), maka tampak jelas di sini bahwa : modal disetor, agio saham, laba ditahan, tagihan/penempatan berisiko pada bank lain, surat berharga berisiko yang dimiliki, kredit berisiko yang diberikan, dan rekening administratif berisiko berpengaruh terhadap besar kecilnya CAR suatu bank.

Selanjutnya perlu ditekankan bahwa go public dalam penelitian ini hanya diartikan sebagai suatu cara bank

memperoleh dana dengan menjual saham perseroan kepada masyarakat. Adapun dasar pertimbangan dilakukannya penelitian pada bank-bank go public adalah dengan go public-nya suatu bank diharapkan akan menambah modalnya yang berarti di samping lebih mudah untuk memenuhi ketentuan CAR, juga dapat dijadikan sarana dalam rangka pengembangan usaha yang optimal.

Dengan demikian kiranya layak jika dilakukan penelitian yang berjudul :

"Analisis Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi CAR Bank-Bank Go Public Di Indonesia".

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di dalam latar belakang masalah, yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah variabel-variabel modal disetor, agio saham, laba ditahan, tagihan/penempatan berisiko pada bank lain, surat berharga berisiko yang dimiliki, kredit berisiko yang diberikan, dan rekening administratif berisiko mempunyai pengaruh yang sangat bermakna terhadap CAR Bank-Bank Go Public di Indonesia ?.
2. Dari variabel-variabel tersebut, manakah yang mempunyai pengaruh dominan terhadap CAR Bank-Bank Go Public di Indonesia ?.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa pengaruh dari faktor-faktor modal disetor, agio saham, laba ditahan, tagihan/penempatan berisiko pada bank lain, surat berharga berisiko yang dimiliki, kredit berisiko yang diberikan, dan rekening administratif berisiko terhadap CAR bank-bank go public di Indonesia.
2. Untuk mengetahui faktor mana diantara faktor-faktor modal disetor, agio saham, laba ditahan, tagihan/penempatan berisiko pada bank lain, surat berharga berisiko yang dimiliki, kredit berisiko yang diberikan, dan rekening administratif berisiko yang mempunyai pengaruh dominan terhadap CAR bank-bank go public di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi CAR bank-bank go public di Indonesia serta mengetahui faktor yang dominan diantara faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat bermanfaat untuk dipakai sebagai :

1. Pertimbangan bagi pembuat keputusan dalam rangka mengambil kebijaksanaan dalam usaha pengendalian CAR khususnya dan

tingkat kesehatan bank pada umumnya.

2. Sumbangan penelitian bagi pihak-pihak yang bermaksud meneliti dan mengetahui lebih jauh tentang masalah CAR maupun tingkat kesehatan perbankan baik bank-bank go public maupun perbankan secara keseluruhan.
3. Menambah referensi tentang studi mengenai perbankan di Indonesia dalam rangka meningkatkan pemahaman pengetahuan terhadap bank.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi ke dalam dalam 7 bab. Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab tinjauan pustaka dan hipotesis, yang berisi tentang uraian atas tinjauan penelitian terdahulu; tinjauan teoritis atas pengertian, fungsi, dan jenis-jenis bank; perusahaan dan bank go public; kesehatan bank; modal bank, capital adequacy ratio (CAR), faktor-faktor yang mempengaruhi capital adequacy ratio (CAR), hipotesis penelitian, dan model analisis.

Bab III merupakan bab metodologi, yang menguraikan tentang definisi operasional variabel, identifikasi variabel, populasi, jenis dan sumber data, pengumpulan data, dan teknik

analisis data.

Bab IV merupakan bab gambaran umum perbankan Indonesia, yang berisi uraian mengenai sejarah perbankan di Indonesia, deregulasi perbankan di Indonesia, undang-undang perbankan 1992, dan peranan bank sentral dalam sistem perbankan di Indonesia.

Bab V merupakan bab deskripsi hasil penelitian, yang menguraikan tentang keadaan umum obyek penelitian, capital adequacy ratio (CAR), modal disetor, agio saham, laba ditahan, tagihan berisiko pada bank lain, surat berharga berisiko yang dimiliki, kredit berisiko yang diberikan, dan rekening administratif berisiko.

Bab VI merupakan bab analisis dan pembahasan, yang berisi tentang pembuktian hipotesis, pembahasan hasil penelitian, serta prospek bank-bank go public.

Bab VII merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan atas hasil penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Telah ada beberapa penelitian terdahulu tentang masalah perbankan yang dilaksanakan oleh para ahli yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian tersebut antara lain menyangkut tentang problem bank, struktur modal bank, kesehatan manajemen bank, dan model peramalan pertumbuhan perbankan.

Sinkey (1975 : 33), meneliti tentang beberapa faktor yang memberikan kontribusi pada problem bank dengan menggunakan karakteristik neraca dan rugi laba. Alat analisis penelitian ini menggunakan Multivariate Discriminant Analysis, dan faktor-faktor yang di ukur yang meliputi asset composition, loan characteristic, capital adequacy, sources and uses of revenue, efficiency and profitability. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari faktor-faktor yang di ukur ternyata efficiency merupakan faktor yang paling banyak memberikan kontribusi pada problem bank.

Zainul Arifin (1982 : 11) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal dan pengaruh struktur modal terhadap biaya modal pada Bank Desa di Karesidenan Bojonegoro. Dengan menggunakan model analisis Regresi Linear Berganda, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel-

variabel kredit yang beredar, struktur aktiva, profitabilitas dan tingkat pertumbuhan secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap struktur modal, dan diantara variabel-variabel tersebut kredit yang beredar merupakan variabel yang dominan.

Hartojo Wignjowijoto (1993 : 48), mengadakan observasi tentang kesehatan manajemen bank di Indonesia. Hasil observasi ini menyatakan bahwa indikator tidak sehatnya manajemen perbankan dapat segera terbaca lewat : (1) tingginya overhead, margin, dan nonperforming assets, (2) bergesernya pendapatan dari bunga ke pendapatan fee (padahal fungsi bank adalah perantara antara penabung dan investor), (3) munculnya kejahatan kerah putih mulai dari kalah kliring, pembobolan bank, sinergi antara pemberi kredit dan penerima kredit, dan beragam kejahatan yang tidak dipenalti. Kesimpulan berikutnya menyatakan juga bahwa manajemen perbankan di Indonesia masih mengkhawatirkan. Hal ini tercermin dari besarnya kredit macet yang ditutup-tutupi, serta adanya penyodoran angka yang dikecilkan.

Tri Ratnawati (1993 : 24), meneliti tentang model peramalan pertumbuhan perbankan berdasarkan rasio keuangan pada bank-bank go public di Indonesia. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan "Discriminant Analysis" yang diolah melalui komputer dengan paket program SPSS. Hasil penelitian menyatakan bahwa empat belas rasio keuangan yang terdiri atas interest margin, net margin, asset utilization,

leverage multiplier, liquidity risk, interest rate risk, credit risk, capital risk, cash ratio, return on assets, return on equity, solvability ratio, loan to deposit ratio, serta capital adequacy ratio dapat digunakan dalam model peramalan pertumbuhan perbankan. Diantara ke empat belas rasio, rasio interest margin, assets utilization, interest rate risk, cash ratio, return on asset, return on equity, and solvability lebih banyak memberikan kontribusi pada model peramalan pertumbuhan laba per lembar saham.

Meskipun berkaitan, namun penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah diuraikan di atas, karena yang akan diamati dalam penelitian ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi Capital Adequacy Ratio (CAR) dengan pembatasan ruang lingkup pada bank-bank go public yang ada di Indonesia. Di samping itu spesifikasi dalam penelitian ini adalah bahwa CAR merupakan salah satu variabel yang cukup penting dari kriteria kesehatan perbankan, sehingga dengan penelitian yang ruang lingkungannya lebih menyempit maka pembahasan diharapkan akan lebih detail.

2.2. Tinjauan Teoritis

2.2.1. Pengertian, Fungsi, Dan Jenis-Jenis Bank

a. Pengertian Bank

Banyak pihak yang mendefinisikan tentang bank, dan beberapa diantaranya akan dikemukakan dalam penulisan ini.

OP. Simorangkir (1992 : 33), menyatakan bahwa bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit tersebut dilakukan baik dengan modal sendiri ataupun dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ke tiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.

Definisi lain dikemukakan oleh Jopie Jusuf (1992 : 1), yang menyatakan bahwa bank adalah lembaga perantara antara sektor yang kelebihan dana (surplus) dengan sektor yang kekurangan dana (minus). Dalam pengertian ini bank menerima simpanan dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana (misalnya dalam bentuk tabungan atau deposito) dan menyalurkannya ke pihak-pihak yang memerlukan dana dalam bentuk pinjaman. Atas dana yang ditempatkan di bank, pihak-pihak yang kelebihan dana menerima tingkat pengembalian tertentu dari bank sebagai imbalannya, yang dikenal dengan nama bunga (interest). Pada sisi lain, pihak-pihak yang menggunakan dana dari bank harus membayar bunga kepada bank. Laba bank diperoleh dari selisih bunga yang diterima dari pemberian kredit dengan bunga yang dikeluarkan untuk para penyimpan.

Selanjutnya Ikatan Akuntansi Indonesia (1992 : 1) menyatakan bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus unit) dengan

pihak-pihak yang memerlukan dana (deficit unit), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa "bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Dari berbagai definisi di atas jika diamati secara cermat pada dasarnya secara prinsip tidak berbeda satu sama lain, walaupun ada perbedaan itu hanya nampak pada tugas atau usaha bank.

b. Fungsi Bank

Crosse (1983 : 14-20) menyatakan bahwa fungsi bank (dalam hal ini commercial banks atau bank-bank umum) adalah sebagai berikut : (1) menciptakan uang giral, (2) memberikan pelayanan penyimpanan, (3) memberikan jasa-jasa pembayaran, (4) menghimpun tabungan dan menanamkannya, (5) memberikan jasa-jasa trust, serta (6) memberikan jasa-jasa lainnya.

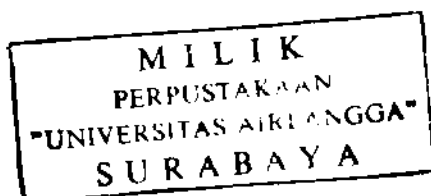
Reed et al. (dalam Thomas Suyatno dkk., 1991 : 2) menyatakan bahwa perbankan khususnya bank-bank komersial (bank umum) mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah pemberian jasa-jasa yang semakin luas meliputi pelayanan

dalam mekanisme pembayaran (transfer of funds), menerima tabungan, memberikan kredit, pelayanan dalam fasilitas pembiayaan perdagangan luar negeri, penyimpanan barang-barang berharga, dan jasa-jasa yang diberikan dalam bentuk pengamanan-pengawasan harta milik/trust service.

Selanjutnya Thomas Suyatno dkk. (1991 : 2) menyatakan ada tiga fungsi bank, yaitu :

1. Bank sebagai penerima kredit, artinya bank bank menerima uang serta dana-dana lainnya dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan biasa, deposito berjangka, serta rekening koran/ giro.
2. Bank sebagai pemberi kredit, artinya bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif tanpa mempermasalahkan apakah kredit itu berasal dari deposito atau tabungan yang diterima atau bersumber pada penciptaan kredit yang dilakukan oleh bank itu sendiri.
3. Bank sebagai pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber yang berasal dari modal sendiri, simpanan/ tabungan masyarakat maupun melalui penciptaan uang bank.

Dari beberapa pandangan tentang fungsi bank di atas ternyata secara prinsip selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang berlaku saat ini yang menyatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.



c. Jenis-Jenis Bank

Menurut Undang-Undang Perbankan tahun 1992, jenis bank di Indonesia terdiri atas :

1. Bank Umum yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank jenis ini dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau dapat memilih jenis usaha yang sesuai dengan keahlian dan bidang usaha yang dapat dikembangkannya. Dengan alternatif ini maka kebutuhan masyarakat terhadap berbagai jenis jasa bank dapat dipenuhi oleh dunia perbankan tanpa mengabaikan prinsip kesehatan dan efisiensi.
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Penyebutan "bentuk lainnya" ini dimaksudkan untuk menampung kemungkinan adanya bentuk penghimpunan dana dari masyarakat oleh BPR yang serupa dengan deposito berjangka dan tabungan tetapi bukan giro atau simpanan lain yang dapat ditarik dengan cek. Kegiatan usaha bank jenis ini terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan.

Pembagian ini mendasarkan pada batas kegiatan yang dapat dilakukan oleh masing-masing jenis bank dan dalam pembagian tersebut Bank Sentral tidak dikategorikan sebagai jenis bank. Hal ini karena fungsi tugas dan peranan Bank

Sentral adalah sebagai otoritas moneter yang bertugas menjaga kestabilan moneter serta melakukan pengawasan dan pembinaan bank, sehingga perlu diatur dengan undang-undang sendiri yang terpisah dengan undang-undang perbankan.

Meskipun di dalam Undang-Undang Perbankan 1992 telah mengelompokkan bank ke dalam dua jenis sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, namun untuk kepentingan tertentu seperti dalam mengemukakan posisi perkembangan kredit perbankan, perkembangan jumlah dan kantor perbankan, serta keperluan lainnya, pihak Bank Indonesia dan beberapa ilmuwan mengelompokkan ke dalam jenis yang lebih rinci. Untuk kepentingan tersebut maka Wijanarto (1993 : 46-48) mengelompokkan bank ke dalam tiga jenis, yaitu :

1. Bank berdasarkan fungsinya.

- a. Bank Sentral, adalah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UU No. 13 tahun 1968.
- b. Bank Umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- c. Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang dapat menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu.
- d. Bank Umum yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Yang dimaksud mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu

adalah antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk pengembangan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas, dan pengembangan pembangunan perumahan. Hal ini dimungkinkan oleh ketentuan pasal 5 ayat 2 UU Perbankan 1992.

2. Bank berdasarkan kepemilikannya.

- a. Bank Umum Milik Negara, yaitu bank yang hanya dapat didirikan berdasarkan undang-undang.
- b. Bank Umum Swasta, yaitu bank yang hanya dapat didirikan dan menjalankan usaha setelah mendapat ijin dari Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan-pertimbangan Bank Indonesia.
- c. Bank Campuran, yaitu bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.
- d. Bank Pembangunan Daerah, yaitu bank milik Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, dalam jangka waktu satu tahun sejak mulai berlakunya UU Perbankan 1992 bentuk bank ini harus disesuaikan menjadi Bank Umum.

3. Jenis bank yang bersifat khusus, yaitu Bank Muamalat

Indonesia (BMI). Bank Muamalat Indonesia merupakan bank yang menerapkan sistem dan operasi perbankan berdasarkan Syariah Islam. Operasi perbankan berdasarkan Syariah Islam adalah dengan mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha yang dituntun serta tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis.

2.2.2. Perusahaan Dan Bank Go Public

Menurut Sjahrizal (1989 : 20), yang dimaksud dengan perusahaan go public adalah semua perusahaan yang menjual satu atau beberapa jenis efek (instrumen) kepada masyarakat, efek tersebut dapat diterbitkan dan diperdagangkan di pasar modal Indonesia. Perusahaan go public itu bertindak sebagai emiten. Tri Ratnawati (1993 : 44-45) mengemukakan bahwa beberapa jenis instrumen atau efek yang dapat diterbitkan dan diperdagangkan di pasar modal Indonesia adalah :

1. Instrumen penyertaan modal (saham).

Saham merupakan bukti kepemilikan dalam suatu perusahaan. Pemegang saham adalah pemilik penuh perusahaan sesuai dengan jumlah proporsi saham yang dimilikinya.

2. Instrumen hutang (obligasi).

Menurut keputusan Menteri Keuangan No. 859/1987, obligasi mewakili perjanjian pengakuan hutang atas pinjaman yang dilakukan emiten (perusahaan yang menerbitkan serta menjual atau melakukan emisi efek) kepada pemodal

(masyarakat yang membeli atau menanamkan dananya dalam bentuk efek) dengan jangka waktu minimal tiga tahun.

3. Jenis instrumen lainnya, yang terdiri atas :

- a. Sekuritas penyertaan dana, yaitu bukti pemilikan sejumlah dana yang disetorkan investor kepada penerbit sekuritas.
- b. Sekuritas kredit, yaitu efek yang berjangka waktu minimal satu tahun dan diterbitkan dalam rangka pengamanan asset tertentu yang biasanya berbentuk piutang.

Sedangkan dalam kaitannya dengan pasar modal sebagai tempat jual beli berbagai jenis instrumen, Ida Bagus Made Santika (1991 : 71) mengemukakan bahwa pasar modal paling tidak harus mengandung lima unsur pokok yaitu :

1. Adanya perusahaan yang menawarkan saham serta obligasinya kepada masyarakat dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
2. Adanya masyarakat investor yang bersedia membeli saham-saham serta obligasi-obligasi perusahaan, lembaga keuangan (asuransi dan dana pensiun), dan lain-lain.
3. Adanya lembaga yang mempertemukan perusahaan sebagai pihak yang menawarkan saham serta obligasi dan investor sebagai pihak yang membeli saham serta obligasi.
4. Adanya pedagang perantara (komisioner dan makelar).
5. Adanya underwriter yang menjamin penjualan dan pembelian

saham serta obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Selanjutnya Scott et al. (dalam Heru Sutojo, 1989 : 45) menyatakan ada beberapa motivasi yang mendorong perusahaan-perusahaan untuk go public, yaitu :

1. Menciptakan kondisi yang baik guna financing di masa yang akan datang.

Suatu perusahaan yang mengadakan emisi saham selain memperoleh dana yang diperlukan juga mendapatkan manfaat lain secara tidak langsung. Bilamana saham yang diemisikan sudah memasyarakat maka emisi yang berikutnya akan lebih mudah diterima oleh pasar. Kreditor memiliki kecenderungan untuk memberi kemudahan pemberian kredit pada perusahaan yang sahamnya sudah mampu diterima dan diakui masyarakat. Bila perusahaan merencanakan untuk merger ataupun aquisition, saham yang telah teruji di pasar modal merupakan instrumen yang sangat berharga di meja perundingan.

2. Alat pemberi motivasi bagi manajer teras.

Penggunaan stock option plan banyak dibahas dalam kepustakaan manajemen keuangan. Program tersebut tidak berarti bilamana pasar bagi saham perusahaan tidak ada. Dalam rencana ini jasa produksi dapat dibayarkan berupa saham. Jadi adanya go public dapat memberikan insentif bagi manajer teras.

3. Hubungan masyarakat.

Saham perusahaan yang tersebar luas pemilikannya pada masyarakat akan merupakan publikasi yang sangat efektif. Hal tersebut akan lebih bermanfaat bilamana yang dimaksud masyarakat adalah pemegang saham yang juga sebagai konsumen, nasabah dari barang atau jasa tersebut.

4. Diversifikasi.

Go public merupakan alat bagi pemilik suatu perusahaan guna memiliki perusahaan lainnya, karena dana yang diperoleh dari emisi digunakan untuk investasi dalam perusahaan lain guna memenuhi ambisi pribadi.

5. Agunan kredit.

Peninjauan pribadi akan lebih lancar ditangani bank bilamana agunan yang berupa saham yang sudah terdaftar di bursa dari pada saham perusahaan yang belum go public.

Bank-bank go public merupakan bagian dari perusahaan-perusahaan yang telah go public di Indonesia, sehingga yang menjadi motivasi suatu bank untuk go public identik dengan motivasi perusahaan-perusahaan go public pada umumnya. Rijanto (1993 : 3) berpendapat bahwa go publicnya suatu bank merupakan salah satu cara dalam rangka penambahan modal. Cara ini dapat ditempuh mengingat dengan go publicnya suatu bank secara teoritis akan menambah modal dengan biaya yang relatif murah sehingga dapat dijadikan sarana dalam rangka pengembangan usahanya.

Pendapat di atas terbukti dengan adanya suatu data yang memperkuat yang menyatakan bahwa hingga akhir tahun 1992 sudah 155 perusahaan yang mencatatkan sahamnya di pasar modal Indonesia, yang dapat dikelompokkan menjadi 24 sektor. Dari 24 sektor itu ternyata sektor perbankan berhasil meraih pendapatan terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, selain itu sektor ini juga unggul dalam laba, total aktiva dan equity. Keunggulan itu merupakan akumulasi dari pendapatan, laba, total aktiva, dan equity dari 15 buah bank yang telah mencatatkan sahamnya di lantai bursa (Nick Pranata Hasyim : 1993 : 5).

Dalam prospektus bank-bank go public dikemukakan bahwa tujuan bank melakukan penawaran umum (go public) adalah sebagai berikut :

1. Untuk lebih memperkuat struktur permodalan, sehingga lebih memperkokoh likuiditas dan fleksibilitas keuangan perseroan dalam pengembangan usahanya.
2. Untuk meningkatkan kemampuan pendanaan perseroan dalam menunjang biaya pembangunan.
3. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mengambil bagian dalam pemilikan saham perseroan.
4. Untuk membantu mewujudkan pemerataan pemilikan usaha-usaha di Indonesia dan secara khusus dalam kaitannya dengan upaya untuk memasyarakatkan jasa perbankan.
5. Untuk ikut menunjang upaya pemerintah dalam mengembangkan pasar modal.

2.2.3. Kesehatan Bank

Apabila sebuah bank tidak mampu memenuhi kewajiban membayar tepat pada waktunya, maka kecenderungan untuk timbulnya kepanikan diantara para nasabah adalah sangat besar. Para pemegang rekening giro dan tabungan cenderung untuk berlomba-lomba untuk menarik dananya dari bank, serta para deposan cenderung untuk tidak mau memperpanjang penanaman dananya. Bank yang pada mulanya sudah menjumpai kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, akan lebih dipersulit oleh timbulnya kepanikan tersebut. Kepanikan ini biasanya mempunyai kecenderungan untuk merembet pada bank-bank lain. Dengan demikian mudahlah kiranya dimengerti bahwa gejala panik perbankan yang melanda ke seluruh perekonomian dapat mempunyai kemampuan untuk mengakibatkan timbulnya resesi atau bahkan depresi dalam perekonomian (Soediyono Reksoprayitno : 1992 : 115-116).

Untuk menghindarkan terjadinya panik perbankan, maka menjadi kewajiban bank-bank sentral di dunia termasuk Bank Indonesia untuk mengupayakan agar semua bank selalu terjaga tingkat kesehatannya. Untuk itu maka bank sentral di samping mengadakan pembinaan kepada bank-bank, juga harus melaksanakan pengawasan secara ketat atas tingkat kesehatan bank. Bank Indonesia selaku bank sentral atas dasar dan berlandaskan UU Perbankan 1992 dan Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral diberi wewenang melakukan pembinaan

dan pengawasan atas semua jenis bank yang beroperasi di Indonesia (Widjanarto : 1993 : 96).

Penilaian tingkat kesehatan bank pada dasarnya merupakan kepentingan pemilik bank, pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank, serta pengawas dan pembina bank. Menurut Dahlan Siamat (1993 : 22-23), ketentuan tingkat kesehatan bank dimaksudkan untuk dapat dipergunakan sebagai :

1. Standar bagi manajemen bank untuk menilai apakah pengelolaan bank telah dilakukan sesuai dengan asas-asas perbankan yang sehat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
2. Standar untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank baik secara individual maupun untuk industri perbankan secara keseluruhan.

Dalam menentukan tingkat kesehatan suatu bank, pada mulanya Bank Indonesia menilai atas dasar tiga kriteria faktor penilaian, yaitu keadaan keuangan bank, kualitas aktiva produktif, dan tata kerja serta kepatuhan bank terhadap peraturan-peraturan terutama yang berkaitan dengan bidang perbankan. Sistem penilaian ini tercantum dalam SK Direksi BI No. 10/163/KEP/DIR/UPPB dan SEBI No. 10/5/UPPB tanggal 31 Agustus 1977, yang kemudian dicabut dan diperbarui dengan SK Direksi BI No. 23/81/KEP/DIR dan SEBI No. 23/21/BPPP tanggal 28 Februari 1991 (Paktri 1991) yang menerapkan sistem penilaian di samping pengkualifikasian faktor-faktor permodalan, kualitas asset, manajemen,

rentabilitas, dan likuiditas, juga dilakukan penilaian terhadap aspek lain yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank.

Karena dipandang perlu untuk menyempurnakan tata cara penilaian tingkat kesehatan bank maka pada tanggal 29 Mei 1993, SEBI No. 23/21/BPPP tanggal 28 Februari 1991 dicabut dan selanjutnya tatacara penilaian tingkat kesehatan bank disempurnakan dalam "Himpunan Ketentuan Perbankan Yang Disempurnakan Tanggal 29 Mei 1993" melalui SK Direksi BI No. 26/23/KEP/DIR, SEBI NO. 26/5/BPPP, dan SEBI No. 26/6/BPPP. Dalam ketentuan ini tatacara penilaian tingkat kesehatan bank dibedakan antara Bank Umum dengan Bank Perkreditan Rakyat.

Untuk memungkinkan diperolehnya pedoman yang lebih jelas maka dalam tata cara penilaian tingkat kesehatan bank telah ditetapkan beberapa komponen yang dinilai cukup penting untuk dikuantifikasikan. Dengan demikian setelah dilakukan kuantifikasi penilaian, perlu dianalisis dan diuji dengan menggunakan komponen-komponen lain dalam rangka mendapatkan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi dan perkembangan bank yang bersangkutan.

Untuk memperoleh pedoman dalam melakukan kuantifikasi atas faktor, komponen dan bobot sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan bank, serta perkembangan tingkat kuantifikasi, maka tingkat kuantifikasi yang ada dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya, seperti tampak pada Tabel 2.1.

Dari Tabel 2.1. terlihat bahwa faktor permodalan dan

TABEL 2.1.

PERBANDINGAN FAKTOR DAN KOMPONEN PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN
BANK BESERTA BOBOTNYA ANTARA KETENTUAN
PAKTRI 1991 DAN PAKMEI 1993

NO	FAKTOR YANG DINILAI	KOMPONEN	BOBOT	
			PAKTRI 1991	PAKMEI 1993
1.	Permodalan	Rasio modal terhadap ATMR	20%	25%
2.	Kualitas Aktiva Produktif		30%	30%
		a. Rasio aktiva yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif	25%	25%
		b. Rasio penyisihan aktiva produktif terhadap aktiva produktif yang diklasifikasikan	5%	5%
3.	Manajemen		30%	25%
		a. Manajemen Permodalan	1,8%	2,5%
		b. Manajemen Aktiva	6,8%	5,0%
		c. Manajemen Umum	17,4%	12,5%
		d. Manajemen Rentabilitas	2,4%	2,5%
	e. Manajemen Likuiditas	1,8%	2,5%	
4.	Rentabilitas		10%	10%
		a. Rasio laba terhadap total asset	5%	5%
		b. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional	5%	5%
5.	Likuiditas		10%	10%
		a. Rasio call money terhadap aktiva lancar	5%	5%
		b. Rasio kredit yang diberikan terhadap dana yang diterima	5%	5%

Sumber : Paktri 1991, Pakmei 1993, diolah.

manajemen mengalami perubahan bobot dalam penilaian tingkat kesehatan bank, dimana permodalan mengalami peningkatan bobot dari 20% menjadi 25% dan manajemen diturunkan dari 30% menjadi 25%. Hal ini menunjukkan semakin pentingnya Capital Adequacy Ratio (CAR) dalam kriteria kesehatan bank.

Selanjutnya atas dasar hasil penilaian kuantitatif secara keseluruhan atas faktor-faktor beserta komponen-komponen yang dinilai seperti yang tertera pada Tabel 2.1. di atas, akan diperoleh nilai kredit secara keseluruhan. Berdasarkan nilai kredit tersebut, Bank Indonesia akan menggolongkan kesehatan bank ke dalam 4 (empat) predikat sebagaimana terlihat pada Tabel 2.2.

TABEL 2.2.

PENGGOLONGAN PREDIKAT TINGKAT KESEHATAN BANK
BERDASARKAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NO. 26/5/BPPP TANGGAL 29 MEI 1993

NO.	NILAI KREDIT	PREDIKAT
1.	81 - 100	SEHAT
2.	66 - < 81	CUKUP SEHAT
3.	51 - < 66	KURANG SEHAT
4.	0 - < 51	TIDAK SEHAT

Sumber : Pakmei 1993.

Berdasarkan predikat yang tertera pada Tabel 2.2. maka Bank Indonesia dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas dan pembina perbankan, dapat mengambil tindakan berupa sanksi terhadap bank yang melakukan penyimpangan/pelanggaran atas prinsip-prinsip perbankan yang sehat atau tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan yang diperkirakan akan membahayakan kelanjutan usaha bank.

2.2.4. Modal Bank

2.2.4.1. Pengertian Dan Arti Penting Modal Bank

N. Lapoliwa dan Daniel S. Kuswadi (1991 : 77) mengemukakan bahwa selain dana yang harus diserap dari masyarakat, bank juga harus memiliki dana sendiri yang sering disebut dengan modal (equity). Modal dalam pengertian ini dibedakan antara dana setoran modal (paid-up-capital) dan modal yang berasal dari kegiatan intern bank seperti laba yang ditahan (retained earnings) dan cadangan-cadangan lainnya.

Menurut Dahlan Siamat (1993 : 56), yang dimaksud dengan modal adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank di samping memenuhi peraturan yang ditetapkan.

Kamerschen (1988 : 116) mengaitkan pengertian modal bank dengan modal perusahaan pada umumnya. Dalam hal ini dia menyatakan :

"..... bank capital is much like capital provided for any business in that it provides an incentive and protection. As we have seen, a bank need capital to continou operating. In this respect, a bank is no different from any other corporation. Funds invested or reinvested by the owners will earn profits if the business is successful. They will be lost in the event of failure. Thus, capital encourages competent management at the same time that it protect creditors".

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (1993 : 13-14), pengertian modal bagi bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri atas modal inti dan modal pelengkap. Modal inti terdiri atas modal disetor, modal sumbangan, agio saham, cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak, dan laba yang diperoleh bank setelah diperhitungkan pajak. Adapun modal pelengkap terdiri atas modal pinjaman, pinjaman subordinasi, dan cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba.

Pembahasan mengenai modal bank sangat penting karena modal bank berkaitan fungsinya sebagai bumper bagi bank terhadap risiko kerugian yang mungkin timbul, perlunya jumlah modal yang cukup, serta peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh otoritas moneter tentang permodalan dan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi (Jonker Sihombing : 1990 : 60).

Dalam kaitan dengan arti penting modal ini, Walker (1992 : 226) menyatakan :

".....capital serves, at the minimum, the following purposes :

- a. Maintaning public confidence in individual bank and in the comercial banking system.

- b. Serving as a cushion against losses, thereby enabling a bank to function during periods of loss or negligible earnings.
- c. Assuring that risks in commercial banking are appropriately distributed between the private and public sectors.
- d. Providing protection to uninsured depositors, unsecured creditors, and public sectors interests in cases of insolvency.
- e. Providing a foundation to support and discipline growth.
- f. Providing funds for the acquisition of property necessary for banking operations".

Selanjutnya Dahlan Siamat (1993 :58) menyatakan bahwa modal bank bukan saja sebagai salah satu sumber penting dalam memenuhi kebutuhan dana bank, tetapi juga posisi modal bank akan mempengaruhi keputusan-keputusan manajemen dalam hal pencapaian tingkat laba, di satu pihak dan kemungkinan timbulnya risiko di pihak lain. Modal yang terlalu besar misalnya, akan dapat mempengaruhi jumlah perolehan laba bank, sedangkan modal yang terlalu kecil di samping akan membatasi kemampuan ekspansi bank juga akan mempengaruhi penilaian khusus para deposan, debitur, dan juga pemegang saham bank.

2.2.4.2. Fungsi Modal Bank

Havrylesky & Boorman (1976 : 167), menyatakan bahwa fungsi modal bank adalah sebagai berikut :

"....the functions of bank capital are twofold : first to permit acquisition of the institutional structure necessary to perform the intermediation function and provide related services, and the second in conditions short of total economic collapse to provide protection against

unanticipated adversity leading to loss in excess of normal expectations. The capital provision against excessive loss permits the bank to continue operations in period of difficulty until a normal level of earnings is restored".

Graddy et al. (dalam Jonker Sihombing, 1990 : 60 - 61) menyebutkan permodalan bank terkait pada tiga fungsi, yaitu :

1. Operating, artinya untuk pengadaan assets bank yang bersifat permanen seperti bangunan, equipment, dan fasilitas fisik lainnya sebaiknya dibiayai oleh dana jangka panjang dalam bentuk modal.
2. Regulatory, artinya permodalan bank harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter/perbankan, yang tujuannya adalah untuk membatasi risiko yang mungkin timbul dari aktivitas bank.
3. Protective, yakni untuk melindungi (bumper) terhadap para deposan atas kerugian yang mungkin timbul.

Selanjutnya Ryback (1988 : 253) mengemukakan :

"Functions of capital are :

1. Supports volume and character of bank's operations. Level of capital increases confidence in bank, especially when borrowing or raising new capital.
2. Absorbs losses and the unexpected. Depositors are not meant to assume risk; capital should be sufficient to absorb shrinkage in asset value and other losses. Earnings can absorb losses, but not for an unlimited time.
3. Protection to uninsured depositors and debt holders in the even of liquidation. Debt issues have been playing a bigger and bigger part vis-a-vis a bank's financial condition".

Teguh Pudjo Muljono (1992 : 228) berpendapat bahwa modal bagi suatu bank mempunyai fungsi :

1. Sebagai ukuran kemampuan bank untuk menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindarkan.
2. Sebagai sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan usahanya sampai batas-batas tertentu.
3. Sebagai alat pengukur besar kecilnya kekayaan bank atau kekayaan yang dimiliki oleh para pemegang sahamnya.
4. Dengan modal yang mencukupi memungkinkan bagi manajemen bank untuk bekerja dengan efisiensi yang tinggi, seperti yang dikehendaki oleh para pemilik modal pada bank tersebut.

Muchdarsyah Sinungan (1993 : 158) menyebutkan bahwa fungsi utama modal bank adalah untuk melindungi para penyimpan uang (deposan). Di samping itu juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat amat penting artinya bagi bank, karena dengan kepercayaan tersebut bank akan dapat menghimpun dana untuk keperluan operasional. Hal ini berarti modal dasar bank akan bisa digunakan untuk menjaga posisi likuiditas dan investasi dalam aktiva tetap yang amat diperlukan bagi bank.

Dari berbagai pandangan di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa fungsi modal bank dapat dilihat dari tiga sudut pandang yaitu :

1. Dari sudut pandang nasabah (deposan), modal bank berfungsi

untuk melindungi (bumper) atas kerugian yang mungkin terjadi.

2. Dari sudut pandang bank, modal berfungsi untuk menjaga kepercayaan masyarakat sehingga bank akan dapat menghimpun dana dari masyarakat dengan mudah.
3. Dari sudut pandang pemerintah, modal bank berfungsi untuk membatasi risiko yang mungkin timbul dari aktivitas bank sehingga tidak akan menggoncangkan aktivitas perekonomian negara.

2.2.5. Capital Adequacy Ratio (CAR)

Jonker Sihombing (1990 : 64-65) mengemukakan bahwa penentuan besarnya modal yang dianggap cukup bagi sebuah bank adalah relatif, karena tergantung dari sifat assets dan liabilities yang dimiliki bank tersebut. Untuk mengukur tingkat kecukupan permodalan dari sebuah bank, dikembangkan capital adequacy test dan adequacy standart. Capital adequacy test adalah suatu metode pengukuran tingkat kebutuhan modal dikaitkan dengan tingkat risiko yang ditimbulkan assets/ penanaman seperti terlihat dalam neraca. Sedangkan adequacy standart adalah batas tingkat modal yang diperlukan dikaitkan dengan risiko portfolio yang akan digunakan oleh bankir maupun otoritas moneter untuk menentukan apakah sebuah bank termasuk sehat atau tidak sehat. Pada waktu-waktu yang lalu ukuran untuk menilai tingkat kecukupan modal digunakan rasio-

rasio seperti rasio dari :

- a. equity capital to total assets
- b. equity capital to total deposits
- c. equity capital to risk assets
- d. equity capital to loan and discounts.

Perkembangan berikutnya tingkat kecukupan modal tidak hanya dikaitkan dengan aspek-aspek likuiditas saja tetapi juga tingkat pertumbuhan "earning" serta kualitas manajemennya. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Howard, et al. (1980 : 10) menyatakan : "...capital adequacy depends more and more on liquidity, stable earning growth, and the quality of management".

Dalam hubungannya dengan capital adequacy, Maisel (1981 : 20) menyatakan pendapat bahwa :

"Capital is adequate either when it reduces the chances of future insolvency of an institution to some predetermined minimum level or, alternatively, when the premium paid by the bank to an insurer is "fair"; that is, when it fully covers the risks borne by the insurer. Such risk, in turn, depend upon the risk in the portfolio selected by the bank, on its capital, and on terms of insurance with respect to when insolvency will be determined and what losses will be paid".

Selanjutnya Teguh Pudjo Muljono (1992 : 121) menyatakan bahwa tujuan utama analisis tentang "capital adequacy" adalah untuk mengetahui :

1. Apakah permodalan yang ada telah mencukupi untuk mendukung kegiatan bank yang akan dilakukan secara efisien.

2. Apakah permodalan bank tersebut akan mampu untuk meyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindarkan.
3. Apakah kekayaan bank (kekayaan pemegang saham) semakin besar atau semakin mengecil.

Perhitungan Capital Adequacy Ratio (CAR) di Indonesia diatur oleh Bank Indonesia dalam SEBI No. 19/6/UPPB tanggal 27 Mei 1986, kemudian diperbarui dengan Paktri 1991 dan terakhir disempurnakan melalui Paket Kebijakan 29 Mei 1993 yang tertuang dalam SK Direksi BI No. 26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank, dan untuk CAR bank umum diatur dalam SEBI No. 26/1/BPPP tanggal 29 Mei 1993 perihal Kewajiban Penyediaan Minimum Bank Bagi Bank Umum.

Berdasarkan SEBI No. 26/1/BPPP tanggal 29 Mei 1993 ini tatacara perhitungan kebutuhan modal minimum atau yang sering dikenal dengan istilah Capital Adequacy Ratio (CAR) diatur sebagai berikut (Bank Indonesia : 1993 : 48-52) :

1. Aktiva Tertimbang menurut Risiko (ATMR) Neraca terdiri dari :
 - a. ATMR aktiva neraca dalam rupiah dan valas.
 - b. ATMR aktiva administratif dalam rupiah dan valas.
2. Modal, yaitu modal inti dan modal pelengkap.
3. Modal Minimum, yaitu $8\% \times \text{ATMR}$.
4. Kelebihan atau kekurangan modal, yaitu jumlah modal dikurangi modal minimum.

5. Rasio Modal, yaitu = (Jumlah Modal : ATMR) X 100%.

2.2.6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capital Adequacy Ratio (CAR)

Ada berbagai pendapat yang menyebutkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Capital Adequacy Ratio (CAR). Oliver & Porter (dalam Teguh Pudjo Muljono : 1990 : 69-70) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kebutuhan capital bagi suatu bank dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tingkat kualitas management bank yang bersangkutan.
Apabila suatu bank dipimpin/dikelola oleh suatu kelompok management yang berkualitas tinggi ditinjau dari berbagai aspek, maka hasilnya tentu akan berlainan dengan bank yang dikelola oleh suatu kelompok management yang berkualitas rendah dan tidak kompak.
2. Tingkat likuiditas yang dimilikinya.
Suatu bank yang memiliki alat-alat likuid yang sangat terbatas dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, akan ada kemungkinan penyediaan likuiditas tersebut akan diambil dari permodalannya.
3. Tingkat kualitas dari assets.
Suatu bank yang banyak memiliki debitur dubius dan non earning assets lainnya yang kurang produktif maka sudah dapat dipastikan bank tersebut tidak dapat melaksanakan

kegiatannya secara lancar. Bagi bank yang mempunyai tingkat kolektibilitas debiturnya yang tinggi dan mempunyai earning assets yang memadai maka kebutuhan modalnya akan dapat diperoleh dari laba usaha bank yang bersangkutan, sebaliknya jika bank rugi terus menerus maka modal akan terkikis sedikit demi sedikit.

4. Struktur dari depositonya.

Bila bank memperoleh dana sebagian besar berupa deposito berjangka dan dana-dana mahal lainnya, maka akan menimbulkan biaya dana yang tinggi. Jika biaya dana ini tidak dapat ditutup dari penghasilan bank, maka kerugian tersebut harus diserap oleh modal yang dimiliki.

5. Tingkat kualitas dari sistem dan operating prosedurnya.

Sistem dan operating prosedur bank yang baik akan menunjang kegiatan usaha bank pada tingkat efisiensi yang tinggi, sehingga memungkinkan bank untuk memperoleh laba yang akan memperkuat capital.

6. Tingkat kualitas dan karakter dari para pemilik saham.

Para pemilik saham yang berorientasi ke masa depan bank yang dimiliki, akan berusaha untuk membentuk akumulasi modalnya secara maksimal sehingga modal bank akan semakin kuat.

7. Kapasitas untuk memenuhi kebutuhan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.

8. Riwayat pemupukan modal dan peraturan pembagian laba.

Pada bank-bank pemerintah telah ditetapkan tatacara

pembagian laba yang diperoleh tiap tahun secara pasti, tentu tidak ada keleluasaan bagi bank dalam memupuk modalnya. Hal ini berbeda dengan bank swasta yang pembagian labanya dapat diatur lebih bebas, sehingga bank swasta lebih mempunyai kesempatan mengembangkan capitalnya secara maksimal.

Pendapat yang hampir senada dikemukakan oleh Hempel (1976 : 25) yang menyatakan :

"The following factors will be considered by the Controller in assessing the adequacy of capital :

- a. The quality of management.
- b. The liquidity of assets.
- c. The history of earnings and of the retention thereof.
- d. The quality and character of ownership.
- e. The burden of meeting occupancy expenses.
- f. The potential volatility of deposit structure.
- g. The quality of operating procedures.
- h. The bank's cappacity to meet present and future financial needs of its trade area, considering the competition it faces".

Widjanarto (1993 : 143-144) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi CAR adalah sebagai berikut :

1. Jenis aktiva serta besarnya risiko yang melekat padanya.
2. Kualitas aktiva atau tingkat kolektibilitasnya.
3. Total aktiva suatu bank, dimana semakin besar aktiva akan semakin bertambah risikonya.
4. Struktur posisi dan kualitas permodalan bank.
5. Kemampuan bank untuk meningkatkan pendapatan dan laba.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecil-

nya Capital Adequacy Ratio (CAR) menurut kriteria Bank Indonesia adalah variabel-variabel yang membentuk modal bank serta variabel-variabel Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang tidak bebas risiko (bobot risikonya tidak sama dengan nol). Adapun variabel-variabel yang dimaksud terdiri atas :

1. Modal Bank, terdiri atas :

- a. Modal inti, yang secara rinci dapat berupa : modal disetor, agio saham, modal sumbangan, cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan, laba tahun lalu, dan laba tahun berjalan.
- b. Modal pelengkap, yang secara rinci dapat berupa : cadangan revaluasi aktiva tetap, penyisihan penghapusan aktiva produktif, modal pinjaman, dan pinjaman subordinasi.

2. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), terdiri atas :

- a. Aktiva neraca, yang secara rinci dapat berupa : tagihan/penempatan berisiko pada bank lain, surat berharga berisiko yang dimiliki, kredit berisiko yang diberikan, penyertaan, nilai buku dari aktiva tetap dan inventaris, jumlah netto antar kantor aktiva, serta rupa-rupa aktiva.
- b. Rekening administratif berisiko, yaitu jumlah ATMR rekening administratif yang tidak bebas risiko (bobot risiko tidak sama dengan nol).

2.3. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dirumuskan dan tujuan yang ingin dicapai, maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga bahwa variabel-variabel modal disetor, agio saham, laba ditahan, tagihan/penempatan berisiko pada bank lain, surat berharga berisiko yang dimiliki, kredit berisiko yang diberikan, dan rekening administratif secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang sangat bermakna terhadap CAR bank-bank go public di Indonesia.
2. Diantara variabel-variabel yang diteliti, diduga variabel agio saham mempunyai pengaruh yang dominan terhadap CAR bank-bank go public di Indonesia.

2.4. Model Analisis

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan serta untuk kepentingan pengujian hipotesis maka analisis data dalam penelitian ini menggunakan Model Multiple Linear Regression Analysis berdasarkan "data pooling" antara "cross section" dan "time series" yang diolah melalui komputer dengan paket program Microstat. Model ini digunakan karena masalah yang ingin diteliti yakni Capital Adequacy Ratio (CAR) yang merupakan variabel tidak bebas (dependen variable) berhadapan dengan beberapa variabel bebas (independen

variable) yang terdiri atas modal disetor, agio saham, laba ditahan, tagihan/penempatan berisiko pada bank lain, surat berharga berisiko yang dimiliki, kredit berisiko yang diberikan, dan rekening administratif berisiko berdasarkan perkembangannya secara proporsional mungkin mempunyai pengaruh. Sedangkan "data pooling" dilakukan karena jumlah observasi terlalu kecil jika hanya digunakan "cross section" atau "time series" saja.

Adapun formulasi dari Model Multiple Regression Analysis Model adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + b_7X_7 + e$$

dimana :

Y merupakan Capital Adequacy Ratio (CAR), yang dinyatakan dalam persentase (%).

X₁ merupakan modal disetor, yang dinyatakan dalam rupiah.

X₂ merupakan agio saham, yang dinyatakan dalam rupiah.

X₃ merupakan laba ditahan, yang dinyatakan dalam rupiah.

X₄ merupakan tagihan/penempatan berisiko pada bank lain, yang dinyatakan dalam rupiah.

X₅ merupakan surat berharga berisiko yang dimiliki, yang dinyatakan dalam rupiah.

X₆ merupakan kredit berisiko yang diberikan, yang dinyatakan dalam rupiah.

X₇ merupakan rekening administrasi berisiko, yang dinyatakan dalam rupiah.

a merupakan intersep yang menggambarkan pengaruh rata-rata semua variabel yang tidak dimasukkan ke dalam model terhadap Y.

$b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6,$ dan b_7 merupakan koefisien regresi parsial untuk masing-masing $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7$.

e merupakan faktor pengganggu.

Formulasi model di atas merupakan regresi yang berbentuk linear, dan digunakannya bentuk ini karena secara teoritis variabel tidak bebas yang akan diteliti mempunyai kecenderungan hubungan yang linear dengan masing-masing variabel bebasnya.

Penggunaan model regresi untuk pengujian hipotesis harus sesuai dengan asumsi-asumsi klasik yang mendasarinya. Menurut Djoko Mursinto (1990 : 23-24) :

"Metode Pangkat Dua Terkecil (OLS) ini pertama kali dikemukakan oleh Carls Freiderich Gauss, seorang ahli matematik berasal dari Jerman (Damador Gujarati 1991 : 34). Agar metode OLS dapat berjalan dengan baik, maka Gauss mengajukan asumsi yang harus dipenuhi dalam menggunakan OLS untuk regresi dan asumsi tersebut sering dinamakan sebagai asumsi klasik, yang meliputi :

- a. Rata-rata gangguan sama dengan nol, $E(e) = 0$, artinya asumsi ini menginginkan model yang dipakai dapat secara tepat menggambarkan rata-rata variabel tergantung dalam observasi. Dengan kata lain, bila setiap sampel diulang-ulang dengan nilai variabel yang tetap, maka kesalahan dalam tiap observasi akan mempunyai rata-rata sama dengan nol atau saling meniadakan.
- b. Homoskedastik $E(e^2) = E^2$, hal ini dimaksudkan bahwa varians gangguan tidak berbeda dari satu observasi ke observasi lainnya atau dapat dikatakan tiap observasi mempunyai reliabilitas yang sama.

- c. Non-otokorelasi $E(e_i, e_j) = 0$, artinya bahwa gangguan ini di satu observasi tidak berkorelasi dengan gangguan di observasi yang lain. Artinya nilai variabel tidak bebas hanya diterangkan oleh variabel bebas dan bukan oleh variabel gangguan.
- d. Variabel gangguan tidak berkorelasi dengan variabel bebas, artinya Non-Multikolinierity, $E(e_i, X_i) = 0$, asumsi ini mempunyai implikasi bahwa nilai variabel bebas tidak berubah dari satu sampel ke sampel yang lainnya, karena memang variabel bebas ini akan dilihat pengaruhnya terhadap variabel tergantung".

Ke empat hal di atas ini merupakan kondisi yang ideal (klasik) dan bila kondisi yang ideal ini terpenuhi, maka dalam ekonometri dinamakan Best Linear Unbiased Estimator (BLUE).

BAB III

METODOLOGI

3.1. Identifikasi Variabel

Penelitian ini dirancang untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor Modal Bank dan faktor-faktor Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) bank-bank go public di Indonesia. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dengan go publicnya suatu bank secara teoritis akan menambah pemenuhan unsur modal sendiri yang berarti akan secara langsung berpengaruh terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) suatu bank sehingga dapat memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Faktor-faktor Modal Bank yang diteliti terdiri atas modal disetor, agio saham, dan laba ditahan. Sedangkan faktor-faktor Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang diteliti meliputi tagihan/penempatan berisiko pada bank lain, surat berharga berisiko yang dimiliki, kredit berisiko yang diberikan, serta rekening administratif berisiko. Dengan demikian dalam penelitian ini terdapat 8 (delapan) variabel yang akan di analisis.

Dari delapan variabel yang akan dianalisis tersebut dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu variabel tidak bebas (dependent variable) dan variabel bebas (independent

variable). Menurut Moh. Nazir (1985 : 150), yang dimaksud variabel tidak bebas adalah variabel yang tergantung atas variabel lain, sedangkan variabel bebas adalah variabel yang tidak tergantung atas variabel lain.

Bagian pertama yang merupakan variabel tidak bebas (dependent variable) dalam penelitian ini adalah CAR (Y), sedangkan bagian ke dua yang merupakan variabel bebas (independent variable) meliputi : modal disetor (X_1), agio saham (X_2), laba ditahan (X_3), tagihan/penempatan berisiko pada bank lain (X_4), surat berharga berisiko yang dimiliki (X_5), kredit berisiko yang diberikan (X_6), dan rekening administratif berisiko (X_7).

Hubungan antara ke dua jenis variabel tersebut adalah bahwa naik turunnya variabel tidak bebas dipengaruhi oleh perilaku kelompok variabel bebasnya, artinya apabila salah satu atau lebih variabel bebas berubah maka akan mengakibatkan variabel tidak bebas ikut berubah.

3.2. Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan identifikasi variabel maka dari variabel-variabel yang ada, secara operasional dapat didefinisikan sehingga dapat mempermudah dalam melakukan analisis dan pembahasan hasil penelitian. Adapun definisi atau pengertian dari variabel-variabel yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Capital Adequacy Ratio (Y), merupakan kebutuhan modal minimum yang harus disediakan oleh suatu bank dalam melaksanakan kegiatan operasinya.

Rumus untuk menghitungnya adalah :

$$\text{Capital Adequacy Ratio (CAR)} = \frac{\text{Jumlah Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

Ukuran variabel ini adalah persentase, sehingga skala datanya adalah skala rasio.

2. Modal disetor (X_1), merupakan modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya yang terdiri atas saham biasa dan saham preferen.

Besarnya modal ini tampak di dalam passiva neraca.

Satuan dari variabel ini adalah rupiah, sehingga skala datanya adalah skala rasio.

3. Agio saham (X_2), merupakan selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham melebihi nilai nominalnya.

Besarnya nilai agio ini akan terlihat pada passiva neraca.

Satuan variabel ini adalah rupiah, sehingga skala datanya adalah skala rasio.

3. Laba ditahan (X_3), merupakan saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.

Besarnya laba ditahan dapat dilihat pada passiva neraca. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang tertuang dalam Paket Kebijakan Mei 1993 (Pakmei 1993), jumlah laba bersih tahun berjalan yang diperhitungkan dalam komponen laba ditahan dalam rangka perhitungan CAR hanya 50%.

Oleh karena itu besarnya laba ditahan yang diperhitungkan untuk perhitungan CAR = Laba Ditahan - (50% X Laba Tahun Berjalan)

Satuan variabel ini adalah dalam rupiah, sehingga skala datanya adalah skala rasio.

5. Tagihan/penempatan berisiko pada bank lain (X_4), merupakan rekening penanaman dana pada bank lain baik di dalam maupun luar negeri dalam bentuk interbank call money, tabungan, deposito berjangka, dan lain-lain, yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan yang diberikan bobot risiko oleh pihak berwenang sesuai dengan kadar risikonya.

Rumus untuk menghitung variabel ini adalah :

Tagihan/penempatan berisiko

pada bank lain (X_4) = (Rekening-rekening nominal tagihan/penempatan berisiko X Bobot risiko masing-masing rekening).

Satuan dari variabel ini adalah rupiah, sehingga skala datanya adalah skala rasio.

6. Surat berharga berisiko yang dimiliki (X_5), adalah rekening surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, dan lain-lain dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar uang dan pasar modal serta mempunyai bobot risiko yang ditentukan oleh pihak berwenang sesuai dengan kadar risikonya.

Rumus untuk menghitung variabel ini adalah :

Surat berharga berisiko yang dimiliki (X_5) = (Rekening-rekening nominal surat berharga berisiko X Bobot risiko masing-masing rekening).

Satuan variabel ini adalah dalam rupiah, sehingga skala datanya adalah skala rasio.

7. Kredit berisiko yang diberikan (X_6), adalah rekening penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dan mempunyai bobot risiko yang ditentukan oleh pihak berwenang sesuai dengan kadar risikonya.

Rumus untuk menghitung variabel ini adalah :

Kredit berisiko yang diberikan (X_6) = (Rekening-rekening nominal kredit berisiko X Bobot risiko masing-masing rekening).

Satuan dari variabel ini adalah dalam rupiah, sehingga skala datanya adalah skala rasio.

8. Rekening administratif berisiko (X_7), adalah rekening transaksi yang belum mengubah posisi aktiva dan passiva bank pada tanggal laporan tetapi harus dilaksanakan oleh bank apabila persyaratan yang disepakati dengan nasabah terpenuhi, dan mempunyai bobot risiko yang ditentukan pihak berwenang sesuai dengan kadar risikonya.

Rumus untuk menghitung variabel ini adalah :

Rekening adminisatratif berisiko (X_7) = (Rekening-rekening nominal transaksi administarif berisiko X Bobot risiko masing-masing rekening).

Satuan variabel ini adalah rupiah, sehingga skala datanya adalah skala rasio.

3.3. Populasi

Penelitian ini mengkhususkan pada masalah beberapa faktor yang mempengaruhi CAR Bank-Bank Go Public di Indonesia, sehingga yang menjadi populasi adalah seluruh bank go public yang ada di Indonesia. Perlu diketahui bahwa sampai saat penelitian dilakukan, terdapat 15 bank go public yang ada di Indonesia. Adapun nama dan tahun go public masing-masing bank yang dimaksud, terlihat pada Tabel 3.1.

Dari Tabel 3.1. terlihat bahwa meskipun bank-bank yang telah go public sampai dengan akhir Mei 1993 sudah mencapai 15 bank, namun 4 bank diantaranya yang meliputi Ficorinvest

TABEL 3.1.
 JUMLAH BANK-BANK GO PUBLIC DI INDONESIA
 SAMPAI AKHIR MEI 1993

NO.	NAMA BANK	TAHUN GO PUBLIC
1.	Panin Bank	1982
2.	Lippo Bank	1989
3.	Bank Surya	1989
4.	BII	1989
5.	Bank Niaga	1989
6.	Bank Danamon	1989
7.	Bank Bali	1989
8.	Bank Tamara	1990
9.	BDNI	1990
10.	Bank Duta	1990
11.	Bank Umum Nasional	1990
12.	Ficorinvest Bank	1989 *)
13.	PFDCI Bank	1990 *)
14.	Inter Pacific Bank	1990 *)
15.	Indovest Bank	1991 *)

Sumber : Indonesia Stock Market Hand Book 1991 - 1992,
 Info Finansial No. 32/IV 2 Juni 1993, diolah.

Keterangan : *) Go public sejak berbentuk LKBB, berubah
 menjadi bank tahun 1993.

Bank, PFDCI Bank, Inter Pacific Bank, dan Indovest Bank yang sebelumnya berbentuk Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang telah go public baru menjadi bank pada tahun 1993 karena harus menyesuaikan pasal 57 Undang-Undang Perbankan 1992 tentang keharusan LKBB untuk menyesuaikan kegiatan usahanya sebagai Bank. Oleh karena itu dari 15 bank go public yang ada dipilih sebelas bank yang mempunyai laporan keuangan yang

berakhir pada periode yang sama yaitu per 31 Desember tahun 1990, 1991, 1992, dan 1993 sehingga dapat diperbandingkan untuk tujuan analisis, sedangkan empat LKBB yang baru berubah menjadi bank go public tahun 1993 tidak dapat dimasukkan dalam analisis ini.

Dengan demikian dari populasi yang ada, 11 bank go public yang mempunyai laporan keuangan pada waktu yang sama yaitu per 31 Desember 1990, 1991, 1992, dan 1993 yang terdiri atas Panin Bank, Lippo Bank, Bank Surya, BII, Bank Niaga, Bank Danamon, Bank Bali, Bank Tamara, Bank Duta, BDNI, serta Bank Umum Nasional dipilih sebagai obyek penelitian. Melalui penggabungan data (data pooling) antara "cross section" dan "time series" maka akan didapat jumlah observasi yang layak untuk dianalisis.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data rasio, karena baik variabel tidak bebas maupun variabel bebasnya mempunyai ketepatan ukuran relatif tinggi yang berarti variabel-variabel tersebut mempunyai tingkat kepastian atau nilai nol mutlak.

Sedangkan sumber data yang dipergunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya diamati dan dicatat untuk pertama kalinya, sedangkan data sekunder adalah data

yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti (Marzuki : 1977 : 55-56). Jadi data sekunder diperoleh dari hasil pengumpulan pihak ke tiga.

Data primer yang diperlukan terdiri atas catatan-catatan pendukung laporan keuangan dan penjabaran mengenai kebijakan deregulasi perbankan dan peraturan pasar modal. Data ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak yang terkait di Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bursa Efek Surabaya (BES), Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), Bank Indonesia, dan atau pihak bank-bank yang diteliti.

Adapun data sekunder yang diperlukan meliputi laporan keuangan dan kebijakan akuntansi bank-bank go publik, serta literatur, penelitian pihak lain, dan laporan-laporan yang dipublikasikan. Data ini diperoleh dari Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), Bursa Efek di Indonesia, ataupun Indonesia Stock Market Hand Book.

3.5. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui dua tahap :

1. Tahap pertama dilakukan melalui studi pustaka yakni dengan mengumpulkan data pendukung dari literatur, penelitian pihak lain, jurnal-jurnal, dan laporan-laporan yang dipublikasikan untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah

yang akan diteliti serta rencana analisis yang akan dilakukan.

2. Tahap ke dua dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer yang diperlukan berupa catatan-catatan pihak bank sebagai pendukung laporan keuangan serta penjabaran mengenai kebijakan deregulasi perbankan, sedangkan data sekunder yang diperlukan yakni laporan keuangan yang terdiri atas neraca, laporan rugi/laba, rekening administratif, serta lampiran laporan keuangan & kebijakan akuntansi diperoleh dari Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, Bursa Efek di Indonesia, ataupun Indonesia Stock Market Hand Book.

Cara pengumpulan ini dilakukan karena dengan cara tersebut data yang diperlukan lebih mudah diperoleh dengan waktu dan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan apabila semuanya harus dilakukan melalui studi lapangan.

3.6. Teknik Analisis Data

Dalam usaha untuk mencapai tujuan penelitian dan pengujian hipotesis, maka data yang diperoleh selanjutnya diolah dengan suatu analisis yang sesuai dengan kebutuhan penulisan. Untuk kepentingan ini maka digunakan alat-alat analisis keuangan dan berbagai metode statistik. Dalam melakukan analisis keuangan digunakan ukuran-ukuran seperti yang

telah dirumuskan pada sub bab definisi operasional variabel (lihat sub bab 3.2.).

Untuk kepentingan pembahasan, data diolah dan dipaparkan berdasarkan prinsip-prinsip statistik deskriptif, yakni berupa tabel-tabel. Sedangkan untuk kepentingan analisis dan pengujian hipotesis, data di olah secara statistik dengan menggunakan alat bantu paket program Microstat yang sesuai dengan model analisis (lihat sub bab 2.4.) serta di olah melalui komputer.

Untuk menguji hipotesis pertama dilakukan pengujian varians dengan uji F. Dalam uji F ini, jika hasil perhitungan F_{hitung} lebih kecil F_{tabel} ($F_0 \leq F_1$) maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Jika keadaannya demikian berarti bahwa variasi model regresi tersebut tidak dapat menerangkan variasi variabel tergantungnya. Sebaliknya jika hasil perhitungan F_{hitung} lebih besar F_{tabel} ($F_0 > F_1$) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan kondisi yang demikian dapat dikatakan bahwa variasi model regresi tersebut dapat menerangkan variasi variabel tergantungnya.

Selanjutnya untuk melihat kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel tidak bebas dapat diketahui dari besarnya koefisien determinasi berganda (R^2). Dengan kata lain nilai koefisien determinasi berganda digunakan untuk mengukur besarnya sumbangan dari variabel bebas yang diteliti terhadap variasi variabel tidak bebas. Jika R^2 yang diperoleh dari hasil perhitungan semakin besar (mendekati satu), maka

dapat dikatakan bahwa sumbangan dari variabel bebas terhadap variasi nilai variabel tidak bebas semakin besar. Hal ini berarti model yang digunakan semakin kuat untuk menerangkan variasi variabel tidak bebasnya. Sebaliknya jika R^2 semakin kecil (mendekati nol), maka dapat dikatakan bahwa sumbangan dari variabel bebas terhadap variasi nilai variabel tidak bebas semakin kecil. Hal ini berarti model yang digunakan semakin lemah untuk menerangkan variasi variabel tidak bebasnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa besarnya koefisien determinasi berganda (R^2) adalah : $0 < R^2 < 1$.

Untuk menguji hipotesis ke dua, langkah awal yang perlu dilakukan adalah melihat signifikan tidaknya koefisien regresi (parameter) parsial dengan menggunakan uji t. Bila uji t ini ternyata t_{hitung} lebih kecil t_{tabel} ($t_o < t_t$), maka H_o diterima dan H_1 ditolak. Jika keadaannya demikian berarti bahwa variabel bebasnya tidak dapat menjelaskan variabel tidak bebasnya. Sebaliknya jika t_{hitung} lebih besar t_{tabel} ($t_o > t_t$), maka H_o ditolak dan H_1 diterima. Bila keadaan demikian maka dapat dikatakan bahwa pada model yang digunakan, variabel bebas dapat menerangkan variabel tidak bebasnya.

Langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah mencari koefisien determinasi parsial (r^2) dari masing-masing variabel bebas. Koefisien determinasi parsial ini berguna untuk mengetahui sejauh mana sumbangan variabel bebas secara mandiri terhadap variabel tidak bebasnya. Semakin besar r^2

suatu variabel bebas menunjukkan semakin dominannya variabel bebas tersebut terhadap variabel tidak bebasnya, dan variabel bebas yang mempunyai r^2 terbesar menunjukkan bahwa variabel tersebut mempunyai pengaruh dominan terhadap variabel tidak bebasnya.

Hasil perhitungan uji F, R^2 , uji t, dan r^2 dapat diperoleh dari "print out" paket program Microstat yang telah diolah melalui komputer.

BAB IV

KEADAAN UMUM PERBANKAN DI INDONESIA

4.1. Sejarah Perkembangan Perbankan Di Indonesia

Perbankan di Indonesia mulai dikenal pada awal abad ke sembilan belas, ditandai dengan didirikannya beberapa bank oleh pemerintah Hindia Belanda dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan ekonomi, perdagangan, serta pemerintahan kolonialnya. Bank yang pertama kali didirikan bernama Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM), berdiri pada tahun 1824 dimana pemerintah Hindia Belanda bertindak sebagai salah satu pemegang saham utama. Bank ini didirikan untuk mengisi kekosongan akibat likuidasi Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) yang mengalami kebangkrutan pada tahun 1799.

Lebih kurang tiga tahun kemudian tepatnya tanggal 10 Oktober 1827 pemerintah Hindia Belanda mendirikan De Javasche Bank. Bank ini meskipun belum menjadi bank sentral penuh namun menjalankan beberapa tugas yang biasa dilakukan oleh bank sentral, antara lain : mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas, mendiskonto wesel, surat utang jangka pendek dan obligasi negara, menjadi kasir pemerintah, menyimpan dan menguasai dana-dana devisa, serta bertindak sebagai pusat kliring. Meskipun De Javacshe Bank berfungsi sebagai bank sentral pada saat yang sama bank ini juga melakukan kegiatan-kegiatan yang lazim dilakukan oleh bank umum sehingga turut

bersaing dengan bank-bank yang lain.

Pada masa berikutnya berdiri dua buah bank umum milik pemerintah Hindia Belanda yaitu De Postpaarbank serta De Algemene Volkscredietbank (AVB) yang masing-masing didirikan pada tahun 1898 dan 1934.

Selain diramaikan oleh bank-bank tersebut di atas, pada masa itu berkembang pula bank-bank umum swasta lainnya baik yang bermodal pribumi maupun yang bermodal swasta asing seperti dari Belanda, Inggris, Jepang, dan Cina. Bank-bank swasta milik pribumi diantaranya : Bank Nasional Indonesia di Surabaya, Bank Nasional Abuan Saudagar di Bukittinggi, dan Bank Boemi di Jakarta. Sedangkan bank-bank swasta asing yang terkenal misalnya : De Escomptobank dan Nederlandsch-Indische Handelsbank yang kemudian berubah menjadi Nationale Handelsbank (NHB) milik Belanda; The Chartered Bank of India dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation milik Inggris; The Yokohama Species Bank dan The Mitsui Bank milik Jepang; The Overseas Chinese Banking Corporation, The Bank of China, Batavia Bank, dan Bank Vereeniging Oei Tiong Ham milik Cina, dan lain-lain. Bank-bank ini terutama bank swasta asing dapat maju dan berkembang karena pemerintah Hindia Belanda melaksanakan politik pintu terbuka setelah dihapuskannya sistem tanam paksa.

Pada masa pendudukan Jepang antara tahun 1942 - 1945, dunia perbankan di Indonesia mengalami masa suram. Semua bank baik milik pemerintah Hindia Belanda maupun milik swasta

asing ditutup dan diambil alih untuk keperluan perang tentara Jepang, kecuali Algemene Volkscredietbank (AVB). Bank ini diganti nama menjadi Syomin Ginko dan pengelolaannya diserahkan kepada bangsa Indonesia dibawah pengawasan Jepang. Sehubungan dengan penutupan ini Nanpo Kaihatsu Kinko, sebuah bank yang berkantor pusat di Tokyo ditunjuk sebagai likuidator.

Setelah pernyataan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia langsung menghadapi agresi Belanda tahun 1945 - 1949. Pada masa ini wilayah Indonesia terbagi menjadi dua yaitu : daerah federal yakni wilayah RI yang diduduki Belanda serta wilayah republik yang dikuasai RI. Bank-bank yang berdiri di daerah federal adalah bank-bank umum swasta seperti : Bank Sulawesi di Manado, Bank Timur di Semarang yang selanjutnya berubah nama menjadi Bank Gemari, Bank Dagang Indonesia di Banjarmasin, dan Kalimantan Trading Corporation di Samarinda. Bank-bank tersebut masing-masing didirikan pada tanggal 8 Februari 1946, 20 September 1949, 12 Oktober 1949, serta 18 Februari 1950.

Di wilayah republik, pemerintah RI mengambil alih Syomin Ginko dari pengawasan Jepang dan selanjutnya di ubah namanya menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 tahun 1946. Kemudian dengan bantuan modal dari BRI, pemerintah mendirikan Yayasan Bank Negara Indonesia yang selanjutnya melalui Perpu No. 2 tahun 1946 menjadi Bank Negara Indonesia yang sekarang

lebih dikenal dengan BNI 1946. Di samping ke dua bank milik pemerintah tersebut, di wilayah ini terdapat pula bank-bank swasta nasional yang membantu pemerintah RI dalam penukaran uang Jepang dengan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI). Bank-bank yang dimaksud adalah : Bank Surakarta Maskapai Andil Bumiputera (MAI) di Solo yang berdiri tahun 1945, Bank Indonesia di Palembang dan Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) di Medan yang keduanya berdiri tahun 1946, Indonesian Corporation Banking di Yogyakarta berdiri tahun 1947 yang kemudian berubah nama menjadi Bank Amerta, serta Bank Nasional Indonesia di Surabaya yang telah berdiri sejak tahun 1928.

Setelah Belanda mengakui kedaulatan RI, pada tahun 1951 De Javasche Bank dinasionalisasi oleh Pemerintah RI melalui UU No. 51 tahun 1951 dan selanjutnya diganti nama menjadi Bank Indonesia. Setelah pengakuan kedaulatan tersebut dalam kurun waktu tahun 1950 - 1955, bank-bank asing seperti NHB, NHM, Escomto Bank, Bank of China, dll. mulai melakukan aktivitas kegiatannya kembali. Selain itu bermunculan pula bank-bank swasta nasional baru dan dengan dipelopori oleh 12 bank swasta nasional, pada tanggal 27 Mei 1952 terbentuk Perhimpunan Bank-Bank Nasional Indonesia (Perbana). Sampai akhir tahun 1955 jumlah bank swasta nasional yang ada tercatat sebanyak 75 buah.

Pada tahun 1958 ketika dilancarkan aksi merebut Irian Barat dari tangan Belanda, dalam bidang perbankanpun

pemerintah melakukan pula rangkaian tindakan nasionalisasi atas bank-bank milik Belanda yang ada di Indonesia. Di samping itu juga didirikan bank-bank baru dalam rangka membenahi tatanan perekonomian Indonesia masa itu. Wujud nyata dari rangkaian tindakan nasionalisasi dan pendirian bank-bank baru tersebut adalah sebagai berikut :

1. Melalui Perpu No. 39 tahun 1959 National Handels Bank (NHB) dinasionalisasi dan seluruh kegiatan bank ini dialihkan ke Bank Umum Negara (BUNEG) yang didirikan dengan UU No. 1 tahun 1959. Bank Umum Negara inilah yang merupakan cikal bakal Bank Bumi Daya yang ada sekarang.
2. Melalui UU No. 41/prp/1960, Nederlandsche Handels Maatschappij (NHM) dinasionalisasi pada 26 Oktober 1960. Sementara itu pada saat yang sama pemerintah mendirikan bank baru dengan nama Bank Koperasi Tani Dan Nelayan (BKTN), yang bertujuan meningkatkan taraf hidup petani dan nelayan.
3. Tanggal 8 Nopember 1960 pemerintah melebur NHM ke dalam BKTN.
4. Bank lain milik Belanda yang dinasionalisasi adalah Escomtobank berdasarkan UU No. 13/prp/1960, merupakan cikal bakal dari Bank Dagang Negara (BDN) yang ada sekarang.
5. Tanggal 21 April 1960 pemerintah mendirikan Bank Tabungan Pos (BTP). Bank ini kemudian diganti nama menjadi Bank Tabungan Negara (BTN) melalui Perpu No. 4 tahun 1963.

6. Tanggal 25 Mei 1960 pemerintah mendirikan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo). Bank ini mulai bekerja sejak 17 Agustus 1960 setelah Bank Industri Negara dilebur ke dalamnya melalui Perpu No. 17 tahun 1960.
7. Tahun 1962 pemerintah mengeluarkan UU No. 13 tahun 1962 yang mengatur pendirian Bank Pembangunan Daerah (BPD) pada daerah-daerah tingkat I. Setelah keluar UU ini, berdirilah BPD-BPD di berbagai propinsi di Indonesia antara lain BPD Sumatra Selatan, BPD Jambi, BPD Aceh, BPD Jawa Tengah, dan sebagainya.

Pada tahun 1965 meskipun ada pihak yang kurang setuju dengan alasan integrasi bank-bank akan membingungkan para koresponden bank di luar negeri, pemerintah menetapkan kebijakan sistem perbankan tunggal melalui Penetapan Presiden (Penpres) No. 17 tahun 1965. Penpres ini memutuskan bahwa semua bank negara, kecuali Bank Dagang Negara dan Bank Pembangunan Indonesia diintegrasikan menjadi bank tunggal yang bernama Bank Negara Indonesia (BNI), dengan pengintegrasian sebagai berikut :

1. Bank Indonesia menjadi BNI Unit I.
2. Bank Koperasi Tani dan Nelayan menjadi BNI Unit II.
3. Bank Negara Indonesia 1946 menjadi BNI Unit III.
4. Bank Umum Negara menjadi BNI Unit IV.
5. Bank Tabungan Negara menjadi BNI Unit V.

Pada masa ini kondisi perekonomian, termasuk pula kegiatan

industri perbankan mengalami kemerosotan yang cukup drastis. Hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan pemerintah waktu itu yang lebih memberikan prioritas pada masalah-masalah politik dari pada masalah ekonomi. Akibatnya banyak terjadi pelarian modal ke luar negeri dan kegiatan spekulatif tidak dapat dielakkan lagi. Masalah ini semakin diperparah dengan seringnya campur tangan pemerintah dalam perekonomian sehingga membatasi ruang gerak sektor swasta.

Pada awal pemerintahan Orde Baru, Indonesia menghadapi situasi ekonomi moneter yang kurang menguntungkan. Sebagai langkah awal untuk menormalisir situasi ekonomi moneter tersebut, pemerintah memulihkan kembali struktur perbankan dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 14/1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan dan Undang-Undang No. 13/1968 tentang Bank Sentral, juga memberikan izin kepada beberapa bank asing untuk beroperasi di Jakarta.

Dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Perbankan No. 14/1967 dan Undang-Undang Bank Sentral No. 13/1968, berarti sistem perbankan tunggal yang diatur melalui Penpres No. 17 tahun 1965 dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan dicabutnya Penpres ini berarti BNI Unit I kembali menjadi Bank Indonesia, BNI Unit II menjadi Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia yang sekarang menjadi Bank Ekspor Impor, BNI Unit III menjadi Bank Negara Indonesia 1946, BNI Unit IV menjadi Bank Bumi Daya, dan BNI Unit V menjadi Bank Tabungan Negara.

4.2. Deregulasi Perbankan Indonesia

Dalam sistem perekonomian Indonesia sebelum dan saat awal masa Orde Baru, pemerintah memegang peranan yang sangat dominan pada beberapa sektor atau bidang usaha seperti sektor pelayanan publik, pertanian, industri, dan lain-lain termasuk pula sektor perbankan. Peranan tersebut diwujudkan dalam bentuk campur tangan pemerintah dengan cara membuat regulasi atau pengaturan yang dirasakan membatasi kegiatan pihak swasta dalam partisipasinya di bidang perekonomian. Pembatasan ini di samping mempunyai manfaat bagi masyarakat, namun di lain pihak mempunyai dampak negatif yaitu bahwa kegiatan pemerintah yang merupakan bagian dari pelaksanaan birokrasi akan menimbulkan ketidakefisienan dan pembatasan atas kegiatan sektor swasta.

Setelah masa pemerintahan Orde Baru dimana kebijakan-kebijakannya lebih berorientasi ke arah pertumbuhan ekonomi, secara berangsur-angsur berbagai campur tangan langsung pemerintah terhadap perekonomian mulai dikurangi dengan penerapan serangkaian kebijakan deregulasi sehingga pengaturan melalui ekonomi pasar dapat berjalan dengan baik. Dalam bidang perbankan, era deregulasi dimulai sejak periode 1983 hingga sekarang karena dalam periode ini banyak kebijakan baru yang membawa ke arah kemajuan yang cukup pesat atas dunia perbankan Indonesia.

Untuk lebih mudah menguraikan perkembangan perbankan

pada era deregulasi, dapat dikelompokkan ke dalam dua periode yaitu : periode deregulasi sebelum Pakto 1988 dan periode deregulasi Pakto 1988 beserta kebijakan lanjutannya.

4.2.1. Periode Deregulasi Sebelum Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 (Sebelum Pakto 1988)

Deregulasi perbankan Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan 1 Juni 1983 yang selanjutnya lebih sering dikenal dengan Pakjun 1983. Menurut Mudradjad Kuntjoro (1994 : 63), paket kebijakan ini merupakan starting point dari sederetan panjang paket deregulasi bidang moneter (finansial), fiskal, perdagangan dan investasi. Adapun isi pokok dari kebijakan ini adalah sebagai berikut :

1. Penghapusan pagu kredit atau pagu aktiva netto yang telah berlaku sejak April 1974, sebagai suatu instrumen langsung bagi Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan moneter di Indonesia.
2. Memberikan kebebasan kepada bank-bank untuk menentukan sendiri tingkat suku bunga, baik dalam rangka pemupukan dana dari masyarakat maupun penyaluran kreditnya dalam rangka mobilisasi dana masyarakat.
3. Mengurangi volume kredit likuiditas untuk mengurangi ketergantungan bank-bank pada Bank Indonesia . Dalam hal ini kredit likuiditas hanya diberikan untuk sektor-sektor yang berprioritas tinggi.

Di samping itu berdasarkan kebijakan ini pengaturan jumlah uang yang beredar tidak lagi menggunakan perangkat moneter langsung seperti pagu aktiva netto, kredit likuiditas, dan suku bunga, tetapi peralatan moneter yang tidak langsung seperti cadangan wajib, operasi pasar terbuka, fasilitas diskonto, dan pengarahan bank sentral.

Untuk melengkapi Pakjun 1983, Bank Indonesia mengeluarkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan fasilitas diskonto mulai sejak bulan Februari 1984. SBI ini berfungsi sebagai salah satu alat dalam pengendalian moneter secara tidak langsung, yakni bank-bank dapat menanamkan kelebihan likuiditasnya pada Bank Indonesia sebelum dimanfaatkan untuk pemberian kredit kepada para nasabahnya. Kemudian dalam rangka pengembangan alat kebijakan moneter lain yang dapat meningkatkan pengaturan likuiditas perekonomian melalui pasar terbuka, maka pada bulan Februari 1985 dikeluarkan pula Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Setelah kebijakan deregulasi perbankan berjalan lebih kurang dua tahun, maka pada awal bulan September 1985 pemerintah membuat ketentuan bahwa bank-bank asing dapat memberikan kredit ekspor kepada perusahaan termasuk perusahaan asing di luar Jakarta.

Beberapa akibat langsung dari adanya deregulasi perbankan sejak 1 Juni 1983 adalah adanya peningkatan yang pesat jumlah pengerahan dana masyarakat melalui perbankan serta terjadinya pergeseran dana dari dana murah (giro) menjadi dana mahal (deposito) seperti yang tampak pada

Tabel 1.1. Akibat lainnya adalah munculnya persaingan yang semakin tajam antar bank karena suku bunga bebas ditentukan oleh masing-masing bank. Sebagai konsekuensi dari akibat tersebut adalah bank-bank dituntut untuk bekerja lebih efektif dan efisien jika ingin tetap mempertahankan eksistensinya, hal ini berarti mereka harus meningkatkan profesionalismenya.

4.2.2. Periode Deregulasi Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 (Pakto 1988) Beserta Kebijakan Lanjutannya

Era deregulasi perbankan Indonesia yang ke dua dimulai dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 atau yang lebih dikenal dengan istilah Pakto 1988. Sasaran yang ingin dicapai oleh paket kebijakan ini antara lain untuk semakin meningkatkan pengerahan dana masyarakat, mendorong peningkatan ekspor nonmigas, efisiensi lembaga keuangan dan perbankan, peningkatan kemampuan pengendalian pelaksanaan kebijakan moneter, serta mendorong iklim pengembangan pasar modal.

Adapun pokok-pokok isi dari Pakto 1988 tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Pengerahan dana masyarakat.

Untuk mencapai sasaran peningkatan dana masyarakat ini, pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan dalam hal :

a. Syarat-syarat pembukaan kantor cabang bank dan Lembaga

ga Keuangan Bukan Bank (LKBB), sehingga mereka dapat mengembangkan jaringannya dengan cepat.

- b. Syarat-syarat pendirian bank swasta baru dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
- c. Penerbitan Sertifikat Deposito serta penyelenggaraan program Tabanas/Taska dan tabungan lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank -bank dapat mengadakan perluasan produk tabungannya.

2. Peningkatan ekspor nonmigas.

Untuk mencapai sasaran peningkatan ekspor nonmigas ini, kebijakan yang dibuat meliputi :

- a. Peningkatan status dari bank non devisa menjadi bank devisa dipermudah persyaratannya. Di samping itu cabang-cabang dari bank devisa dapat secara otomatis berfungsi berfungsi sebagai bank devisa.
- b. Diijinkannya pendirian bank campuran dan pembukaan kantor cabang pembantu bank asing di salah satu kota Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, dan Ujung Pandang dengan tujuan utama untuk melayani ekspor.
- c. Diperpanjangnya jangka waktu swap serta ijin usaha pedagang valuta asing. Jangka waktu swap diperpanjang dari 6 bulan menjadi maksimum 3 tahun, sedangkan ijin usaha pedagang valuta asing dari 1 tahun menjadi tanpa batas waktu.

3. Peningkatan efisiensi lembaga keuangan dan perbankan.

Untuk mencapai sasaran ini, dana BUMN dan BUMD Bukan Bank

yang sebelumnya harus ditempatkan pada bank pemerintah, sekarang dalam batas tertentu bebas ditempatkan pada semua bank dan LKBB. Di samping itu untuk meningkatkan daya tahan bank dan LKBB dalam memelihara kesehatannya, mereka dikenakan Batas Maksimum Pemberian Kredit kepada debitur, debitur group, pemegang saham, serta direksi dan pegawai.

4. Peningkatan kemampuan pelaksanaan pengendalian moneter dan perbankan, dilakukan dengan menurunkan likuiditas wajib minimum dari 15% menjadi 2% sehingga diharapkan bank dapat mengoptimalkan dana masyarakat yang diserap. Di samping itu juga dilakukan penambahan jangka waktu SBI dan SBPU yang semula hanya 7 hari, sekarang ditambah dengan yang berjangka sampai 6 bulan.

5. Iklim pengembangan pasar modal.

Untuk mendorong iklim pengembangan pasar modal, pemerintah menetapkan pajak terhadap bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan sebesar 15%. Hal ini berarti meletakkan posisi deposito dan tabungan sama dengan penawaran pasar modal seperti saham dan obligasi. Kebijakan yang lain adalah diijinkannya bank dan LKBB untuk memperluas modalnya dengan cara penjualan saham baru melalui pasar modal, di samping peningkatan penyertaan oleh para pemegang saham yang ada.

Dalam perkembangannya, Pakto 1988 tersebut mengalami beberapa kali penyempurnaan dengan maksud untuk disesuaikan terhadap kondisi perkembangan moneter dan perbankan di

Indonesia. Adapun himpunan peraturan-peraturan penyempurnaan itu meliputi :

1. Himpunan Ketentuan Lanjutan Pakto 27 1988, 25 Maret 1989 yang antara lain mengatur : peleburan usaha dan usaha penggabungan bank, penyempurnaan tentang pendirian dan usaha BPR, pemilikan modal bank campuran, pengertian kredit ekspor, pengertian modal sendiri, batas maksimum pemberian kredit, penggunaan tenaga kerja asing, pemeliharaan likuiditas wajib minimum, posisi devisa netto bank devisa dan LKBB, pengawasan dan pembinaan LKBB, pemberian kredit investasi dan penyertaan oleh bank dan LKBB, pajak atas bunga deposito berjangka dan sertifikat deposito milik bank dan LKBB, serta lembaga penunjang pasar modal.
2. Himpunan Ketentuan Penegasan Pelaksanaan Pakto 27 1988, 29 April 1989 dan Ketentuan Kredit Ekspor, 2 Mei 1989 yang mengatur tentang : pemberian kredit dalam valas, swap bank/LKBB dan pinjaman subordinasi, penetapan kurs untuk transaksi devisa, laporan pinjaman dalam negeri dan transaksi devisa, batas maksimum pemberian kredit, pinjaman yang berasal dari Lembaga Kredit Internasional, ketentuan kredit ekspor, serta kegiatan bank sebagai penanggung.
3. Himpunan Ketentuan Lanjutan Pakto 27 1988, 16 September 1989 dan Ketentuan Tentang Bea Meterai Atas Cek dan Bilyet Giro, 6 Oktober 1989 yang antara lain mengatur tentang :

pasar valuta asing dan kaitannya dengan pasar rupiah, penyempurnaan ketentuan tentang perluasan jaringan kantor-kantor bank, serta perubahan tarif bea meterai atas cek dan bilyet giro dengan tujuan untuk mendorong kelancaran otomatisasi kliring.

4. Himpunan Ketentuan Lanjutan Pakto 27 1988, 1 Desember 1989 (Pakdes 1989) Tentang Tabungan, Deposito, Sertifikat Deposito serta Kantor BPR dan Bank Asing.
5. Himpunan Ketentuan Lanjutan Pakto 27 1988, 29 Januari 1990 (Pakjan 1990) tentang Penyempurnaan Sistem Perkreditan.
6. Himpunan Ketentuan Lanjutan Pakto 27 1988, 28 Februari 1991 (Paktri 28 1991) tentang Penyempurnaan Pengawasan Dan Pembinaan Bank.
7. Paket Penyempurnaan 20 Nopember 1991 tentang Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN), Pinjaman Dalam Negeri (PDN), Swap, dan Kredit Dalam Valuta Asing.
8. Himpunan Ketentuan Perbankan Yang Disempurnakan Tanggal 29 Mei 1993 (Pakmei 1993) yang berisi tentang : langkah-langkah untuk meningkatkan kredit perbankan dengan tetap memelihara kestabilan ekonomi, penyempurnaan ketentuan perbankan 29 Mei 1993, kewajiban penyediaan modal minimum bank, batas maksimum pemberian kredit, kredit usaha kecil, wesel ekspor berjangka, kualitas aktiva produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif, serta tatacara penilaian tingkat kesehatan bank.

Salah satu akibat langsung dari dikeluarkannya Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 beserta serangkaian ketentuan lanjutannya ini adalah adanya peningkatan yang cukup pesat jumlah bank beserta kantor cabangnya terutama Bank Umum Swasta Nasional, Bank Asing/Campuran, dan BPR. Akibat lainnya adalah karena munculnya persaingan antar bank yang semakin ketat, membuat para bankir semakin sadar untuk meningkatkan wawasan profesionalisme guna memanfaatkan peluang yang ada.

Tampaknya ke dua era deregulasi perbankan, telah membawa iklim baru dalam usaha industri perbankan di Indonesia. Dengan kebijakan deregulasi, usaha perbankan didorong untuk beroperasi dengan cara yang lebih bebas dalam mengatur dirinya, sedangkan di sisi lain campur tangan langsung dari Bank Indonesia selaku Bank Sentral dalam berbagai bentuknya secara berangsur-angsur semakin dikurangi. Dampak yang lebih nyata dari kebebasan pengelolaan dan pengurangan campur tangan ini telah membawa bank-bank komersial di Indonesia ke dalam situasi usaha yang lebih kompetitif. Oleh karena itu agar masing-masing bank mampu mempertahankan eksistensinya serta mampu mengembangkan usahanya, perlu adanya sikap manajemen yang lebih profesional dari para pengelolanya.

4.3. Undang Perbankan 1992

Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang mulai diberlakukan sejak 25 Maret 1992 dibuat dan disahkan dalam rangka meletakkan landasan idil dan operasional yang lebih kukuh bagi pengembangan usaha perbankan. Pemberlakuan undang-undang perbankan baru tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat disertai dengan tantangan yang semakin luas, harus selalu diikuti secara tanggap oleh perbankan nasional dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Di samping itu terlihat bahwa ternyata Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan serta beberapa undang-undang di bidang perbankan yang berlaku sebelumnya sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional maupun internasional.

Undang-Undang Perbankan 1992 memberikan lebih banyak keleluasaan dan keluwesan dalam pemilikan dan operasi bank, namun bersamaan dengan itu menuntut pula sikap yang lebih bertanggung jawab dari pemilik dan pengelola bank. Undang-Undang ini memuat asas, fungsi, dan tujuan perbankan Indonesia yang dijadikan pegangan oleh pihak-pihak yang terkait dengan bank. Asas perbankan Indonesia adalah demokrasi ekonomi dengan fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, sedangkan tujuannya adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Dengan Undang-Undang Perbankan 1992, diharapkan perbankan nasional menjadi

lebih siap dan mampu berperan secara lebih baik dalam menghadapi tantangan perekonomian yang semakin global.

Mengingat Undang-Undang Perbankan 1992 dibuat untuk mengganti Undang-Undang Perbankan 1967 yang sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian, maka materi ketentuan yang tercantum dalam ke dua undang-undang tersebut sudah banyak yang berbeda. Menurut Muhamad Djumhana (1993 : 34-45), perbedaan materi ketentuan tersebut diantaranya adalah :

1. UU Perbankan 1992 menyederhanakan jenis bank, menjadi jenis bank umum dan bank perkreditan rakyat. Jenis bank perkreditan rakyat merupakan bentuk baru sebagai satu pengakuan atas lembaga yang memiliki peranan membantu golongan ekonomi lemah. Pada UU Perbankan 1967, jenis bank semacam tersebut dibina dan diawasi oleh BRI, tetapi sekarang pengawasan dan pembinaannya dilakukan oleh Bank Indonesia, sama dengan pengawasan dan pembinaan bank umum. Dengan penyederhanaan ini pula maka bentuk bank tabungan dan bank pembangunan dihilangkan.
2. Bentuk badan hukum yang menaungi bank diatur lebih jelas dan hanya mengenal bentuk persero, perusahaan daerah, koperasi, dan perseroan terbatas. Sekarang bank yang berbentuk perusahaan negara diganti menjadi berbentuk persero.
3. Bank dibolehkan melakukan kegiatan penyertaan modal yaitu berupa penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan (pasal 7b dan 7c UU Perbankan 1992).

Ketentuan seperti ini pada UU Perbankan 1967, adalah kegiatan yang dilarang untuk dilakukan oleh bank (penjelasan pasal 25 ayat 2).

4. Ketentuan lain yang dirasakan baru adalah keharusan bank memberikan informasi kepada nasabah (pasal 29 ayat 5 dan penjelasannya), meskipun dirasakan pemberian informasi tersebut terbatas bila bank menjalankan kegiatan perantara dalam melakukan penempatan dana dari nasabah atau membeli/menjual surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
5. Jasa perbankan yang baru mendapat pengaturan yang lebih jelas, seperti : bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, trust atau penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak, pendirian dan pengurusan dana pensiun, dan sebagainya.
6. Pihak terafiliasi dalam operasional bank diatur lebih jelas, tidak hanya mengenai dewan komisaris, direksi, dan karyawan bank saja, melainkan juga ditentukan aturan kepada konsultan hukum, akuntan publik, serta lembaga penilai.

4.4. Peranan Bank Sentral Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia

Dalam sistem perekonomian modern setiap negara pasti memiliki bank sentral atau setidaknya-tidaknya ada salah satu bank/lembaga yang bertindak dan menjalankan fungsi bank

sentral. Hal ini disebabkan bank sentral memiliki fungsi yang sangat penting dalam pengaturan ekonomi dan moneter yang dalam kegiatannya dapat bertindak sebagai agen pemerintah dalam arti luas.

Bank Indonesia (BI) yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 1968, adalah merupakan satu-satunya Bank Sentral di Indonesia. Dalam peranannya terhadap sistem perbankan di Indonesia, bank ini mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang.

Fungsi bank sentral dalam sistem perbankan antara lain sebagai berikut (Dahlan Siamat, 1993 : 26) :

1. Melaksanakan kebijakan moneter dan keuangan.
2. Memberi nasehat kepada pemerintah untuk persoalan-persoalan moneter dan keuangan.
3. Melakukan pengawasan dan pembinaan, serta pengaturan perbankan.
4. Sebagai banker's bank atau lender of last resort.
5. Memelihara stabilitas moneter.
6. Melancarkan pembiayaan pembangunan ekonomi.
7. Mendorong pengembangan perbankan dan sistem keuangan yang sehat.

Sedangkan tugas pokok Bank Indonesia berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral adalah membantu pemerintah dalam : (a) mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah. (b) mendorong

kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

Tugas pokok Bank Indonesia tersebut dapat dirinci sebagai berikut (Sam A. Walean, 1981 : 5 - 6) :

1. Mengeluarkan uang chartal.
2. Memajukan perkembangan perbankan yang sehat.
3. Mengadakan pengawasan terhadap urusan kredit.
4. Membina perbankan dengan jalan :
 - a. Memperluas, memperlancar, serta mengatur lalu lintas pembayaran giral.
 - b. Menyelenggarakan clearing antar bank.
 - c. Menetapkan ketentuan umum tentang likuiditas dan solvabilitas bank.
5. Memberikan kredit likuiditas kepada bank.
6. Menetapkan pembatasan kualitatif dan kuantitatif pemberian kredit oleh perbankan.
7. Mendorong pengerahan dana masyarakat melalui perbankan untuk tujuan usaha pembangunan yang produktif dan berencana.

Sehubungan dengan peranan strategis bank, maka dituntut adanya suatu sistem perbankan yang sehat sehingga mampu memainkan peranannya dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk mencapai hal tersebut, maka mutlak diperlukan adanya bank sentral yang mempunyai wewenang di bidang pembinaan dan pengawasan bank. Bank Indonesia adalah suatu

lembaga negara yang bertugas membantu presiden dalam melaksanakan kebijakan moneter. Meskipun Bank Indonesia selaku bank sentral dalam menjalankan tugasnya berdasarkan garis-garis pokok kebijakan pemerintah di bidang moneter namun berdasarkan undang-undang, kepada bank sentral diberikan beberapa wewenang yang ditujukan ke arah pemeliharaan dan jaminan dari pelaksanaan moneter yang sesuai dengan kebutuhan penjaminan kestabilan nilai mata uang rupiah, perkembangan produksi dan pembangunan guna meningkatkan taraf hidup rakyat, termasuk di dalamnya wewenang di bidang pembinaan dan pengawasan bank.

Di bidang pembinaan dan pengawasan bank ini, bank sentral mempunyai wewenang untuk membina dan mengawasi perbankan di Indonesia terutama dengan jalan pengaturan dan penjaminan likuiditas dan solvabilitas, maupun pengaturan dan pengawasan terhadap pemberian kredit bank. Wewenang tersebut wajib dilakukan dalam rangka usaha perkembangan yang sehat dari sisi operasional bank khususnya serta sistem perbankan pada umumnya.

Dalam rangka meningkatkan keefektifan pembinaan dan pengawasan bank, Bank Indonesia telah memberikan wewenang yang lebih luas kepada masing-masing kantor cabang Bank Indonesia untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap semua kantor bank yang berada di wilayah kerjanya. Di samping itu Bank Indonesia selaku bank sentral telah melakukan kerja sama di bidang pengawasan bank antar otoritas

moneter antar bank sentral. Hal ini merupakan implementasi dari Basle Concordate, yaitu kesepakatan yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlements (BIS) yang mengatur tata cara pengawasan otoritas moneter atau bank sentral terhadap bank-bank yang memiliki cabang di luar negeri. Dalam hubungan ini, sebagai langkah awal Bank Indonesia telah melakukan kerja sama dengan Hong Kong Commissioner of Banking (Bank Indonesia : 1992/93 : 86).

BAB V

DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

5.1. Keadaan Umum Obyek Penelitian

Perusahaan yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah bank-bank yang telah go public paling tidak selama empat tahun atau lebih dari saat penelitian dilakukan. Di samping itu bank-bank yang telah go public tersebut harus mempunyai laporan keuangan yang berakhir pada periode yang sama, yaitu per 31 Desember tahun 1990, 1991, 1992, dan 1993.

Dari seluruh bank go public yang ada, terdapat 11 buah bank yang memenuhi persyaratan sebagai obyek penelitian. Berikut ini akan diuraikan secara ringkas tentang keadaan umum dari bank-bank go public yang dimaksud.

1. Pan Indonesia Bank (Panin Bank)

Panin Bank didirikan pada tanggal 17 Agustus 1971, dengan nama lengkap PT. Pan Indonesia Bank (PT. Panin Bank) dan berkedudukan di Jakarta. Perseroan ini berasal dari penggabungan usaha (merger) antara PT. Bank Industri Dan Dagang Negara, PT. Bank Kemakmuran, serta PT. Bank Industri Djaja Indonesia, dan ini merupakan peristiwa merger pertama dalam sejarah perbankan Indonesia.

Dalam perkembangan berikutnya melalui pengambil alihan,

ada empat bank lagi yang ikut bergabung dengan Panin Bank yaitu PT. Bank Abadi Jaya dan PT. Bank Lingga Harta masing-masing pada tahun 1972 dan 1973, serta PT. Bank Pembangunan Ekonomi dan PT. Bank Pembangunan Sulawesi pada tahun 1975. Dengan demikian berarti Panin Bank merupakan hasil konsolidasi antara tujuh bank di atas. Di samping itu untuk meningkatkan perluasan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya para nasabah, maka sejak tahun 1978 Panin Bank mengadakan kerja sama dengan Credit Lyonnais dalam bentuk bantuan teknis.

Perseroan ini go public sejak tanggal 28 Oktober 1982, dengan melakukan penawaran umum perdana sejumlah 1.637.500 lembar saham biasa atas nama kepada masyarakat dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000,00 dan harga penawaran sebesar Rp 3.475,00 per lembar saham. Jumlah saham yang ditawarkan tersebut bila dilihat dari proporsinya adalah sebesar 12,5 % dari 13.100.000 lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh.

Selanjutnya perkembangan tentang saham Panin Bank yang ditempatkan dan disetor penuh selama masa penelitian menunjukkan 23.613.370 lembar dan 48.144.370 lembar pada akhir periode 1990 dan 1991, serta 240.721.850 lembar pada akhir periode 1992 dan 1993 (lihat Lampiran 36). Selain itu pada Lampiran 36 juga terlihat rasio antara jumlah saham yang diemisikan dengan jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh, yaitu masing-masing menunjukkan 37,04 %, 18,16 %, dan 18,16 %.

29,84 %, dan 100 % pada akhir periode 1990 hingga 1993.

2. Lippo Bank

Perseroan ini berkedudukan di Jakarta, pertama kali didirikan dengan nama NV. Bank Perniagaan Indonesia, yang kemudian pada tanggal 11 Maret 1948 diubah menjadi PT. Bank Perniagaan Indonesia. Pada tanggal 29 Maret 1977 PT. Bank Perniagaan Indonesia melakukan penggabungan usaha (merger) dengan NV. Central Comercial Bank. Selanjutnya pada tanggal 14 Februari 1989, PT. Bank Perniagaan Indonesia diubah menjadi PT. Lippo Bank dan selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Lippo Bank.

Dalam perkembangan berikutnya pada tanggal 31 Juli 1989, Lippo Bank melakukan penggabungan usaha dengan PT. Bank Umum Asia. Selanjutnya pada tanggal 7 September 1989, bank ini ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagai bank devisa.

Perseroan ini go public sejak tanggal 5 Oktober 1989, dengan melakukan penawaran umum perdana sejumlah 6.800.000 lembar saham biasa atas nama kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp 1.000,00 dan harga penawaran sebesar Rp 3.000,00 per lembar saham. Jumlah saham yang ditawarkan tersebut bila dilihat dari proporsinya adalah sebesar 17,14 % dari 39.675.000 lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh.

Selanjutnya perkembangan tentang saham Lippo Bank yang ditempatkan dan disetor penuh selama masa penelitian

menunjukkan 47.610.000 lembar pada akhir periode 1990 dan 1991, serta 142.830.000 lembar dan 190.440.000 lembar pada akhir periode 1992 dan 1993 (lihat Lampiran 36). Selain itu pada Lampiran 36 juga terlihat rasio antara jumlah saham yang diemisikan dengan jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh, yaitu masing-masing menunjukkan 30,95 % pada akhir periode 1990 dan 1991, serta 21,74 % dan 100 % pada akhir periode 1992, dan 1993.

3. Bank Surya

Bank Surya didirikan di Surabaya pada tanggal 17 Juli 1969, dalam bentuk badan hukum yang pada mulanya bernama PT. Bank Surya Indonesia dan waktu itu masih merupakan bank lokal Surabaya. Dalam perjalanan aktivitas usahanya, PT. Bank Surya Indonesia mengalami beberapa kali perubahan kepemilikan. Perubahan nama menjadi PT. Bank Surya terjadi pada tanggal 18 September 1989, menyusul terjadinya pengalihan kepemilikan perseroan dari para pemegang saham lama ke PT. Dwi Golden Graha pada bulan Nopember 1987.

Setelah pengalihan kepemilikan perseroan ke PT. Dwi Golden Graha, segera dilakukan pembenahan manajemen ke arah profesional. Akibat adanya pembenahan ini kegiatan usaha semakin berkembang pesat serta bank tersebut mampu berkembang sebagai bank dengan jaringan nasional dan bahkan diarahkan ke internasional. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan

pelayanan kepada para nasabah khususnya di bidang ekspor/impor dan transaksi devisa, pada bulan Juni 1990 Bank Surya berhasil meningkatkan statusnya menjadi bank devisa.

Perseroan ini go public pada tanggal 29 September 1989 dengan melakukan penawaran umum perdana sejumlah 4.000.000 lembar saham biasa atas nama kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp 1.000,00 dan harga penawaran Rp 7.500,00 per lembar saham. Jumlah saham yang ditawarkan tersebut bila dilihat dari proporsinya adalah sebesar 16 % dari 25.000.000 lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh.

Selanjutnya perkembangan tentang saham Bank Surya yang ditempatkan dan disetor penuh selama masa penelitian menunjukkan 25.000.000 lembar pada akhir periode 1990, 1991 dan 1992, serta 50.000.000 lembar pada akhir periode 1993 (lihat Lampiran 36). Selain itu pada Lampiran 36 juga terlihat rasio antara jumlah saham yang diemisikan dengan jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh, yaitu masing-masing menunjukkan 16 % pada akhir periode 1990, 1991 dan 1992, serta 8 % pada akhir periode 1993.

4. Bank Internasional Indonesia (BII)

Perseroan ini didirikan pada tanggal 15 Mei 1959, dengan nama lengkap PT. Bank Internasional Indonesia (PT. BII) dan berkedudukan di Jakarta. Pada tahun 1979 perseroan melaksanakan penggabungan usaha (merger) dengan PT. Bank

Tabungan Untuk Umum 1859 Surabaya.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya maka pada tanggal 9 Nopember 1988, Bank Internasional Indonesia (BII) dinyatakan oleh Bank Indonesia sebagai bank yang memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya dari Bank Umum Swasta Non Devisa menjadi Bank Umum Swasta Devisa.

Perseroan ini go public pada tanggal 2 Oktober 1989 dengan melakukan penawaran umum perdana sejumlah 12.000.000 lembar saham biasa atas nama kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp 1.000,00 dan harga penawaran Rp 11.000,00 per lembar saham. Jumlah saham yang ditawarkan tersebut bila dilihat dari proporsinya adalah sebesar 10,71 % dari 112.000.000 lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh.

Selanjutnya perkembangan tentang saham BII yang ditempatkan dan disetor penuh selama masa penelitian menunjukkan 140.000.000 lembar dan 203.000.000 pada akhir periode 1990 dan 1991, serta 263.585.920 pada akhir periode 1992 dan 1993 (lihat Lampiran 36). Selain itu pada Lampiran 36 juga terlihat rasio antara jumlah saham yang diemisikan dengan jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh, yaitu masing-masing menunjukkan 8,57 % dan 5,91 % pada akhir periode 1990 dan 1991, serta 4,55 % pada akhir periode 1992, dan 1993.

5. Bank Niaga

Bank Niaga didirikan pada tanggal 26 September 1955, dengan nama lengkap PT. Bank Niaga dan berkedudukan di Jakarta. Dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha, pada tahun 1973 perseroan ini melakukan penggabungan usaha (merger) dengan PT. Bank Agung yang berdomisili di Surakarta beserta ke dua cabangnya di Yogyakarta dan Semarang. Pada tahun 1978 dan 1983 perseroan kembali melakukan penggabungan usaha dengan dua bank swasta lain yaitu Bank Tabungan Bandung dan Bank Amerta.

Oleh karena telah memenuhi syarat sebagai bank devisa, maka pada tahun 1974 Bank Niaga ditingkatkan statusnya menjadi Bank Umum Swasta Devisa Nasional. Dalam perkembangan berikutnya, pada tahun 1986 perseroan membuka cabang di Los Angeles dan pada tahun 1990 mendirikan sebuah Bank Patungan bersama Sumitomo Bank dari Jepang dengan nama Bank Sumitomo Niaga.

Perseroan ini go public pada tanggal 29 Nopember 1989 dengan melakukan penawaran umum perdana sejumlah 5.000.000 lembar saham biasa atas nama kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp 1.000,00 dan harga penawaran Rp 12.500,00 per lembar saham. Jumlah saham yang ditawarkan tersebut bila dilihat dari proporsinya adalah sebesar 10,36 % dari 48.261.000 lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh.

Selanjutnya perkembangan tentang saham Bank Niaga yang

ditempatkan dan disetor penuh selama masa penelitian menunjukkan 48.261.000 lembar dan 52.524.917 lembar pada akhir periode 1990 dan 1991, serta 57.777.417 lembar pada akhir periode 1992 dan 1993 (lihat Lampiran 36). Selain itu pada Lampiran 36 juga terlihat rasio antara jumlah saham yang diemisikan dengan jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh, yaitu masing-masing menunjukkan 10,36 % dan 11,75 % pada akhir periode 1990 dan 1991, serta 19,77 % pada akhir periode 1992, dan 1993.

6. Bank Danamon

Perseroan ini didirikan pada tanggal 15 Juli 1956, dengan nama lengkap PT. Bank Danamon dan berkedudukan di Jakarta. Sejalan dengan perkembangan usahanya, pada tanggal 26 Agustus 1981 perseroan ini melakukan penggabungan usaha dengan Bank Asia Afrika.

Oleh karena telah memenuhi persyaratan, maka pada tanggal 5 Nopember 1988 Bank Danamon memperoleh ijin usaha sebagai bank devisa. Status sebagai bank devisa ini dimanfaatkan oleh Bank Danamon dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada para nasabah khususnya di bidang ekspor/ impor dan transaksi devisa.

Perseroan ini go public pada tanggal 27 Oktober 1989, dengan melakukan penawaran umum perdana sejumlah 12.000.000 lembar saham biasa atas nama kepada masyarakat dengan nilai

nominal Rp 1.000,00 dan harga penawaran Rp 12.000,00 per lembar saham. Jumlah saham yang ditawarkan tersebut bila dilihat dari proporsinya adalah sebesar 10,71 % dari 112.000.000 lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh.

Selanjutnya perkembangan tentang saham Bank Danamon yang ditempatkan dan disetor penuh selama masa penelitian menunjukkan 112.000.000 lembar pada akhir periode 1990, 1991 dan 1992, serta 224.000.000 lembar pada akhir periode 1993 (lihat Lampiran 36). Selain itu pada Lampiran 36 juga terlihat rasio antara jumlah saham yang diemisikan dengan jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh, yaitu masing-masing menunjukkan 10,71 % pada akhir periode 1990, 39,64 % pada akhir periode 1991 dan 1992, serta 100 % pada akhir periode 1993.

7. Bank Bali

Bank Bali didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 1954, dalam bentuk badan hukum yang pada mulanya bernama PT. Bank Persatuan Dagang Indonesia. Kemudian berdasarkan pertimbangan praktis maka pada tanggal 5 Oktober 1971 nama PT. Bank Persatuan Dagang Indonesia diubah menjadi PT. Bank Bali yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Bank Bali.

Dalam perkembangan aktivitasnya, bank ini telah memperoleh status sebagai bank devisa pada tanggal 1 Juni 1956. Kemudian dalam rangka meningkatkan profesionalisme,

pada tanggal 1 April 1974 Bank Bali mengadakan kerja sama dengan The Sanwa Bank Ltd. Jepang dalam bentuk "technical assistance". Selanjutnya untuk mengantisipasi tahap pengembangan usaha, bank ini pada tanggal 8 Agustus 1988 mengadakan penggabungan usaha dengan Bank Dharma Usada di Surabaya.

Perseroan ini go public pada tanggal 2 Desember 1989, dengan melakukan penawaran umum perdana sejumlah 3.999.000 lembar saham biasa atas nama kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp 1.000,00 dan harga penawaran Rp 9.900,00 per lembar saham. Jumlah saham yang ditawarkan tersebut bila dilihat dari proporsinya adalah sebesar 8,6 % dari 46.524.000 lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh.

Selanjutnya perkembangan tentang saham Bank Bali yang ditempatkan dan disetor penuh selama masa penelitian menunjukkan 62.032.000 lembar pada akhir periode 1990 dan 1991, serta 186.096.000 lembar pada akhir periode 1992 dan 1993 (lihat Lampiran 36). Selain itu pada Lampiran 36 juga terlihat rasio antara jumlah saham yang diemisikan dengan jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh, yaitu menunjukkan 100 % pada akhir periode 1990 hingga 1993.

8. Tamara Bank

Tamara Bank didirikan pada tanggal 29 Agustus 1977, dengan nama lengkap PT. Tamara Bank dan berkedudukan di

Jakarta. Berdirinya perseroan ini merupakan hasil konsolidasi usaha dari PT. Taurus Credit Bank yang berdiri sejak 1957 dan PT. Bank Semarang yang berdiri sejak 1971.

Karena adanya peningkatan asset dan perkembangan kegiatan usahanya, maka pada tanggal 22 Agustus 1989 status perseroan dinyatakan oleh Bank Indonesia sebagai bank yang memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya dari Bank Umum Swasta Non Devisa menjadi bank devisa.

Perseroan ini go public pada tanggal 30 Januari 1990, dengan melakukan penawaran umum perdana sejumlah 3.000.000 lembar saham biasa atas nama kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp 1.000,00 dan harga penawaran Rp 8.000,00 per lembar saham. Jumlah saham yang ditawarkan tersebut bila dilihat dari proporsinya adalah sebesar 20 % dari 15.000.000 lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh.

Selanjutnya perkembangan tentang saham Tamara Bank yang ditempatkan dan disetor penuh selama masa penelitian menunjukkan 15.000.000 lembar pada akhir periode 1990, 1991, dan 1992, serta 36.000.000 lembar pada akhir periode 1993 (lihat Lampiran 36). Selain itu pada Lampiran 36 juga terlihat rasio antara jumlah saham yang diemisikan dengan jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh, yaitu menunjukkan 20 % pada akhir periode 1990, 1991, dan 1992, serta 8,33 % pada akhir periode 1993.

9. Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI)

Perseroan ini didirikan di Medan pada tanggal 5 Oktober 1945, dengan nama PT. Bank Dagang Nasional Indonesia (PT. BDNI). Dalam perkembangannya pada tahun 1954 perseroan membuka cabang di Jakarta, kemudian setahun berikutnya mendapat ijin dari bank Indonesia untuk melakukan transaksi devisa.

Seiring dengan perkembangan ekonomi di Indonesia dan dalam rangka untuk memudahkan pengembangan usaha, maka pada tahun 1977 kantor pusat Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dipindahkan dari Medan ke Jakarta.

Perseroan ini go public pada tanggal 2 April 1990, dengan melakukan penawaran umum perdana sejumlah 11.000.000 lembar saham biasa atas nama kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp 1.000,00 dan harga penawaran Rp 8.000,00 per lembar saham. Jumlah saham yang ditawarkan tersebut bila dilihat dari proporsinya adalah sebesar 8,088 % dari 136.000.000 lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh.

Selanjutnya perkembangan tentang saham BDNI yang ditempatkan dan disetor penuh selama masa penelitian menunjukkan 136.000.000 lembar pada akhir periode 1990 dan 1991, serta 234.601.949 lembar dan 351.601.949 lembar pada akhir periode 1992 dan 1993 (lihat Lampiran 36). Selain itu pada Lampiran 36 juga terlihat rasio antara jumlah saham yang diemisikan dengan jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh, yaitu masing-masing menunjukkan 8,09 % dan 57,97 %

pada akhir periode 1990 dan 1992, serta 100 % pada akhir periode 1991, dan 1993.

10. Bank Duta

Bank Duta didirikan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 1966, dalam bentuk badan hukum yang pada mulanya bernama PT. Bank Dharma Ekonomi yang kemudian pada tahun 1969 diubah menjadi PT. Bank Duta Ekonomi. Perseroan ini terakhir mengalami perubahan nama dari PT. Bank Duta Ekonomi menjadi PT. Bank Duta pada tahun 1985.

Dalam rangka pengembangan usaha dan sejalan dengan kegiatan usaha yang telah mengalami perkembangan, perseroan ini melakukan penggabungan usaha (merger) dengan PT. Bank Dwikora Pontianak dan PT. Bank Sarma Surabaya masing-masing pada tahun 1975 dan 1976. Selanjutnya, pada tanggal 3 Januari 1978 perseroan dinyatakan oleh Bank Indonesia sebagai bank yang memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya dari Bank Umum Swasta Non Devisa menjadi bank devisa.

Perseroan ini go public tanggal 12 April 1990, dengan melakukan penawaran umum perdana sejumlah 27.500.000 lembar saham biasa atas nama kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp 1.000,00 dan harga penawaran Rp 8.000,00 per lembar saham. Jumlah saham yang ditawarkan tersebut bila dilihat dari proporsinya adalah sebesar 19,56 % dari 140.596.538 lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh.

Selanjutnya perkembangan tentang saham Bank Duta yang ditempatkan dan disetor penuh selama masa penelitian menunjukkan 136.000.000 lembar pada akhir periode 1990, 1991, dan 1992, serta 351.601.949 lembar pada akhir periode 1993 (lihat Lampiran 36). Selain itu pada Lampiran 36 juga terlihat rasio antara jumlah saham yang diemisikan dengan jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh, yaitu menunjukkan 24,89 % pada akhir periode 1990 hingga 1993.

11. Bank Umum Nasional (BUN)

Bank Umum Nasional (BUN) didirikan pada tanggal 2 September 1952, dengan nama lengkap PT. Bank Umum Nasional dan berkedudukan di Jakarta. Dalam perkembangannya, pada bulan Nopember 1954 bank ini memperoleh ijin dari Bank Indonesia untuk beroperasi sebagai bank devisa.

Kejadian penting lainnya yang berkaitan dengan pengembangan kegiatan operasi bank ini diantaranya adalah diperkuatnya struktur modal dan manajemen bank pada pertengahan tahun 1972 oleh PT. Kedjajaan Budi bersama-sama dengan Kaharudin Ongko. Dengan struktur permodalan dan manajemen baru tersebut pengelolaan bank dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen perbankan modern sehingga membuat posisi bank semakin kokoh.

Bank ini go public pada tanggal 26 Mei 1990, dengan melakukan penawaran umum perdana sejumlah 8.000.000 lembar

saham biasa atas nama kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp 1.000,00 dan harga penawaran Rp 9.000,00 per lembar saham. Jumlah saham yang ditawarkan tersebut bila dilihat dari proporsinya adalah sebesar 8,16 % dari 98.000.000 lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh.

Selanjutnya perkembangan tentang saham Bank Umum Nasional yang ditempatkan dan disetor penuh selama masa penelitian menunjukkan 98.000.000 lembar pada akhir periode 1990 dan 1991, serta 156.800.089 lembar pada akhir periode 1992 dan 1993 (lihat Lampiran 36). Selain itu pada Lampiran 36 juga terlihat rasio antara jumlah saham yang diemisikan dengan jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh, yaitu menunjukkan 8,16 % pada akhir periode 1990 dan 1991, serta 5,10 % pada akhir periode 1992, dan 1993.

5.2. Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan kebutuhan minimum bank yang harus disediakan oleh suatu bank dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam definisi operasional variabel (lihat sub bab 3.2.), maka perhitungan Capital Adequacy Ratio (CAR) dilakukan dengan membagi antara jumlah modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang dimiliki oleh suatu bank dan dinyatakan dalam persentase.

Adapun rincian tentang variabel-variabel modal dan ATMR didasarkan atas ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/1/BPPP tanggal 29 Mei 1933, perihal : Kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum. Sedangkan contoh formulir mengenai perhitungan Capital Adequacy Ratio (CAR) atau penyediaan modal minimum terlihat pada Lampiran 18.

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka perkembangan Capital Adequacy Ratio (CAR) bank-bank go public yang diteliti selama periode 31 Desember 1990 hingga 1993 dapat dilihat pada Tabel 5.1..

Dari Tabel 5.1. diketahui bahwa selama empat tahun periode penelitian CAR rata-rata bank-bank yang diteliti berturut-turut mencapai 8,67 %, 9,09 %, 9,35 %, dan 8,75 % pada masing-masing periode. Tingkat CAR terendah yang dicapai masing-masing periode menunjukkan 4,32 %, 5,07%, 6,21 % dan 5,18 %, sedangkan tingkat CAR tertinggi mencapai 15,05 %, 15,64 %, 15,75 %, dan 14,47 %.

Berdasarkan Tabel 5.1. tersebut juga terlihat bahwa jumlah bank go public yang telah mencapai tingkat CAR di atas 8 % masing-masing 6 bank pada tahun 1990, 7 bank pada tahun 1991 dan 1992, serta 6 bank pada tahun 1993. Hal lain yang dapat diamati dalam perkembangan CAR tersebut adalah ternyata tingkat CAR terendah dari awal hingga akhir periode pengamatan selalu berada pada bank yang sama. Di samping itu terlihat pula bank yang belum pernah mencapai tingkat CAR

sebesar 8 % sepanjang periode pengamatan, bahkan ada beberapa bank yang pada mulanya telah mencapai standar ketentuan kemudian turun kembali di bawah 8 % pada akhir 1993. Kondisi

TABEL 5.1.

CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR)
BANK-BANK GO PUBLIC YANG DITELITI
PER 31 DESEMBER 1990, 1991, 1992, DAN 1993
(DALAM PERSENTASE)

No.	Nama	Tahun			
		1990	1991	1992	1993
1.	Panin Bank	5,76	15,64	15,75	13,02
2.	Lippo Bank	5,80	5,80	7,47	8,82
3.	Bank Surya	15,05	11,68	11,05	11,06
4.	BII	10,63	8,66	8,21	6,21
5.	Bank Niaga	4,32	5,07	6,14	5,20
6.	Bank Danamon	9,10	7,68	9,35	7,34
7.	Bank Bali	8,32	9,20	9,39	8,03
8.	Tamara Bank	11,33	9,69	8,40	5,32
9.	BDNI	10,06	8,42	7,01	10,22
10.	Bank Duta	7,76	11,40	12,42	14,47
11.	Bank Umum Nasional	7,27	6,76	7,71	6,56

Sumber : Diolah dari Lampiran 19 sampai dengan Lampiran 29.

tersebut menunjukkan bahwa, untuk meningkatkan CAR sangat diperlukan pengendalian yang terpadu antara manajemen permodalan dan manajemen aktiva.

5.3. Modal Disetor

Modal disetor bagi suatu bank merupakan modal yang telah disetor secara efektif oleh pemilik bank yang terdiri atas saham biasa dan saham preferen. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam definisi operasional variabel (lihat sub bab 3.2.), maka besarnya modal disetor bagi suatu bank akan tampak di dalam passiva neracanya.

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka perkembangan jumlah modal disetor bank-bank go public yang diteliti selama periode 31 Desember 1990, 1991, 1992, serta 1993 dapat dilihat pada Tabel 5.2..

Dari Tabel 5.2. terlihat bahwa pada umumnya selama kurun waktu penelitian terdapat peningkatan jumlah modal disetor yang cukup berarti. Hanya terdapat sebuah bank yang mempunyai modal disetor relatif tetap. Terdapat dua buah bank yang mempunyai modal disetor relatif tetap selama periode 1990, 1991, dan 1992 kemudian meningkat pada tahun 1993, empat buah bank mempunyai modal disetor relatif tetap selama periode 1990 dan 1991 kemudian meningkat pada periode 1992 dan 1993, sedangkan yang lain mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

TABEL 5.2.
JUMLAH MODAL DISETOR
BANK-BANK GO PUBLIC DITELITI
PER 31 DESEMBER 1990, 1991, 1992, DAN 1993
(DALAM MILYAR RUPIAH)

No.	Nama	Tahun			
		1990	1991	1992	1993
1.	Panin Bank	23.613.000.000	48.144.000.000	240.722.000.000	240.722.000.000
2.	Lippo Bank	47.610.000.000	47.610.000.000	142.830.000.000	190.440.000.000
3.	Bank Surya	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	50.000.000.000
4.	BII	140.000.000.000	203.000.000.000	263.585.920.000	263.585.920.000
5.	Bank Niaga	48.261.000.000	52.524.917.000	57.777.417.000	57.777.417.000
6.	Bank Danamon	112.189.343.243	112.189.343.243	112.189.343.242	424.189.343.243
7.	Bank Bali	62.032.000.000	62.032.000.000	186.096.000.000	186.096.000.000
8.	Tasara Bank	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	36.000.000.000
9.	BDNI	136.000.000.000	136.000.000.000	234.601.949.000	351.601.949.000
10.	Bank Duta	140.596.538.000	140.596.538.000	140.596.538.000	140.596.538.000
11.	Bank Umum Nasional	98.000.000.000	98.000.000.000	156.800.089.000	156.800.089.000

Sumber : Diolah dari Lampiran 1.

Dari hasil pengamatan selama masa penelitian, peningkatan modal disetor tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain karena adanya penambahan saham baru yang

berasal dari pembagian dividen saham, adanya saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham, adanya penggabungan usaha (merger), dan terjadinya penjualan saham baru.

5.4. Agio Saham

Agio saham merupakan selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham melebihi nilai nominalnya. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam definisi operasional variabel (lihat sub bab 3.2.), maka besarnya agio saham suatu bank akan tampak di dalam passiva neracanya.

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka perkembangan agio saham bank-bank go public yang diteliti selama periode 31 Desember 1990, 1991, 1992, serta 1993 terlihat pada Tabel 5.3..

Dari Tabel 5.3. terlihat bahwa pada selama kurun waktu penelitian tingkat agio saham yang dimiliki oleh bank-bank go public menunjukkan perilaku yang berbeda-beda antara bank yang satu dengan lainnya. Pada suatu kasus ada tingkat agio saham yang stabil sepanjang periode penelitian, ada tingkat agio saham yang stabil kemudian pada tahun terakhir penelitian habis, ada tingkat agio yang berfluktuasi, serta beberapa perilaku yang lain. Kasus yang paling banyak terjadi adalah adanya tingkat agio yang menurun pada akhir periode penelitian, meskipun ada beberapa kasus yang menunjukkan peningkatan yang cukup drastis pada periode tersebut.

TABEL 5.3.
AGIO SAHAM
BANK-BANK GO PUBLIC YANG DITELITI
PER 31 DESEMBER 1990, 1991, 1992, 1993
(DALAM MILYAR RUPIAH)

No.	Nama	Tahun			
		1990	1991	1992	1993
1.	Panin Bank	61,822.000.000	209,008.000.000	16,430.000.000	16,430.000.000
2.	Lippo Bank	97,058.489.000	97,058.489.000	-	95,220.000.000
3.	Bank Surya	26,000.000.000	26,000.000.000	26,000.000.000	1,000.000.000
4.	BII	120,000.000.000	106,000.000.000	106,398.418.623	106,398.418.623
5.	Bank Niaga	58,388.033.000	58,388.033.000	79,398.003.000	79,398.003.000
6.	Bank Danamon	132,000.000.000	132,000.000.000	132,000.000.000	20,000.000.000
7.	Bank Bali	144,148.525.000	144,148.525.000	20,084.525.000	20,084.525.000
8.	Tamara Bank	21,000.000.000	21,000.000.000	21,000.000.000	-
9.	BDNI	82,500.000.000	82,500.000.000	0,899.188.400	176,399.184.000
10.	Bank Duta	38,531.352.504	38,531.352.504	38,531.352.504	38,531.532.504
11.	Bank Umum Nasional	64,000.000.000	64,000.000.000	5,199.911.000	5,199.911.000

Sumber : Diolah dari Lampiran 2.

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa agio saham mempunyai sifat yang relatif kurang permanen dalam menunjang peningkatan modal bank secara langsung, artinya jumlah agio saham yang tinggi pada suatu periode tiba-tiba berkurang

secara drastis atau bahkan dapat habis pada periode berikutnya. Sebaliknya dapat terjadi pula agio saham kondisi dimana pada suatu periode agio saham habis, namun menunjukkan jumlah yang cukup tinggi pada periode berikutnya.

Dari hasil pengamatan selama masa penelitian, ternyata sifat yang kurang permanen dari agio saham tersebut disebabkan oleh adanya kapitalisasi atas sebagian atau seluruh agio saham yang dimiliki oleh suatu bank. Kejadian ini mengakibatkan agio saham berkurang atau bahkan habis, dan berubah menjadi saham bonus yang dibagikan kepada para pemegang saham lama sehingga mengakibatkan meningkatnya jumlah modal disetor. Penyebab lainnya adalah adanya kasus dimana pada suatu periode, agio saham habis dikapitalisasi menjadi saham bonus kemudian pada periode berikutnya bank melakukan penjualan saham baru. Hal ini akan mengakibatkan munculnya agio saham kembali.

5.5. Laba Ditahan

Laba ditahan merupakan saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan. Jumlah laba ditahan ini berasal dari penjumlahan total atas sisa laba/rugi tahun-tahun lalu yang tidak dibagikan dan laba/rugi bersih tahun berjalan setelah dikurangi dividen.

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam definisi operasional variabel (lihat sub bab 3.2.), maka besarnya laba ditahan akan tampak di dalam passiva neracanya. Namun demikian mengingat laba tahun berjalan yang digunakan sebagai komponen untuk menghitung CAR hanya sebesar 50% saja, maka laba ditahan yang akan diperhitungkan dalam komponen CAR adalah jumlah laba ditahan yang tercantum dalam passiva dikurangi dengan 50 % dari laba tahun berjalan.

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka perkembangan laba ditahan yang diperhitungkan dalam komponen CAR bank-bank go public yang diteliti selama periode 31 Desember 1990, 1991, 1992, serta 1993 terlihat pada Tabel 5.4..

Dari Tabel 5.4. terlihat bahwa pada selama kurun waktu penelitian, posisi tertinggi dalam hal jumlah laba ditahan yang diperhitungkan dalam komponen CAR masing-masing ditempati oleh Bank Bali pada periode 1990, 1991, dan 1992 serta BII pada periode 1993, sedangkan posisi terendah ditempati oleh Bank Duta dan BII pada periode 1990 dan 1991 serta Bank Surya pada periode 1992 dan 1993.

Di samping itu, tampak pula bahwa semua bank go public yang diteliti mengalami peningkatan yang cukup berarti dalam hal jumlah laba ditahan yang diperhitungkan dalam komponen CAR. Hal ini terjadi karena dalam kegiatan operasinya, bank-bank tersebut selalu memperoleh peningkatan laba usaha dalam setiap periode dan laba usaha yang diperoleh tidak semuanya

dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen namun sebagian selalu disisihkan untuk penambahan modal.

TABEL 5.4.

LABA DITAHAN YANG DIPERHITUNGKAN DALAM KOMPONEN CAR
BANK-BANK GO PUBLIC YANG DITELITI
PER 31 DESEMBER 1990, 1991, 1992, DAN 1993
(DALAM MILYAR RUPIAH)

No.	Nama	Tahun			
		1990	1991	1992	1993
1.	Panin Bank	9,167.500.000	33,839.000.000	33,533.300.000	38,548.000.000
2.	Lippo Bank	10,292.806.000	25,919.865.500	45,301.680.000	75,407.471.500
3.	Bank Surya	3,948.942.500	6,717.891.000	10,188.277.500	14.512.084.500
4.	BII	5,362.233.022	6,330.116.081	18,191.216.781	89,646.142.230
5.	Bank Niaga	14,193.560.000	31,706.973.000	41,969.679.000	53,668.611.000
6.	Bank Danamon	13,022.879.516	29,399.272.239	50,300.935.479	77,586.412.760
7.	Bank Bali	20,689.638.802	55,427.252.500	63,959.198.661	86,296.391.230
8.	Tanara Bank	8,262.645.286	11,065.157.000	15,462.610.500	21,401.120.500
9.	BDNI	20.299.530.000	35,629.250.551	32,532.758.000	58,094.898.500
10.	Bank Duta	2,416.028.660	22,788.933.371	46,169.739.000	21,472.389.500
11.	Bank Umum Nasional	15.056.850.504	31,947.743.277	45,854.035.479	60,758.492.550

Sumber : Diolah dari Lampiran 3.

5.6. Tagihan/Penempatan Berisiko Pada Bank Lain

Tagihan/penempatan berisiko pada bank lain merupakan rekening penanaman dana pada bank lain baik di dalam inter-bank call money, tabungan, deposito berjangka dan lain-lain yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan serta mempunyai bobot risiko yang ditentukan oleh pihak berwenang (Bank Indonesia). Sebagaimana yang telah diuraikan dalam definisi operasional variabel (lihat sub bab 3.2.), maka perhitungan besarnya tagihan/penempatan berisiko pada bank lain dilakukan dengan mencari jumlah nominal dari seluruh tagihan/penempatan pada bank lain, kemudian jumlah tersebut dikalikan dengan bobot risikonya (lihat Lampiran 4).

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka perkembangan tagihan/penempatan berisiko pada bank lain yang dimiliki oleh bank-bank go public yang diteliti selama periode 31 Desember 1990, 1991, 1992, serta 1993 terlihat pada Tabel 5.5..

Dari Tabel 5.5. terlihat bahwa pada selama kurun waktu penelitian, sebagian besar bank-bank go public yang diteliti mempunyai perkiraan tagihan/penempatan berisiko yang dimiliki dengan perilaku yang berfluktuasi, sedangkan sebagian lainnya menunjukkan kondisi yang selalu meningkat pada setiap periode. Kasus yang menunjukkan perilaku yang berfluktuasi meliputi Lippo Bank, BII, Bank Danamon, Bank Bali, Bank Duta, dan Bank Umum Nasional, sedangkan kasus yang menunjukkan

TABEL 5.5.

TAGIHAN/PENEMPATAN BERISIKO PADA BANK LAIN
BANK-BANK GO PUBLIC YANG DITELITI
PER 31 DESEMBER 1990, 1991, 1992, DAN 1993
(DALAM MILYAR RUPIAH)

No.	Nama	Tahun			
		1990	1991	1992	1993
1.	Panin Bank	53,585.200.000	66,230.600.000	185,347.000.000	235,794.200.000
2.	Lippo Bank	141,488.048.800	179,531.714.400	220,189.266.400	124,638.241.200
3.	Bank Surya	2,915.174.800	9,739.071.000	19,377.693.200	33,682.385.600
4.	BII	44,857.002.804	37,510.033.813	58,874.126.838	49,785.283.074
5.	Bank Niaga	22,729.261.400	22,789.010.400	41,892.725.200	76,063.000.400
6.	Bank Danamon	124,434.895.791	25,933.174.233	51,235.595.097	155,874.320.119
7.	Bank Bali	48,293.495.558	89,377.894.798	83,822.914.856	54,302.372.419
8.	Tamara Bank	2,680.253.088	8,509.642.600	15,221.169.000	26,683.921.600
9.	BDNI	4,270.126.800	17,584.759.600	27,284.841.600	52.472.485.400
10.	Bank Duta	65,090.713.622	92,666.594.061	46,498.519.200	40,527.080.800
11.	Bank Umum Nasional	59,897.800.903	86.212.119.714	69,703.789.925	101,344.113.323

Sumber : Diolah dari Lampiran 4.

kondisi perkiraan tagihan/penempatan berisiko yang selalu meningkat meliputi Panin Bank, Bank Surya, Bank Niaga, Tamara Bank, serta BDNI.

Kondisi tersebut di atas memberikan gambaran bahwa bank-bank go public yang diteliti dalam menerapkan kebijakan

perlakuan terhadap tagihan/penempatan antar bank menggunakan dua pola pengendalian yang berbeda, yaitu sebagian menggunakan pengendalian yang berfluktuasi dan sebagian lainnya berpedoman bahwa perkiraan ini perlu selalu ditingkatkan dari tahun ke tahun sesuai dengan perkembangan usaha.

5.7. Surat Berharga Berisiko Yang Dimiliki

Surat berharga berisiko yang dimiliki merupakan rekening surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, dan lain-lain dalam bentuk yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal serta mempunyai bobot risiko yang ditentukan oleh pihak berwenang (Bank Indonesia). Sebagaimana yang telah diuraikan dalam definisi operasional variabel (lihat sub bab 3.2.), maka perhitungan yang digunakan untuk mencari besarnya surat berharga berisiko yang dimiliki adalah mengalikan rekening-rekening surat berharga berisiko dengan bobot risiko masing-masing rekening. Sedangkan cara perhitungannya terlihat pada Lampiran 5.

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka perkembangan besarnya rekening surat berharga berisiko yang dimiliki oleh bank-bank go public yang diteliti selama periode 31 Desember 1990, 1991, 1992, serta 1993 terlihat pada Tabel 5.6..

TABEL 5.6.

**SURAT BERHARGA BERISIKO YANG DIMILIKI
BANK-BANK GO PUBLIC YANG DITELITI
PER 31 DESEMBER 1990, 1991, 1992, DAN 1993
(DALAM MILYAR RUPIAH)**

No.	Nama	Tahun			
		1990	1991	1992	1993
1.	Panin Bank	74,874.000.000	207,374.000.000	229,800.000.000	215,857.000.000
2.	Lippo Bank	584,237.311.000	540,543.133.000	624,053.726.000	784,932,654.000
3.	Bank Surya	16,305.581.000	62,061.501.000	68,755.604.000	37,759.063.000
4.	BII	27,501.500.000	96,789.217.985	139,531.644.831	1.605,020.251.476
5.	Bank Niaga	162,023.029.000	258,009.964.000	139,783.480.000	158,222.260.000
6.	Bank Danamon	13,069.286.192	180,041.779.184	519,208.988.139	610,129.168.735
7.	Bank Bali	475,924.984.977	292,756.691.501	488,965.231.001	430,468.444.392
8.	Tamara Bank	10,619.886.550	9,694.159.000	40,051.234.000	191,693.421.000
9.	BDMI	153,518.617.000	137,097.557.180	717,797.278.000	1.017,494.050.000
10.	Bank Duta	104,105.487.034	30,242.666.201	54,812.330.000	52,756.632.000
11.	Bank Umum Nasional	80,244.237.095	134,314.193.614	167,016.363.438	157,923.399.893

Sumber : Diolah dari Lampiran 5.

Dari Tabel 5.6. tersebut terlihat bahwa selama kurun waktu penelitian, sebagian besar bank-bank go public yang diteliti mempunyai perkiraan surat berharga berisiko yang berfluktuasi, sedangkan sebagian lainnya yaitu BII dan Bank Danamon menunjukkan kondisi yang selalu meningkat pada

setiap periode. Di samping itu terlihat pula bahwa Lippo Bank, Tamara Bank, BDNI dan Bank Duta menunjukkan penurunan pada tahun 1991, Bank Niaga pada tahun 1992, sedangkan yang menurun pada tahun 1993 adalah Panin Bank, Bank Surya, dan Bank Duta.

5.8. Kredit Berisiko Yang Diberikan

Kredit berisiko yang diberikan merupakan rekening penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dan mempunyai bobot risiko yang ditentukan oleh pihak berwenang (Bank Indonesia). Sebagaimana yang telah diuraikan dalam definisi operasional variabel (lihat sub bab 3.2.), maka perhitungan yang digunakan untuk mencari besarnya kredit berisiko yang diberikan adalah mengalikan rekening-rekening kredit berisiko yang diberikan dengan bobot risiko masing-masing rekening. Sedangkan cara perhitungan variabel ini terlihat pada Lampiran 6.

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka perkembangan kredit berisiko yang diberikan oleh bank-bank go public yang diteliti selama periode 31 Desember 1990, 1991, 1992, serta 1993 terlihat pada Tabel 5.7..

Dari Tabel 5.7. tersebut terlihat bahwa terlihat bahwa pada selama kurun waktu penelitian, bank-bank go public yang diteliti hampir semuanya menunjukkan adanya penyaluran kredit

yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hanya pada Bank Duta saja yang menunjukkan tingkat penurunan pada dua tahun terakhir secara berturut-turut, sedangkan pada Panin Bank dan Bank Bali menunjukkan penurunan pada periode 1992 namun meningkat kembali pada periode 1993.

TABEL 5.7.

KREDIT BERISIKO YANG DIBERIKAN OLEH
BANK-BANK GO PUBLIC YANG DITELITI
PER 31 DESEMBER 1990, 1991, 1992, DAN 1993
(DALAM MILYAR RUPIAH)

No.	Nama	Tahun			
		1990	1991	1992	1993
1.	Panin Bank	1.021,797.000.000	1.250,771.000.000	986,445.000.000	1.548,411.000.000
2.	Lippo Bank	1.667,746.454.000	1.844,578.340.000	2.210.495.395.200	3.426,293.740.200
3.	Bank Surya	341,274.182.500	403,672.040.500	443,164.078.500	495,445.074.000
4.	BII	2.237,705.048.780	3.046,061.417.693	3.676,260.053.893	4.664,388.858.136
5.	Bank Niaga	2.411,457.069.000	2.448,146.163.000	2.594,031.490.000	2.914,396.036.000
6.	Bank Danamon	2.116,139.149.810	2.970,225.084.764	3.605,214.479.904	5.715,179.908.913
7.	Bank Bali	1.941,432.764.784	2.113,362.830.731	2.013,387.724.577	2.851,793.611.136
8.	Tamara Bank	334,244.045.803	442,347.070.010	448,970.120.000	758,634.681.000
9.	BDNI	1.975,641.210.000	2.766,947.251.417	3.141,395.112.162	4.320,006.344.000
10.	Bank Duta	1.691,558.786.813	1.947,368.635.334	1.723,868.713.000	1.410,539.443.000
11.	Bank Umum Nasional	2.093.751.026.379	2.111,089.932.834	2.190,352.993.138	2.643,834.137.061

Sumber : Diolah dari Lampiran 6.

Kondisi tersebut mencerminkan bahwa bank-bank go public yang diteliti cenderung berupaya untuk senantiasa melakukan ekspansi kreditnya dalam rangka memperbesar skala usahanya. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar karena kredit merupakan produk utama bank, sehingga peningkatan ekspansi kredit merupakan salah satu tolok ukur besar kecilnya bank.

5.9. Rekening Administratif Berisiko

Rekening administratif berisiko merupakan rekening transaksi yang belum mengubah posisi aktiva dan passiva bank pada tanggal laporan tetapi harus dilaksanakan oleh bank apabila persyaratan yang disepakati dengan nasabah terpenuhi, dan mempunyai bobot risiko yang ditentukan pihak berwenang. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam definisi operasional variabel (lihat sub bab 3.2.), maka perhitungan yang digunakan untuk mencari besarnya rekening administratif berisiko adalah mengalikan rekening-rekening nominal transaksi administratif berisiko dengan bobot risiko masing-masing rekening. Sedangkan cara perhitungannya terlihat pada Lampiran 7 sampai dengan Lampiran 17.

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka perkembangan rekening administratif berisiko bank-bank go public yang diteliti selama periode 31 Desember 1990, 1991, 1992, serta 1993 terlihat pada Tabel 5.8..

TABEL 5.8.

REKENING ADMINISTRATIF BERISIKO YANG DIMILIKI
BANK-BANK GO PUBLIC YANG DITELITI
PER 31 DESEMBER 1990, 1991, 1992, DAN 1993
(DALAM MILYAR RUPIAH)

No.	Nama	Tahun			
		1990	1991	1992	1993
1.	Panin Bank	587,307.752.000	301,865.680.000	465,075.940.000	357,130.000.000
2.	Lippo Bank	360,998.916.340	535,565.919.480	421,289.413.960	663,922.095.660
3.	Bank Surya	5,254.752.000	23,153.472.780	32,152.804.600	39,863.626.700
4.	BII	301.262.884.880	549,821.251.397	1.057,301.720.170	1.817,895.773.385
5.	Bank Niaga	676,467.967.780	743,722.414.780	870,823.700.980	1.224,592.999.180
6.	Bank Danaeon	509,294.541.000	316,213.000.000	971.262.500.000	2.116,008.140.000
7.	Bank Bali	276,919.919.460	576,360.760.659	492,337.316.156	561,514.842.358
8.	Tanara Bank	64,615.560.000	44,803.490.660	119,297.970.336	245,292.733.900
9.	BDNI	322,286.326.900	386,428.400.920	500,979.470.591	507,252.741.620
10.	Bank Duta	734,346.820.330	698,026.380.000	967,888.955.640	542,047.600.000
11.	Bank Umum Nasional	230,090.826.477	811,977.560.000	590,681.600.000	858,825.400.000

Sumber : Diolah dari Lampiran 7 sampai dengan Lampiran 17.

Dari Tabel 5.8. tersebut terlihat bahwa pada selama kurun waktu penelitian, sebagian besar dari bank-bank go public yang diteliti mempunyai tingkat rekening administratif berisiko yang berfluktuasi. Hanya terdapat empat bank yang

menunjukkan tingkat rekening administratif berisiko selalu meningkat pada setiap periode, yaitu Bank Surya, BII, Bank Niaga dan BDNI.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bank-bank go public yang diteliti menerapkan kebijakan perlakuan terhadap rekening administratif berisiko dengan menggunakan dua pola pengendalian yang berbeda yang berbeda, yaitu sebagian berpedoman bahwa perkiraan ini perlu senantiasa ditingkatkan pada setiap periode dan sebagian besar lainnya menggunakan pengendalian yang berfluktuasi. Perbedaan ini merupakan suatu hal yang wajar, karena setiap bank mempunyai cara yang spesifik dalam menerapkan kebijakan portfolio atas aktiva produktifnya.

BAB VI

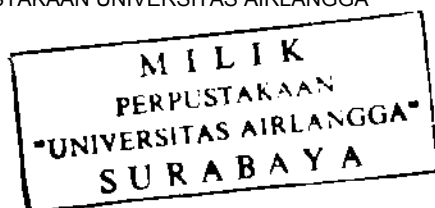
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

6.1. Pembuktian Hipotesis

Sesuai dengan perumusan masalah dan hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya, model yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah Analisis Regresi Linear Berganda dengan memanfaatkan penggabungan data (data pooling) dari 11 (sebelas) bank go public selama 4 tahun, yaitu tahun 1990, 1991, 1992, dan 1993.

Jumlah kasus yang seharusnya adalah 44 kasus, tetapi 3 kasus diantaranya yaitu Panin Bank pada tahun 1990, Lippo Bank pada tahun 1992, dan Tamara Bank pada tahun 1993 tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. Ada dua alasan yang menyebabkan tidak dimasukkannya ke tiga kasus tersebut dalam perhitungan, yaitu :

1. Terdapat sebuah kasus yang tidak memuat variabel rekening administratif secara terperinci dalam laporan keuangannya, yakni Panin Bank pada tahun 1990. Dalam laporan keuangan Panin Bank per 31 Desember 1990 hanya tercantum jumlah total rekening administratif, padahal rekening administratif terdiri atas beberapa sub unsur yang masing-masing mempunyai bobot risiko yang berbeda. Hal ini mengakibatkan dalam menghitung rekening administratif berisiko digunakan



bobot risiko tertinggi (100%) dan meskipun penggunaan tersebut sesuai dengan prinsip prudential, namun dalam kasus ini tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Terdapat dua kasus yang dalam laporan keuangan akhir tahunnya tidak mempunyai agio saham yaitu Lippo Bank pada tahun 1992 dan Tamara Bank pada tahun 1993. Hal ini menyebabkan variabel agio saham dari ke dua kasus tersebut tidak mempunyai nilai.

Dengan demikian maka jumlah kasus yang di analisis dalam penelitian ini adalah sebanyak 41 kasus, dari 44 kasus yang ada.

Dari hasil hasil perhitungan yang telah dilakukan dengan menggunakan komputer melalui paket program microstat diperoleh hasil sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 6. 1. Berdasarkan Tabel 6.1. dapat dibuat persamaan model regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = 10,7524 + 0,0383 X_1 + 0,0328 X_2 + 0,0425 X_3 - 0,0127 X_4 - 0,0020 X_5 - 0,0044 X_6 + 0,0014 X_7.$$

Hasil regresi ini menunjukkan arah pengaruh beberapa faktor terhadap CAR. Modal disetor (X_1), agio saham (X_2), laba ditahan (X_3), serta rekening administratif berisiko (X_7) mempunyai pengaruh yang positif, sedangkan tagihan/penempatan berisiko pada bank lain (X_4), surat berharga berisiko yang dimiliki (X_5), dan kredit berisiko yang diberikan mempunyai pengaruh negatif terhadap CAR (Y). Hal ini ditunjukkan oleh

TABEL 6.1.

REKAPITULASI HASIL REGRESI LINEAR BERGANDA
BERDASARKAN DATA POOLING ANTARA CROSS SECTION DAN TIME SERIES
ATAS VARIABEL-VARIABEL PENELITIAN

Vari- abel Bebas	Koefi- sien Regresi	Standard Error	T-test	Proba- bility	r ² Parsial	Kesimpu lan *)
X ₁	0,0383	0,0046	8,240	0,00000	0,6730	SS
X ₂	0,0328	0,0060	5,474	0,00000	0,4759	SS
X ₃	0,0425	0,0160	2,655	0,01212	0,1760	S
X ₄	-0,0127	0,0052	-2,433	0,02058	0,1520	S
X ₅	-0,0020	0,0011	-1,824	0,07716	0,0916	TS
X ₆	-0,0044	5.46771E-04	-8,010	0,00000	0,6604	SS
X ₇	0,0014	0,0010	1,413	0,16703	0,0570	TS
Konstanta = 10,7254 R ² = 0,7737 F _{Ratio} = 16,120 Multiple R = 0,8796 Probability = 5.275E-09 n = 41						

Sumber : Diolah dari Lampiran 30.

Keterangan : SS = sangat signifikan.

S = signifikan.

TS = tidak signifikan.

koefisien regresi masing-masing variabel bebas (b_1 , b_2 , b_3 dan b_7 yang bertanda positif serta b_4 , b_5 dan b_6 yang bertanda negatif).

Untuk membuktikan Hipotesis I, langkah yang harus dilakukan adalah melakukan pengujian varians dengan uji F. Dari hasil uji F (lihat Tabel 6.1.) diketahui bahwa $F_{rasio} = 16,120$ lebih besar dari $F_{tabel} = 3,30$ pada taraf nyata $\alpha = 0,01$ atau $p < 0,01$. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama variasi variabel-variabel bebas mempunyai pengaruh yang sangat bermakna (sangat signifikan) terhadap variasi variabel tidak bebasnya. Selanjutnya untuk mengukur besarnya sumbangan dari variabel bebas dalam menerangkan variabel tidak bebasnya dapat dilihat dari besarnya koefisien determinasi (R^2). Berdasarkan Tabel 6.1. terlihat bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,7737. Hal ini menunjukkan bahwa variabilitas faktor-faktor modal disetor (X_1), agio saham (X_2), laba ditahan (X_3), tagihan/penempatan berisiko pada bank lain (X_4), surat berharga berisiko yang dimiliki (X_5), kredit berisiko yang diberikan (X_6), dan rekening administratif berisiko (X_7) mampu menjelaskan variabilitas CAR bank-bank go public sebesar 77,37% sedangkan 22,63% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

Dengan melihat hasil uji F yang menunjukkan variasi variabel-variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang sangat bermakna (sangat signifikan) terhadap

variasi variabel tidak bebasnya, serta nilai koefisien determinasi (R^2) yang cukup tinggi (77,37%) berarti Hipotesis I yang menyatakan : "Diduga bahwa variabel-variabel modal disetor, agio saham, laba ditahan, tagihan/penempatan berisiko pada bank lain, surat berharga berisiko yang dimiliki, kredit berisiko yang diberikan, dan rekening administratif berisiko secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang sangat bermakna terhadap CAR bank-bank go public di Indonesia", diterima.

Untuk membuktikan Hipotesis II, langkah awal yang harus dilakukan adalah melihat tingkat signifikansi (kemaknaan) koefisien korelasi parsial (r) dari masing-masing variabel bebas melalui uji t. Selanjutnya perlu dicari nilai koefisien determinasi parsial (r^2) untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara sendiri-sendiri terhadap variabel tidak bebas.

Berdasarkan hasil dari uji t (lihat Tabel 6.1.) diketahui bahwa :

1. $t_{hitung} X_1 = 8,240$ lebih besar dari $t_{tabel} = 2,704$ pada taraf nyata $\alpha = 0,01$ atau $p < 0,01$. Hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel modal disetor secara parsial mempunyai pengaruh yang sangat bermakna (sangat signifikan) terhadap variasi CAR bank-bank go public di Indonesia.
2. $t_{hitung} X_2 = 5,470$ lebih besar dari $t_{tabel} = 2,704$ pada taraf nyata $\alpha = 0,01$ atau $p < 0,01$. Hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel agio saham secara parsial mempunyai

pengaruh yang sangat bermakna (sangat signifikan) terhadap variasi CAR bank-bank go public di Indonesia.

3. $t_{hitung} X_3 = 2,655$ lebih besar dari $t_{tabel} = 2,021$ pada taraf nyata $\alpha = 0,05$ atau $p < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel laba ditahan secara parsial mempunyai pengaruh yang bermakna (signifikan) terhadap variasi CAR bank-bank go publik di Indonesia.
4. $t_{hitung} X_4 = -2,433$ lebih besar dari $t_{tabel} = -2,021$ pada taraf nyata $\alpha = 0,05$ atau $p < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel tagihan/penempatan berisiko pada bank lain secara parsial mempunyai pengaruh yang bermakna (signifikan) terhadap variasi CAR bank-bank go public di Indonesia.
5. $t_{hitung} X_5 = -1,824$ lebih kecil dari $t_{tabel} = -2,021$ pada taraf nyata $\alpha = 0,05$ atau $p > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel surat berharga berisiko yang dimiliki secara parsial mempunyai pengaruh tidak bermakna (tidak signifikan) terhadap variasi CAR bank-bank go public di Indonesia.
6. $t_{hitung} X_6 = -8,010$ lebih besar dari $t_{tabel} = -2,704$ pada taraf nyata $\alpha = 0,01$ atau $p < 0,01$. Hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel kredit berisiko yang diberikan secara parsial mempunyai pengaruh yang sangat bermakna (sangat signifikan) terhadap variasi CAR bank-bank go public di Indonesia.

7. $t_{hitung} X_7 = 1,413$ lebih kecil dari $t_{tabel} = 2,021$ pada taraf nyata $\alpha = 0,05$ atau $p > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel rekening administratif berisiko secara parsial mempunyai pengaruh yang tidak bermakna (tidak signifikan) terhadap variasi CAR bank-bank go public di Indonesia.

Dari Tabel 6.1. memperlihatkan pula bahwa nilai koefisien determinasi parsial (r^2) yang tertinggi adalah $r^2 X_1 = 0,6730$, kemudian berikutnya diikuti $r^2 X_6$, $r^2 X_2$, $r^2 X_3$, $r^2 X_4$, dan $r^2 X_7$ dengan nilai masing-masing 0,6804; 0,4750; 0,1760; 0,1520; serta 0,0570. Nilai $r^2 X_1$ tersebut menunjukkan bahwa variabel modal disetor (X_1) mempunyai pengaruh yang dominan terhadap CAR bank-bank go public di Indonesia.

Dengan melihat hasil uji t yang menunjukkan tingkat kemaknaan pengaruh yang sangat signifikan antara variasi modal disetor terhadap variasi CAR bank-bank go public di Indonesia, serta koefisien determinasi parsial (r^2) dari variabel modal disetor menunjukkan nilai yang tertinggi dibandingkan dengan r^2 variabel-variabel bebas lainnya, berarti Hipotesis II yang menyatakan : "Diantara variabel-variabel bebas yang diteliti, diduga agio saham mempunyai pengaruh yang dominan terhadap CAR bank-bank go public di Indonesia", ditolak.

6.2. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, tampak bahwa hasil uji F menunjukkan $F_{rasio} = 16,120$ lebih besar dari $F_{tabel} = 3,30$ pada taraf nyata $\alpha = 0,01$ atau $p < 0,01$. Hal ini berarti secara bersama variasi variabel-variabel bebas mempunyai pengaruh yang sangat bermakna (sangat signifikan) terhadap variasi variabel tidak bebasnya. Keadaan ini menunjukkan bahwa penggabungan variabel-variabel modal disetor, agio saham, laba ditahan, tagihan/penempatan berisiko pada bank lain, surat berharga berisiko yang dimiliki, kredit berisiko yang diberikan, dan rekening administratif berisiko sangat relevan apabila dipergunakan sebagai estimasi dari variasi CAR bank-bank go public.

Apabila dilihat pengaruh dari masing-masing variabel secara parsial maka terlihat bahwa modal disetor, agio saham, dan kredit berisiko yang diberikan mempunyai pengaruh yang sangat bermakna ($p < 0,01$); laba ditahan dan tagihan/penempatan berisiko pada bank lain mempunyai pengaruh yang bermakna ($p < 0,05$); serta surat berharga berisiko yang dimiliki dan rekening administratif berisiko tidak mempunyai pengaruh yang bermakna ($p > 0,05$) terhadap CAR bank-bank go public.

Dari ke tujuh variabel tersebut meskipun ada tiga variabel yang mempunyai pengaruh yang sangat bermakna, ternyata modal disetor merupakan variabel yang dominan pengaruhnya terhadap CAR bank-bank go public di Indonesia.

Semula diduga bahwa variabel agio saham akan mempunyai pengaruh yang dominan terhadap variasi CAR, karena bank-bank yang go public dalam melaksanakan penawaran umum atas sahamnya biasanya menetapkan harga penawaran jauh di atas nilai nominalnya. Dengan kondisi yang demikian, secara teoritis seharusnya bank akan memperoleh agio saham yang nilainya jauh lebih besar dibandingkan dengan modal disetor sehingga akan menyebabkan variabel agio saham lebih dominan terhadap variasi CAR, dibandingkan dengan variabel modal disetor.

Namun hasil analisis membuktikan bahwa variabel modal disetorlah yang dominan pengaruhnya terhadap CAR. Hal ini terjadi karena selama periode penelitian ditemukan fakta bahwa ternyata saham baru yang di jual oleh bank-bank yang go public pada umumnya hanya merupakan bagian yang masih relatif kecil dibandingkan dengan seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Dengan kondisi demikian meskipun sudah banyak kasus yang menunjukkan agio saham lebih tinggi dibandingkan dengan modal disetor, namun masih cukup banyak pula kasus yang memperlihatkan kondisi yang sebaliknya.

Di samping itu masih ada beberapa faktor penyebab modal disetor berpengaruh dominan terhadap CAR bank-bank go public, yang ditemukan setelah dilakukan analisis data. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah :

1. Terjadinya penyeteroran modal baru akibat adanya penggabungan usaha (merger).

Dengan adanya penggabungan usaha (merger), maka bank akan

melakukan penilaian atas asset dan kewajiban-kewajiban dari bank yang di merger. Selisih antara asset dan kewajiban tersebut akan masuk sebagai penyeteroran modal baru akibat adanya penggabungan usaha (merger), sehingga hal ini secara otomatis akan menambah besarnya modal disetor.

2. Terjadinya peristiwa pembagian saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham.

Pembagian saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio, berarti sebagian atau seluruh agio saham yang dimiliki suatu bank go public dikapitalisir menjadi sejumlah saham kemudian dibagikan kepada para pemegang saham lama menurut persetujuan yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini akan membawa akibat terjadinya penurunan jumlah agio saham atau dapat pula menghabiskan agio saham yang dimiliki, namun penurunan atau habisnya agio saham tersebut akan beralih menjadi saham baru yang berarti secara langsung menambah jumlah modal disetor. Dengan demikian meskipun kejadian ini tidak akan mengubah jumlah modal sendiri tetapi akan mengubah struktur modal sendiri bagi bank go public yang bersangkutan, yakni modal disetor bank meningkat, sedangkan agio saham akan dapat habis atau paling tidak menurun.

3. Terjadinya pembagian dividen saham (stock dividend) dari laba yang ditahan.

Adanya pembagian ini berarti pihak bank melakukan

pembayaran dividen bukan dalam bentuk uang kas yang disisihkan dari laba ditahan, akan tetapi diwujudkan menjadi tambahan saham baru yang diberikan kepada para pemegang saham. Seperti dalam kapitalisasi agio saham, pembagian dividen saham ini juga tidak akan mengubah modal sendiri namun akan secara otomatis akan mengubah struktur modal sendiri dari bank yang bersangkutan, yaitu bertambahnya modal disetor akibat adanya tambahan saham baru serta berkurangnya jumlah laba ditahan yang dikapitalisir ke dalam saham baru tersebut.

Peningkatan jumlah modal disetor mungkin juga dapat terjadi jika bank yang telah go public melakukan transaksi penarikan kembali atas sebagian atau seluruh saham yang sudah beredar. Jika hal ini dilakukan dan nilai penarikan kembali tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai perolehan dari penjualan saham semula, maka bank akan mendapat keuntungan dari nilai penarikan. Keuntungan ini akan masuk sebagai perkiraan tambahan modal dari perolehan kembali saham, dan jika tambahan modal ini dikapitalisir maka akan menambah jumlah modal disetor.

Variabel agio saham dalam penelitian ini, meskipun tidak dominan akan tetapi sangat berpengaruh terhadap variasi CAR ($p < 0,01$). Kondisi ini menunjukkan bahwa dengan cara go public, bank telah berhasil mendapatkan dana murah dalam rangka meningkatkan modal yang berasal dari unsur agio saham. Tampak di sini bahwa dengan keadaan masih relatif kecilnya

proporsi saham baru yang terjual serta telah banyak jumlah agio saham yang sudah dikapitalisir menjadi modal disetor, ternyata agio saham masih menunjukkan berpengaruh yang sangat bermakna terhadap CAR. Hal ini berarti peningkatan proporsi penjualan saham baru saham baru masih layak dilakukan oleh bank-bank yang telah go public, baik untuk meningkatkan CAR bagi mereka yang belum memenuhi standar CAR yang telah ditentukan maupun untuk pengendalian CAR secara umum.

Variabel laba ditahan dalam penelitian ini, mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap CAR ($p < 0,05$). Kondisi ini menunjukkan bahwa bank-bank go public yang diteliti juga berpedoman pada kemampuan usaha menghasilkan keuntungan dan menyisihkan sebagian keuntungan tersebut dalam bentuk laba ditahan untuk meningkatkan CAR. Perlu ditekankan bahwa keuntungan yang diperoleh oleh suatu bank di samping sebagian disisihkan sebagai laba ditahan, sebagian yang lain dibayarkan sebagai dividen kepada para pemegang saham. Berhubung di sini terdapat dua kepentingan dimana satu sisi pihak pemegang saham mengharapkan dividen yang tinggi dan pada sisi lain manajemen bank menghendaki laba ditahan yang cukup, maka pihak manajemen harus dapat menjaga secara seimbang atas ke dua kepentingan tersebut demi kepentingan jangka panjang. Dalam masalah ini kebijakan yang sebaiknya diambil manajemen bank adalah minimal menetapkan tingkat prosentase kenaikan pembayaran dividen sedikit lebih kecil proporsinya dibandingkan dengan prosentase kenaikan laba ditahan. Adapun maksud

dari kebijakan tersebut di samping bank dapat menyisihkan laba untuk meningkatkan modalnya, dalam jangka panjang dapat lebih memberikan kepastian pembayaran dividen yang tidak menurun dibandingkan dengan periode sebelumnya jika suatu saat laba menurun karena kelesuan iklim usaha.

Variabel tagihan/penempatan berisiko pada bank lain, dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap CAR ($p < 0,05$). Kondisi ini menunjukkan bahwa bank-bank go public yang diteliti pada umumnya meletakkan posisi "penempatan dana antar bank" sebagai salah satu alternatif produk bank yang cukup penting dalam penggunaan dananya, meskipun penempatan ini menghasilkan laba yang lebih kecil jika dibandingkan dengan hasil bunga yang diperoleh dari penyaluran kredit. Hal tersebut mungkin terjadi karena bank memandang bahwa sesuai dengan prinsip "prudential banking", tingkat risiko atas penempatan ini cukup rendah sehingga sesuai jika digunakan sebagai alternatif dalam kebijakan ekspansi pinjaman yang konservatif. Selain itu penempatan pada bank lain sangat penting peranannya dalam kegiatan transaksi antar bank akibat terjadinya transaksi pengiriman uang, lalu lintas giro, leter of credit, clearing, dan lain sebagainya.

Variabel surat berharga berisiko yang dimiliki, dalam penelitian ini tidak punya pengaruh yang bermakna terhadap CAR ($p > 0,05$). Hal ini terjadi karena perdagangan surat-surat berharga bukan merupakan usaha pokok bank. Di samping

itu mungkin pihak manajemen bank memandang bahwa pemilikan surat berharga (portfolio surat-surat berharga) mempunyai tingkat risiko yang cukup tinggi, baik risiko terhadap penurunan nilai pasar atas saham maupun risiko kerugian atas wesel dan obligasi. Mungkin ke dua alasan inilah yang menyebabkan bank-bank go public tidak terlalu memprioritaskan usahanya pada sektor perdagangan surat berharga berisiko.

Variabel kredit berisiko yang diberikan, dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang sangat bermakna terhadap CAR ($p < 0,01$). Kondisi ini menunjukkan bahwa bank-bank go public yang diteliti menempatkan penyaluran kredit sebagai prioritas utama dalam kegiatan operasi usahanya. Hal ini adalah wajar karena penyaluran kredit merupakan produk utama bank yang diharapkan dapat menjadi andalan dalam memperoleh pendapatan. Dari sumber pendapatan ini, diharapkan bank dapat menutup seluruh pengeluaran operasional dan non operasionalnya, membayar pajak, membagikan dividen kepada para pemegang saham, serta menyisihkannya untuk penambahan modal.

Di samping itu berdasarkan pengamatan ternyata penyaluran kredit merupakan proporsi yang tertinggi dari seluruh total asset bank. Dari laporan keuangan bank-bank go public yang ada menunjukkan bahwa dari total asset masing-masing bank, kredit yang diberikan ternyata menduduki proporsi yang sangat besar.

Variabel rekening administratif berisiko, dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap CAR ($p > 0,05$). Kondisi ini dapat terjadi mungkin karena pihak pengelola bank melakukan pembatasan-pembatasan yang sangat ketat terhadap transaksi ini. Kemungkinan tersebut beralasan karena sebagai bank-bank devisa yang go public dengan skala operasi yang relatif besar, apabila mereka melakukan transaksi administratif secara tidak terkendali akan membawa dampak yang merugikan baik terhadap bank yang bersangkutan maupun terhadap masyarakat perbankan secara keseluruhan.

Di samping kemungkinan di atas, kemungkinan lain yang perlu dipertimbangkan sebagai penyebab tidak berpengaruhnya rekening administratif berisiko terhadap CAR adalah sifat dari transaksi administratif itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab 3.1., transaksi ini belum mengubah posisi aktiva dan pasiva neraca bank pada periode tertentu. Oleh karena itu seandainya ada pengelola bank yang lalai, sengaja tidak melaporkan, atau membuat laporan posisi transaksi administratif berisiko yang dikecilkan dari kondisi yang sebenarnya maka pihak pengawas maupun akuntan publik akan sulit untuk mendeteksi/melacaknya karena belum ada bukti pembukuan. Adanya kesulitan mendeteksi ini karena keberadaan yang sebenarnya dari angka-angka rekening administratif berisiko hanya diketahui oleh orang dalam bank atau lebih spesifiknya pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan transaksi tersebut. Seandainya hal ini terjadi maka keadaan

variabel rekening administratif tidak berpengaruh terhadap CAR kemungkinan tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya.

Selanjutnya bila dilihat dari besarnya koefisien determinasi (R^2) dari model yang digunakan, tampak pada hasil analisis bahwa R^2 memperlihatkan angka yang cukup tinggi yaitu 0,7737 atau 77,37 %. Cukup tingginya koefisien determinasi ini menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas yang digunakan dalam model merupakan bagian terbesar dari faktor-faktor penting yang mempengaruhi CAR. Hal ini mencerminkan keadaan yang cukup proporsional mengingat di satu sisi modal disetor, agio saham dan laba ditahan merupakan bagian terbesar dari keseluruhan modal bank yang dapat digunakan sebagai pengendali CAR secara aktif. Sedangkan tagihan/penempatan berisiko pada bank lain, surat berharga berisiko yang dimiliki, kredit berisiko yang diberikan, dan rekening administratif berisiko merupakan bagian terbesar dari keseluruhan aktiva bank yang dapat digunakan sebagai pengendali CAR secara pasif.

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa variabel-variabel bebas yang diteliti cukup baik untuk digunakan sebagai pengendali CAR bank-bank go public di Indonesia. Oleh karena modal disetor yang merupakan variabel dominan dari penelitian ini merupakan unsur modal bank maka dalam mengendalikan besarnya CAR, pengendalian aktif akan lebih baik dibandingkan dengan pengendalian secara pasif. Hal ini berarti untuk meningkatkan CAR akan lebih baik

dilakukan dengan menambah modal dari pada dilakukan dengan cara mengurangi aktiva berisiko. Dengan cara ini maka peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan yang mungkin diperoleh diharapkan tidak akan terbuang. Selanjutnya untuk mengendalikan CAR secara aktif bagi bank-bank go public, menambah emisi saham dapat digunakan sebagai salah satu cara yang layak.

6.3. Prospek Bank-Bank Go Public

Sebagaimana diketahui bahwa industri perbankan merupakan salah satu sektor usaha yang menjanjikan harapan jangka panjang cukup cerah, karena keberadaannya selalu dibutuhkan oleh berbagai pihak baik pemerintah, lembaga swasta, perorangan, maupun sektor-sektor usaha yang lain. Namun pada sisi lain, sektor ini merupakan sektor usaha yang penuh dengan risiko yang senantiasa diwarnai dengan tekanan-tekanan akibat semakin ketatnya persaingan serta kondisi perekonomian yang berfluktuasi dan semakin kompleks.

Deregulasi perbankan yang telah dilakukan pemerintah sejak 1 Juni 1983 dan kemudian diperkuat dengan kebijakan 28 Oktober 1988 serta kebijakan-kebijakan pendukung yang dikeluarkan pada periode-periode berikutnya, mengakibatkan perubahan yang sangat mendasar dan berarti terhadap industri perbankan di Indonesia. Perubahan tersebut mengarah pada adanya kesempatan yang sama bagi semua bank untuk berkembang

dan bersaing secara sehat menuju era globalisasi, berdasarkan batasan-batasan tertentu yang mengarah pada prinsip "prudential banking" dalam melakukan kegiatan usahanya. Hal ini mengakibatkan semakin tajamnya persaingan antar bank.

Menghadapi kondisi tersebut di atas, manajemen bank harus berorientasi pasar, mengutamakan prinsip efisiensi dan profesionalisme dengan jalan mengupayakan keseimbangan antara kebebasan dan kehati-hatian. Dengan demikian berarti manajemen bank dituntut untuk melakukan langkah-langkah konsolidasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kelancaran usahanya sehingga tingkat kesehatan bank dapat selalu terpelihara.

Hingga periode tahun 1993/94, perbankan di Indonesia masih dihadapkan pada suasana konsolidasi meskipun sudah tidak seberat tahun-tahun sebelumnya. Konsolidasi tersebut masih tetap dilakukan dalam rangka menerapkan prinsip "prudential banking". Hal ini mengingat selama dua tahun sebelumnya (1991 dan 1992) akibat kebijakan uang ketat, kalangan perbankan menghadapi cobaan yang cukup berat. Karena kebijakan tersebut pertumbuhan keuangan perbankan tahun 1992 menurun.

Langkah-langkah konsolidasi yang dilaksanakan kalangan perbankan, diupayakan melalui pembenahan manajemen dengan berbagai aspek penanganan yang dilakukan secara terpadu, seperti peningkatan kualitas aktiva, peningkatan efisiensi jaringan kantor, pemenuhan kebutuhan modal sesuai dengan

TABEL 6.2.
TOTAL PERTUMBUHAN KEUANGAN
PERBANKAN DI INDONESIA
1990 - 1993

Nama	Jumlah Total (Milyar Rupiah)					Pertumbuhan (%)			
	1989	1990	1991	1992	1993	1990	1991	1992	1993
Asset	113.901.775	165.775.732	188.153.276	211.356.555	270.866.019	45,5	13,5	12,3	28,2
Dana Masyarakat	47.569.081	65.522.470	109.370.924	123.114.376	234.008.543	37,7	66,9	12,6	90,1
Kredit	73.958.365	91.650.917	134.586.722	144.491.261	179.285.641	23,9	46,8	7,4	24,1
Laba	1.343.490	1.943.609	1.906.165	1.729.456	3.357.635	44,7	-1,9	-9,3	94,1

Sumber : Sua Sembada, No. 01/X-April/1994.

kebutuhan bank, dan lain sebagainya. Ternyata langkah konsolidasi tersebut menampakkan hasil yang cukup melegakan. Hal ini tampak dari pertumbuhan keuangan perbankan yang meningkat kembali pada tahun 1993, sebagaimana terlihat pada Tabel 6.2.

Berdasarkan pertumbuhan tersebut, Sujatmaka dan Deni Riaddi (1994 : 31) memprediksi bahwa dalam menghadapi perkembangan perbankan pada tahun-tahun yang akan datang nampaknya para pengelola bank masih akan sibuk melakukan konsolidasi. Pelaksanaan konsolidasi tersebut untuk bank-bank

kelompok skala usaha kecil akan lebih mudah, sedangkan semakin besar skala usaha bank akan semakin rumit. Hal ini adalah wajar karena semakin besar skala usaha bank, maka akan bertambah kompleks pula masalah serta tantangan yang dihadapi.

Sebagai salah satu bagian dari perbankan secara keseluruhan, bank-bank go public di Indonesia juga tidak lepas dari semakin kompleksnya tantangan dan masalah yang harus dihadapi. Mengingat sebagian besar dari bank-bank go public yang diteliti merupakan kelompok bank yang berskala menengah dan besar dengan asset mulai dari di atas satu trilyun rupiah hingga delapan trilyun rupiah lebih, berarti semakin bertambah kompleks pula masalah dan tantangan yang harus dihadapi pada masa yang akan datang.

Selanjutnya salah satu cara untuk memprediksi prospek bank-bank go public, dapat dilakukan dengan menyajikan keunggulan komparatif bank-bank go public atas perbankan secara keseluruhan dalam rangka menghadapi masalah dan tantangan yang ada. Dalam hal ini pihak-pihak yang mempunyai keunggulan komparatif yang lebih baik akan lebih mampu dalam menghadapi risiko ketidakpastian, artinya mereka tidak akan menganggap risiko sebagai masalah tetapi akan mampu merubahnya menjadi suatu peluang.

6.3.1. Risiko Usaha

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa industri perbankan merupakan sektor usaha yang di samping cukup memberikan harapan, di sisi lain juga merupakan sektor usaha yang penuh dengan risiko. Risiko yang mungkin timbul dalam bidang usaha perbankan antara lain :

1. Risiko makro ekonomi.

Situasi dan kondisi perekonomian secara menyeluruh sangat terhadap jalannya usaha perbankan. Keadaan ekonomi yang memburuk seperti tingginya tingkat inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah akan berdampak terhadap usaha perbankan, seperti turunnya dana pihak ke tiga, makin rendahnya tingkat pengembalian kredit, serta semakin sempitnya kesempatan pemberian kredit.

Karena risiko ini bersumber dari luar dan tidak bisa dicegah, maka tindakan yang dapat dilakukan oleh bank adalah memantau secara berkala dan mengantisipasi melalui serangkaian kebijakan usaha yang dapat mengurangi dampak dari risiko yang timbul.

2. Risiko operasional.

Risiko operasional dapat terjadi karena tidak efisiennya perangkat operasional bank (sistem, prosedur, pengawasan, jaringan kerja, dan personil), sehingga menyebabkan terjadinya pemborosan yang mengakibatkan biaya tinggi, serta hilangnya peluang yang seharusnya dapat diperoleh.

Untuk menghadapi risiko ini, yang dapat dilakukan oleh bank adalah secara kontinyu melakukan evaluasi atas sistem pengendalian intern serta mengembangkan ketrampilan personilnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan.

3. Risiko likuiditas.

Risiko likuiditas dapat timbul akibat dari keadaan dimana bank tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Jika risiko ini terjadi maka kepercayaan nasabah akan berkurang, sehingga dapat merusak kinerjanya.

Dalam menghadapi risiko ini, yang dapat dilakukan adalah pengelola bank harus dapat memprediksi secara tepat kapan dan berapa jumlah dana yang akan ditarik oleh nasabah debitur maupun para penabung.

4. Risiko kredit.

Risiko kredit merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman serta bunganya sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Untuk meminimalisir risiko ini, yang dapat dilakukan oleh bank adalah melakukan analisis secara cermat dengan berpegang prinsip prudential atas setiap permohonan kredit.

5. Risiko persaingan.

Risiko ini dapat terjadi karena dengan peningkatan jumlah bank yang pesat, persaingan dalam memperebutkan pangsa pasar menjadi sangat ketat.

Untuk risiko ini, alternatif yang dapat dilakukan oleh

bank antara lain : memperbaiki mutu pelayanan, menawarkan produk dengan variasi menarik, meningkatkan efisiensi, atau memusatkan diri pada beberapa segmen tertentu yang dapat dilayani dengan baik.

6. Risiko kurs valuta asing.

Pergerakan kurs atas valuta asing dapat terjadi setiap saat. Fluktuasi ini biasanya dimanfaatkan oleh bank devisa dengan motif keuntungan yang tinggi, sehingga jika kurs berubah dengan arah yang berlawanan dari yang diinginkan maka akan menimbulkan risiko kerugian yang cukup besar.

Tindakan yang dapat dilakukan oleh bank dalam mencegah risiko ini adalah selalu menjaga posisi devisa netto sesuai yang ditetapkan Bank Indonesia. Di samping itu hendaknya kegiatan devisa bank hanya dilakukan dalam rangka transaksi komersial.

7. Risiko kecukupan modal.

Dalam ketentuan tentang CAR setiap pelepasan kredit Rp 1,- (satu rupiah) bank akan membutuhkan tambahan modal sebesar Rp 0,08 (delapan per seratus rupiah). Demikian pula untuk setiap peningkatan aktiva produktif lainnya, juga perlu tambahan modal sesuai dengan bobot risiko aktiva produktif yang ditingkatkan. Oleh karena itu jika bank melakukan ekspansi tanpa didukung oleh modal yang cukup, maka akan menghadapi risiko ini.

Tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh bank untuk mencegah risiko ini adalah mengendalikan CAR secara aktif, artinya

secara kontinyu berusaha meningkatkan faktor modal untuk setiap peningkatan aktiva produktif.

8. Risiko penyelewengan.

Risiko penyelewengan adalah kerugian yang mungkin terjadi akibat ketidak jujuran, penipuan, atau perilaku yang kurang baik dari pejabat, karyawan atau nasabah bank.

Tindakan yang sebaiknya dilakukan untuk menghadapi risiko ini adalah mencegah dan menangkal penyelewengan internal dengan sistem pengawasan yang memadai serta meningkatkan moral pejabat dan karyawan bank. Untuk mengurangi risiko penyelewengan nasabah dapat dilakukan dengan on-line system, program pelatihan peningkatan kualitas karyawan, serta menangkal kolaborasi antara nasabah dengan karyawan.

9. Risiko teknologi.

Dengan semakin ketatnya persaingan antar bank maka penggunaan teknologi canggih akan memegang peranan yang semakin penting. Dengan teknologi yang tidak tepat, akan menimbulkan terjadi risiko hilangnya kesempatan, manipulasi, kerugian investasi, dan sebagainya.

Tindakan yang sebaiknya dilakukan untuk memperkecil risiko ini adalah hendaknya bank menempatkan aspek pengembangan teknologi sebagai salah satu prioritas. Selanjutnya dalam setiap implementasi pembaharuan teknologi seharusnya dipercayakan kepada pihak yang betul-betul profesional dan berpengalaman dalam bidangnya.

6.3.2. Keunggulan Komparatif

Keunggulan komparatif bank merupakan nilai lebih yang dimiliki oleh suatu atau sekelompok bank dalam aspek-aspek tertentu sehingga memungkinkan mereka lebih unggul dalam dalam memperoleh peluang serta lebih unggul dalam menghadapi risiko usaha, dibandingkan dengan bank/kelompok bank yang lain maupun perbankan secara keseluruhan. Keunggulan komparatif yang dimiliki bank-bank go public dapat diketahui dari manfaat yang diperoleh dari go publicnya bank itu sendiri.

Apabila bank telah memutuskan untuk mengemisikan sahamnya, berarti di dalam bank tersebut telah terjadi perubahan yang amat fundamental. Status bank akan berubah dari perseroan tertutup menjadi terbuka dan mempunyai status baru yaitu bank public. Dengan status ini, dapat membawa manfaat bagi bank, antara lain :

1. Memudahkan bank dalam pemenuhan modal secara cepat dan murah.

Terdaftarinya bank di bursa efek lebih membuka kemungkinan memperbesar modalnya secara cepat dibandingkan bank-bank yang tidak mengemisikan sahamnya. Hal ini dimungkinkan karena apabila prospek usaha semakin bagus, maka penambahan saham baru yang diperlukan untuk pemenuhan modal akan lebih mudah diemisikan. Dengan modal yang besar berarti menguatkan fondasi bank-bank go public, sehingga daya tahan terhadap fluktuasi ekonomi (risiko makro

ekonomi), risiko likuiditas, dan risiko kecukupan modal akan jauh lebih mantap.

2. Menyehatkan manajemen bank akibat adanya prinsip "full disclosure" yang harus diterapkan.

Dengan go public, pengawasan bank akan menjadi bertambah ketat. Apabila sebelumnya bank hanya diawasi oleh pemegang saham lama dan Bank Indonesia, maka setelah go public pengawasan menjadi tersebar kepada masyarakat pemegang saham, calon investor, Bapepam, dan para pengamat, di samping pemegang saham lama dan Bank Indonesia. Dengan semakin banyaknya pihak yang mengawasi bank, tentu manajemen akan lebih ekstra hati-hati dan lebih profesional dalam menjalankan usahanya.

Selain itu dengan keharusan menerapkan prinsip "full disclosure" bagi bank go public, maka jika terjadi kesalahan maupun penyimpangan akan cepat terdeteksi sehingga dapat segera dilakukan tindakan perbaikan.

Dengan semakin sehatnya manajemen bank, maka akan meningkatkan daya tahan terhadap risiko-risiko yang dihadapi terutama risiko operasional, risiko persaingan, dan risiko penyelewengan.

3. Meningkatkan daya saing.

Hal ini dimungkinkan karena dengan adanya sumber dana yang relatif sangat murah, maka akan sangat membantu bank dalam menekan tingkat suku bunga kreditnya. Dengan kemampuan untuk menetapkan tingkat bunga yang lebih rendah dari

tingkat bunga kredit perbankan, maka memungkinkan bank-bank go public untuk memiliki keunggulan daya saing yang lebih baik.

4. Sebagai wahana promosi secara tidak langsung.

Bank yang melakukan penawaran umum, pasti mengeluarkan prospektus yang antara lain berisi keterangan tentang perseroan serta kegiatan dan prospek usahanya. Dalam proses selanjutnya, pihak-pihak yang berkepentingan serta para pengamat akan melakukan penilaian. Dengan demikian tingkat prestasi bank tersebut akan selalu diamati, sehingga hal ini secara tidak langsung menjadi wahana promosi bagi bank yang bersangkutan. Jika prestasi baik maka akan cepat terpublikasikan sehingga meningkatkan kepercayaan nasabah dan para investor.

5. Mengangkat citra bank di mata internasional.

Dengan menuju ke arah era globalisasi, maka tuntutan pengelolaan secara profesional dan pengawasan yang memadai atas bank-bank go public akan membawa citra yang lebih baik di mata internasional dibandingkan dengan bank-bank yang belum go public. Hal ini akan memudahkan bank dalam meningkatkan posisi devisa nettonya, yang secara otomatis dapat memperoleh dana murah luar negeri lebih banyak.

Di samping itu dengan terbukanya kesempatan yang lebih besar bagi investor asing untuk menanamkan dananya saat ini dibandingkan masa sebelumnya, maka meningkatnya citra bank go public diharapkan dapat menyerap peluang tersebut.

TABEL 6.3.
TOTAL PERTUMBUHAN KEUANGAN
BANK-BANK GO PUBLIC YANG DITELITI
(1990 - 1993)

Nama	Jumlah Total (Milyar Rupiah)					Pertumbuhan (%)			
	1989	1990	1991	1992	1993	1990	1991	1992	1993
Asset	15.609,550	24.265,500	28.693,755	34.626,921	46.082,064	55.45	18.24	20.67	33.08
Dana Masyarakat	9.567,528	16.665,956	21.116,754	24.587,999	32.676,828	74.19	26.70	16.43	32.89
Kredit	9.725,486	17.824,953	21.331,853	23.033,585	30.748,923	83.28	19.67	7.98	33.49
Laba	143,745	271,493	322,379	378,994	470,333	88.87	18.74	17.56	24.10

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Bank-Bank Go Public yang diteliti.

Dengan keunggulan komparatif yang dimiliki, maka bank-bank go public akan lebih mudah dalam menghadapi risiko-risiko di atas.

Selanjutnya untuk kepentingan analisis secara diskriptif dalam memprediksi prospek masa depan bank-bank go publik, dapat dilakukan dengan cara membandingkan total pertumbuhan keuangan perbankan dengan total pertumbuhan keuangan bank-bank go public yang diteliti. Dari Tabel 6.2 dan Tabel 6.3 memperlihatkan bahwa dalam kurun waktu periode 1990 sampai dengan 1993 terjadi kondisi sebagai berikut :

1. Tingkat pertumbuhan asset bank-bank go public lebih tinggi dibandingkan tingkat pertumbuhan asset perbankan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemungkinan untuk menjadi bank yang besar, bank-bank go public mempunyai prospek yang lebih baik dibandingkan dengan bank-bank yang belum go public. Hal ini adalah wajar karena dengan dana murah yang mudah diperoleh dan tuntutan pengelolaan yang profesional, mereka akan lebih cepat memanfaatkan setiap peluang dan kesempatan yang ada.

TABEL 6.4.

PERBANDINGAN PANGSA KREDIT
BANK PEMERINTAH DAN BANK SWASTA NASIONAL
1989 - 1993

KELOMPOK BANK	TAHUN				
	1989	1990	1991	1992	1993
Bank Pemerintah	62,3 %	54,8 %	52,7 %	55,1 %	48,4 %
Bank Swasta Nasional	29,2 %	35,8 %	36,8 %	34,2 %	40,7 %

Sumber : Tempo, No. 14 Tahun XXIV - 4 Juni 1994.

2. Dalam hal pertumbuhan pengumpulan dana masyarakat, bank-bank go public menunjukkan tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan perbankan, kecuali tahun 1992.

Kondisi ini terjadi mungkin karena bank memandang bahwa pengumpulan dana lewat pasar modal jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan lewat pengumpulan dana masyarakat.

3. Tingkat pertumbuhan penyaluran kredit bank-bank go public lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat penyaluran kredit perbankan, kecuali tahun 1991.

Kondisi ini menunjukkan bahwa dengan dana murah yang diperoleh, bank-bank go public lebih siap memperluas pemasaran kredit selaku produk utama bank dibandingkan dengan bank-bank yang belum go public.

4. Pada tahun 1991 dan 1992 yang merupakan tahun-tahun sulit bagi perbankan akibat kebijakan uang ketat yang dikeluarkan pemerintah, bank-bank go public tetap menunjukkan tingkat pertumbuhan laba yang positif sedangkan perbankan menunjukkan pertumbuhan laba yang negatif atau penurunan jumlah laba yang diperoleh.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan bank-bank go public dalam menghadapi masa-masa sulit akibat kondisi eksternal, lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan bank-bank yang belum go public. Selanjutnya tingkat pertumbuhan laba yang lebih rendah dibandingkan tingkat pertumbuhan laba perbankan pada tahun 1993, mungkin karena bank lebih

memprioritaskan tingkat kontinuitas usaha dibandingkan dengan prioritas laba yang terlalu tinggi.

Dari sisi yang lain, dengan melihat pangsa kredit kelompok bank swasta nasional yang semakin meningkat dari tahun ke tahun (lihat Tabel 6.4.) maka bank-bank go public sebagai bagian dari kelompok bank swasta nasional diperkirakan akan dapat merebut tingkat pangsa kredit yang lebih tinggi. Hal ini dimungkinkan karena tingkat keunggulan komparatif yang dimiliki lebih baik dibandingkan dengan bank-bank swasta nasional yang belum go public.

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa dengan keunggulan komparatif yang dimiliki, bank-bank go public diperkirakan akan mempunyai prospek masa depan yang lebih cerah dibandingkan dengan bank-bank yang belum go public.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan analisis yang telah diuraikan, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan beberapa hal pokok sebagai berikut :

1. Modal disetor, agio saham, laba ditahan, tagihan/ penempatan berisiko pada bank lain, surat berharga berisiko yang dimiliki, kredit berisiko yang diberikan, dan rekening administratif berisiko secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang sangat bermakna terhadap CAR bank-bank go public di Indonesia. Hal ini diketahui dari hasil uji F yang menunjukkan $F_{rasio} = 16,120$ lebih besar dari $F_{tabel} = 3,30$ pada taraf nyata $\alpha = 0,01$ atau $p < 0,01$, serta nilai koefisien determinasi berganda (R^2) yang cukup tinggi (0,77,37). Dengan demikian Hipotesis I diterima.
2. Diantara variabel-variabel bebas yang diteliti, ternyata modal disetor mempunyai pengaruh yang dominan terhadap CAR bank-bank go public di Indonesia. Hal ini diketahui dari hasil uji t yang menunjukkan $t_{hitung} = 8,240$ lebih besar dari $t_{tabel} = 2,704$ pada taraf nyata $\alpha = 0,01$ atau $p < 0,01$, serta nilai koefisien determinasi parsial (r^2) yang

paling tinggi (0,6730) dari variabel modal disetor. Dengan demikian Hipotesis II ditolak.

3. Modal disetor mempunyai pengaruh yang dominan dan sangat bermakna terhadap bank-bank go public di Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena selama periode penelitian ditemukan fakta sebagai berikut :
 - a. Saham baru yang dijual hanya merupakan proporsi yang relatif kecil dari saham yang ditempatkan dan disetor penuh.
 - b. Terjadi penambahan modal baru akibat adanya penggabungan usaha (merger).
 - c. Adanya pembagian saham bonus dari kapitalisasi agio saham.
 - d. Terjadinya pembagian dividen saham dari laba yang ditahan.
4. Agio saham mempunyai pengaruh yang sangat bermakna terhadap CAR bank-bank go public di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa dengan cara go public, bank telah berhasil mendapatkan dana murah yang berasal dari unsur agio saham untuk meningkatkan modalnya.
5. Laba ditahan mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap CAR bank-bank go public di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa bank-bank go public juga berpedoman pada kemampuan usaha menghasilkan keuntungan dan menyisihkannya sebagian untuk memperkuat modalnya.

6. Tagihan/penempatan berisiko pada bank lain mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap CAR bank-bank go public di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa bank-bank go public meletakkan posisi "penempatan dana antar bank" sebagai salah satu alternatif produk bank yang cukup penting. Hal tersebut adalah wajar karena "penempatan dana antar bank" dalam aktivitas transaksi antar bank akibat terjadinya pengiriman uang, lalu lintas giro, clearing, dan lain-lain.
7. Surat berharga berisiko yang dimiliki tidak mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap CAR bank-bank go public di Indonesia. Hal ini terjadi karena perdagangan surat berharga bukan merupakan produk utama bank. Di samping itu mungkin bank memandang bahwa perdagangan surat berharga mempunyai tingkat risiko tinggi, sehingga produk ini tidak diprioritaskan.
8. Kredit berisiko yang diberikan mempunyai pengaruh yang sangat bermakna terhadap CAR bank-bank go public di Indonesia. Hal ini adalah wajar karena penyaluran kredit merupakan usaha pokok bank dan menjadi andalan utama dalam memperoleh pendapatan.
9. Rekening administratif berisiko tidak mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap CAR bank-bank go public di Indonesia. Hal ini dapat terjadi mungkin karena bank melakukan pembatasan yang sangat ketat terhadap transaksi administratif. Kemungkinan yang lain adalah jumlah

rekening administratif berisiko yang ada belum menunjukkan kondisi yang sebenarnya.

10. Secara umum, langkah go public merupakan salah satu cara yang efektif bagi bank untuk mendapatkan dana murah dalam memperkuat modalnya.
11. Bank-bank yang telah go public mempunyai keunggulan komparatif yang lebih dibandingkan dengan bank-bank yang belum go public. Keunggulan tersebut dapat dilihat dari manfaat yang didapat akibat dari go public itu sendiri, yaitu : memudahkan bank dalam pemenuhan modal, menyehatkan manajemen bank, meningkatkan daya saing, sebagai wahana promosi, serta meningkatkan citra bank di mata internasional.
12. Dengan keunggulan komparatif yang dimiliki, maka bank-bank go public akan lebih mampu dalam menghadapi tantangan-tantangan yang timbul serta lebih cepat dalam memanfaatkan setiap peluang dan kesempatan yang ada. Dengan demikian diperkirakan bank-bank go public akan mempunyai prospek masa depan yang lebih cerah.

7.2. Saran

1. Sehubungan dengan masih relatif kecilnya proporsi penjualan saham baru atas seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh, maka hendaknya bank-bank go public memperbesar jumlah saham yang di jual sampai batas yang

- masih dapat dikendalikan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan CAR bagi bank-bank yang belum memenuhi ketentuan CAR serta untuk pengendalian CAR pada umumnya.
2. Dalam mengendalikan besarnya CAR, hendaknya diupayakan seoptimal mungkin untuk melakukan pengendalian aktif sedangkan pengendalian pasif hendaknya hanya dilakukan dalam kondisi yang benar-benar mendesak. Hal ini dimaksudkan agar peluang-peluang yang mungkin diperoleh tidak akan terbangung.
 3. Berkaitan dengan rekening administratif berisiko yang tidak berpengaruh terhadap CAR, sebaiknya dilakukan peninjauan kembali atas kebijakan yang telah diterapkan terhadap transaksi rekening tersebut. Jika rekening yang ada sudah memaparkan kondisi yang sebenarnya, hendaknya pembatasan yang dilakukan terhadap transaksi ini diperlonggar sampai batas yang masih diperbolehkan oleh Bank Indonesia. Sebaliknya jika rekening yang ada tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya, sebaiknya bank secepatnya menyadari atas kekeliruan ini dalam rangka menghindari kemungkinan masalah yang lebih besar pada masa mendatang.
 4. Sehubungan dengan keluarnya PP No. 20 tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, hendaknya bank dapat melakukan antisipasi secara cermat sehingga dapat menyerap peluang ini seoptimal mungkin. Adanya tuntutan pengelolaan

usaha yang lebih profesional dari masyarakat internasional hendaknya dijadikan sebagai pemacu untuk lebih meningkatkan citra bank-bank go public.

5. Untuk menjaga citra bank-bank go public khususnya dan perusahaan public pada umumnya, maka praktek kolaborasi antara perseroan dengan akuntan publik serta pelanggaran-pelanggaran yang lain seharusnya dihindari.
6. Untuk penanggulangan masalah penyimpangan dan pelanggaran tersebut di atas, pihak berwenang dalam hal ini Bank Indonesia dan Bapepam hendaknya lebih meningkatkan fungsinya. Jika pelanggaran atau penyimpangan terjadi, hendaknya dilakukan tindakan yang tegas terhadap semua pihak yang terlibat tanpa pandang bulu.
7. Berkaitan dengan masalah risiko makro ekonomi yang harus dihadapi oleh setiap kegiatan usaha, diharapkan pemerintah dapat mempertahankan stabilitas ekonomi dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi sehingga tidak akan membawa akibat buruk bagi pengembangan usaha dalam jangka panjang.
8. Untuk memperoleh hasil yang lebih baik, kiranya masih diperlukan lebih lanjut setelah penelitian ini. Kepada mereka yang berminat mengadakan penelitian dalam bidang yang sama, sebaiknya memasukkan variabel-variabel lain yang belum dijangkau dalam penelitian ini seperti penyertaan, aktiva tetap, dan sebagainya. Di samping itu penelitian dalam masalah yang sama dengan obyek penelitian kelompok bank yang berbeda seperti : bank-bank swasta

nasional yang tidak go public, bank-bank pemerintah, bank-bank devisa, bank-bank non devisa, bank-bank asing, BPR, dan sebagainya akan dapat memberikan gambaran yang lebih jauh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi CAR perbankan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Nasution, 1991, Tinjauan Ekonomi Atas Dampak Paket Deregulasi Tahun 1988 Pada Sistem Keuangan Indonesia, Cetakan Kedua, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Aspinwall, Richard C. and Robert A. Eisenbis, 1985, Hand Book for Bank in Strategy, John Wiley & Sons, New York.
- Bank Indonesia, 1988, Himpunan Pertaturan Perundang-Undangan Paket Kbiaksanaan Keuangan. Moneter Dan Perbankan 27 Oktober 1988.
- _____, 1989, Himpunan Ketentuan Lanjutan Pakto 27. 1988 Tanggal 25 Maret 1989.
- _____, 1990, Himpunan Ketentuan Lanjutan Pakto 27. 1988 Tentang Penyempurnaan Sistem Perkreditan 29 Januari 1990.
- _____, 1991, Himpunan Ketentuan Lanjutan Pakto. 27 1988 Tentang Penyempurnaan Pengawasan Dan Pembinaan Bank Tanggal 28 Februari 1991.
- _____, 1993, Himpunan Ketentuan Perbankan Yang Disempurnakan Tanggal 29 Mei 1993.
- _____, Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI).
- Centre For Strategic And International Studies (CSIS), 1990, Dokumentasi Kliping Tentang Go Public 1989, Nomor 205/E/V/1990.
- Crosse, Howard D., 1983, Manajemen Bank Dagang, Terjemahan, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Dahlan Siamat, 1993, Manajemen Bank Umum, Cetakan Pertama, Intermedia, Jakarta.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, BAPEPAM, 1987, Himpunan Peraturan Pasar Modal, Jakarta.
- Djoko Mursinto, 1990, Penentuan Model Dalam Penelitian, Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya.
- Draper, Norman, & Harry, Smith, 1992, Analisis Regresi Terapan, Edisi Kedua, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Edyanus Herman Halim, 1993, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Saham Di Bursa Efek Jakarta, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

- Gudjarati, Damodar, 1991, Ekonometrika Dasar, Terjemahan, Cetakan Kedua, Erlangga, Jakarta, 1991.
- Hamzah Haz dan Umar Bazalim, 1993, Kebijakan Fiskal Dan Moneter, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Hartojo Wignjowijoto, 1993, Kesehatan Manajemen Bank Di Indonesia, Swa Sembada, No. 11/VIII, Februari 1993, Yayasan Sembada Swakarya, Jakarta.
- Havrilesky, Thomas M., & John T., Boorman, 1976, Current Perspectives In Banking Operation, Management, And Regulation, AHM Publishing Corporation, Arlington Heights, Illinois.
- Hempel, George H., 1976, Bank Capital, Determining And Meeting Your Bank's Capital Needs, Bankers Publishing Company, Boston.
- Heru Sutojo, 1989, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perusahaan Go public Dan Harga Saham, Manajemen & Usahawan Indonesia, No. 11, Tahun XVIII, Lembaga Management FE-UI, Jakarta.
- Howard, Donald S., 1980, Evolving Concepts Of Bank Capital Management, First Edition, Citicorp, New York.
- Ida Bagus Made Santika, 1991, Pengaruh Fungsi Manajemen Pembelian Pada Harga Saham Perusahaan Yang Masuk Pasar Modal di Beberapa Negara Asean, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 1992, Standart Khusus Akuntansi Perbankan Indonesia (SKAPI).
- Jopie Jusuf, 1992, Panduan Dasar Untuk Account Officer, Cetakan Pertama, Intermedia, Jakarta.
- Jonker Sihombing, 1990, Pengantar Funds Management Untuk Perbankan, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Jakarta, 1990.
- Kamerschen, David R., 1988, Money And Banking, 9th Edition, South-Western Publishing Co., Cincinnati, Ohio.
- Maisel, Sherman J., 1981, Risk And Capital Adequacy in Commercial Banks, The University of Chicago Press, Chicago.
- Marzuki, 1977, Metodologi Riset, BPFE UII, Yogyakarta.
- Moh. Nazir, 1988, Metode Penelitian, Cetakan Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Morrison, Donald F., 1981, Multivariate Stastitical Methods, Second Edition, McGraw-Hill Inc.
- Muchdarsyah Sinungan, 1993, Manajemen Dana Bank, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mudradjad Kuntoro, 1994, Deregulasi Perbankan di Indonesia : Tinjauan dan Implikasinya Bagi PJP II, Prisma, No. 2 Tahun 1994, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Muhamad Djumhana, 1993, Hukum Perbankan Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nick Pranata Hasyim, 1993, "Sektor Perbankan Bertahan Pada Peringkat Pertama", Buletin Info Finansial, Nomor 32/IV, 2 Juni 1993, LKBN Antara, Jakarta.
- N. Lapoliwa, Daniel S. Kuswadi, 1991, Akuntansi Perbankan Akuntansi Transaksi Bank Dalam Valuta Rupiah, Jilid 1, Cetakan Kedua, LPPI, Jakarta.
- _____, 1994, Akuntansi Perbankan Akuntansi Transaksi Bank dalam Valuta Asing, Jilid 2, Edisi Revisi, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- O.P. Simorangkir, Kamus Perbankan, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ratna Dewiyanti, 1992, Retail Banking Sebagai Pilihan Segmen Pasar Pada Bank NSIP, Pengembangan Perbankan, No. 36, Juli - Agustus 1992, LPPI, Jakarta.
- Rijanto, 1993, Masalah Pemenuhan CAR, Buletin Info Finansial, Nomor 23/IV, 31 Maret 1993, LKBN Antara, Jakarta.
- _____, 1993, Kondisi Perbankan 1993, Republika, PT. Abdi Bangsa, Jakarta.
- Ryback, William, 1988, Capital Adequacy, Seacen Lectures 1988, Bank Indonesia, Jakarta.
- Sam A. Waelan, 1981, Bank & Wiraswasta, Edisi Ketiga, Bank & Wiraswasta, Jakarta.
- Sinar Grafika, 1992, Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan, Jakarta.
- Sinkey Jr., Joseph F., A Multivariate Statistical Analysis of The Characteristics of Problem.Banks, The Journal of Finance, Vol. XXX, No. 1, March 1975, USA.

- Sjahrir, 1986, Deregulasi Perbankan Menuju Pengurangan Distorsi Dalam Ekonomi ?, Prisma, NO. 6, Juni, 1986, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Sjahrir, dkk., 1990, Mobilisasi Dana Dalam Era Deregulasi, Cetakan Kedua, Yayasan Padi dan Kapas, Jakarta.
- Sjahrizal, 1989, Pasar Modal Sebagai Sumber Pembiayaan Dunia Usaha, Ikatan Akuntansi Indonesia Cabang Jawa Timur dan Perserikatan Perdagangan Uang Dan Efek-Efek, Surabaya.
- Sudiyono Reksoprayitno, 1992, Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen Bank Umum Penerapannya Di Indonesia, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Sudjana, 1991, Teknik Analisis Regresi Dan Korelasi Bagi Para Peneliti, Edisi kedua, Tarsito, Bandung.
- Sujatmaka, Deni Riaddi, 1994, Tahun Kebangkitan Bank, Swa Sembada, No. 01/X-April/1994, Yayasan Sembada Swakarya, Jakarta.
- Teguh Pudjo Muljono, 1992, Aplikasi Akuntansi Manajemen Dalam Praktek Perbankan, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, BPFE, Yogyakarta.
- _____, 1990, Analisis Laporan Keuangan Untuk Perbankan, Cetakan Ketiga, Djambatan, Jakarta.
- Thomas Suyatno, dkk., 1991, Kelembagaan perbankan, Cetakan Kelima, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Trenggono Purwosuprodjo, 1992, Deregulasi Dilihat Satu Persatu, Pengembangan Perbankan, No. 34, Maret - April 1992, LPPI, Jakarta.
- Tri Ratnawati, 1993, Model Peramalan Pertumbuhan Perbankan Berdasarkan Rasio Keuangan Pada Bank-Bank Go Public Di Indonesia, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- Walker, John R., 1992, Reporting Systems for Bank Management, First Edition, Banker Publishing Company Toppan Co., Ltd., Tokyo.
- Wijanarto, 1993, Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia, Cetakan Pertama, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Yayasan Mitra Dana, 1992, Peraturan Pasar Modal Edisi 1992.
- Zainul Arifin, 1992, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal Dan Pengaruh Struktur Modal Terhadap Biaya Modal Pada Bank Desa Di Karesidenan Bojonegoro, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

LAMPIRAN 1

**JUMLAH MODAL DISEKTOR
BANK-BANK GO PUBLIC YANG DITELITI
PER 31 DESEMBER 1990, 1991, 1992, DAN 1993
(DALAM MILYAR RUPIAH)**

NAMA BANK SAMPel PENELITIAN	JUMLAH			
	1990	1991	1992	1993
1. Panin Bank	23,613000000	48,144000000	240,722000000	240,722000000
2. Lippo Bank	47,610000000	47,610000000	142,830000000	190,440000000
3. Bank Surya	25,000000000	25,000000000	25,000000000	50,000000000
4. BII	140,000000000	203,000000000	263,585920000	263,585920000
5. Bank Niaga	48,261000000	52,524917000	57,777417000	57,777417000
6. Bank Danamon	112,189343243	112,189343243	112,189343243	424,189343243
7. Bank Bali	62,032000000	62,032000000	186,096000000	186,096000000
8. Tebaya bank	15,000000000	15,000000000	15,000000000	36,000000000
9. BONI	136,000000000	136,000000000	234,601949000	351,601949000
10. Bank Duta	140,596538000	140,596538000	140,596538000	140,596538000
11. Bank Umum Nasional	98,000000000	98,000000000	156,800069000	156,800069000

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan dan catatan atas Laporan Keuangan Bank-Bank Go Public yang diteliti.

LAMPIRAN 2

PERHITUNGAN AGIO SAHAM
 BANK-BANK GO PUBLIC YANG DITELITI
 PER 31 DESEMBER 1990, 1991, 1992, DAN 1993
 (DALAM NILYAR RUPIAH)

NAMA BANK	SAMPUL PENELITIAN			
	1990	1991	1992	1993
1. Panin Bank	61,82200000	209,00800000	16,43000000	16,43000000
2. Lippo Bank	97,05848900	97,05848900	95,22000000	0,00000000
3. Bank Surya	26,00000000	26,00000000	26,00000000	1,00000000
4. BII	120,00000000	106,00000000	106,398418623	106,398418623
5. Bank Niaga	58,33800300	58,33800300	79,39800300	79,39800300
6. Bank Danamon	132,00000000	132,00000000	132,00000000	20,00000000
7. Bank Bali	144,14852500	144,14852500	20,08452500	20,08452500
8. Tamara bank	21,00000000	21,00000000	21,00000000	0,00000000
9. BONI	82,50000000	82,50000000	0,889184000	176,339184000
10. Bank Duta	38,531352504	38,531352504	38,531352504	38,531352504
11. Bank Umum Nasional	64,00000000	64,00000000	5,199911000	5,199911000

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan dan catatan atas Laporan Keuangan Bank-Bank Go Public yang diteliti.

LAMPIRAN 31 (LANJUTAN)

OBSERVED	CALCULATED	RESIDUAL	STANDARDIZED RESIDUALS
5.800	6.423	-.6230	*
15.050	11.145	3.9049	
10.630	10.255	.3755	*
4.320	4.894	-.5739	*
9.100	9.763	-.6633	*
8.320	9.037	-.7174	*
11.330	10.913	.4169	
10.060	10.948	-.8882	*
7.760	10.092	-2.3322	*
7.270	7.455	-.1854	*
15.640	14.561	1.0791	*
5.800	6.170	-.3705	*
11.680	10.837	.8425	*
8.660	9.022	-.3615	*
5.070	5.545	-.4754	*
7.680	7.354	.3262	*
9.200	10.039	-.8395	*
9.690	10.458	-.7680	*
8.420	8.091	.3293	*
11.400	9.583	1.8173	*
6.760	8.499	-1.7391	*
15.750	15.442	.3077	*
11.050	10.689	.3606	*
8.210	9.476	-1.2656	*
6.140	6.412	-.2720	*
9.350	5.412	3.9381	
9.390	11.076	-1.6862	*
8.400	10.578	-2.1780	*
7.010	6.299	.7109	*
12.420	12.483	-.0625	*
7.710	8.888	-1.1781	*
13.020	12.281	.7392	*
8.820	7.143	1.6769	*
11.060	10.673	.3871	*
6.210	6.474	-.2636	*
5.200	5.549	-.3487	*
7.340	5.746	1.5940	*
8.030	8.945	-.9147	*
10.220	11.541	-1.3206	*
14.470	12.268	2.2021	*
6.560	7.541	-.9809	*

IN-WATSON TEST = 2.3302

LAMPIRAN 32

----- CORRELATION MATRIX -----

DATA FOR: B: BANK-2 LABEL: Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi CAR
 F CASES: 41 NUMBER OF VARIABLES: 8

Y	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7
1.00000							
.00088	1.00000						
-.05403	.00825	1.00000					
-.21787	.55111	.05591	1.00000				
.02451	.39574	.00563	.30543	1.00000			
-.29515	.52233	.28660	.65860	.21866	1.00000		
-.49427	.74213	.34314	.65750	.19358	.64170	1.00000	
-.42069	.58723	.08614	.64301	.27946	.49516	.80009	1.00000

VALUE (1-TAIL, .05) = + Or - .26073

VALUE (2-tail, .05) = +/- .30771

LAMPIRAN 33

LIST DATA RESIDUAL DAN VARIABEL-VARIABEL BEBAS

HEADER DATA FOR: C:SP-1 LABEL: LIST DATA VARIABEL BEBAS DAN RESIDU
 NUMBER OF CASES: 41 NUMBER OF VARIABLES: 8

	RESIDUAL	X1	X2	X3	X4	X5
1	-.6230	47.6100	97.0585	10.2928	141.4880	584.2373
2	3.9049	25.0000	26.0000	3.9489	2.9152	16.3056
3	.3755	140.0000	120.0000	5.3622	44.8570	27.5015
4	-.5739	48.2610	58.3380	14.1936	22.7293	162.0230
5	-.6633	112.1893	132.0000	13.0229	124.4349	13.0693
6	-.7174	62.0320	144.1485	20.6896	48.2935	475.9250
7	.4169	15.0000	21.0000	8.2626	2.6803	10.6199
8	-.8882	136.0000	82.5000	20.2995	4.2701	153.5187
9	-2.3322	140.5965	38.5314	2.4160	65.0907	104.1055
10	-.1854	98.0000	64.0000	15.0569	59.8978	80.2442
11	1.0791	48.1440	209.0080	33.8390	66.2306	207.3740
12	-.3705	47.6100	97.0585	25.9199	179.5317	540.5431
13	.8425	25.0000	26.0000	6.7179	9.7391	62.0615
14	-.3615	203.0000	106.0000	6.3301	37.5100	96.7892
15	-.4754	52.5249	58.3380	31.7070	22.7890	258.0100
16	.3262	112.1893	132.0000	29.3993	25.9332	180.0412
17	-.8395	62.0320	144.1485	55.4273	89.3779	292.7567
18	-.7680	15.0000	21.0000	11.0652	8.5096	9.6942
19	.3293	136.0000	82.5000	35.6293	17.5830	137.0976
20	1.8173	140.5965	38.5314	22.7889	92.6666	30.2427
21	-1.7391	98.0000	64.0000	31.9477	86.2121	134.3142
22	.3077	240.7220	16.4300	33.5335	185.3470	229.8000
23	.3606	25.0000	26.0000	10.1883	19.3777	68.7556
24	-1.2656	263.5859	106.3984	18.1912	58.8741	139.5316
25	-.2720	57.7774	79.3980	41.9697	41.8927	139.7835
26	3.9381	112.1893	132.0000	50.3009	51.2356	519.2090
27	-1.6862	186.0960	20.0845	63.9592	83.8229	488.9652
28	-2.1780	15.0000	21.0000	15.4626	15.2212	40.0512
29	.7109	234.6019	.8892	32.5328	27.2848	717.7973
30	-.0625	140.5965	38.5314	46.1697	46.4985	54.8123
31	-1.1781	156.8001	5.1999	45.8540	69.7038	167.0164
32	.7392	240.7220	16.4300	38.5480	235.7942	215.8570
33	1.6769	190.4400	95.2200	75.4075	124.6382	784.9327
34	.3871	50.0000	1.0000	14.5121	33.6824	37.7591
35	-.2636	263.5859	106.3984	89.6461	49.7853	1605.0203
36	-.3487	57.7774	79.3980	53.6686	76.0630	158.2223
37	1.5940	424.1893	20.0000	77.5864	155.8743	610.1292
38	-.9147	186.0960	20.0845	86.2964	54.3024	430.4684
39	-1.3206	351.6019	176.3392	58.0949	52.4725	1017.4941
40	2.2021	140.5965	38.5314	21.4724	40.5271	52.7566
41	-.9809	156.8001	5.1999	60.7585	101.3441	157.9234

LAMPIRAN 33 (LANJUTAN)

LIST DATA RESIDUAL DAN VARIABEL-VARIABEL BEBAS (LANJUTAN)

HEADER DATA FOR: C:SP-1 LABEL: LIST DATA VARIABEL BEBAS DAN RESID
 NUMBER OF CASES: 41 NUMBER OF VARIABLES: 8

	X6	X7
1	1667.7465	360.9989
2	341.2742	5.2548
3	2237.7050	301.2629
4	2411.4571	676.4680
5	2116.1392	509.2945
6	1941.4328	276.9199
7	334.2440	64.6156
8	1975.6412	322.2863
9	1691.5588	734.3468
10	2093.7510	230.0908
11	1250.7710	301.8657
12	1844.5783	535.5659
13	403.6720	23.1535
14	3046.0614	549.8213
15	2448.1462	743.7224
16	2970.2251	316.2130
17	2113.3628	576.3608
18	442.3471	44.8035
19	2766.9473	386.4284
20	1947.3686	698.0264
21	2111.0989	811.9776
22	986.4450	465.0759
23	443.1641	32.1528
24	3676.2601	1057.3017
25	2594.0315	870.8237
26	3605.2145	971.2625
27	2013.3877	492.3373
28	448.9701	119.2980
29	3141.3951	500.9795
30	1723.8687	967.8890
31	2190.3530	590.6816
32	1548.4110	257.1300
33	3426.2937	663.9221
34	495.4451	39.8636
35	4664.3889	1817.8958
36	2914.3960	1224.5930
37	5715.1799	2116.0081
38	2851.7936	561.5148
39	4320.0063	507.2527
40	1410.5394	542.0476
41	2643.8341	858.8254

LAMPIRAN 34

LIST DATA RANK VARIABLES

HEADER DATA FOR: C:SP-2 LABEL: -
 NUMBER OF CASES: 41 NUMBER OF VARIABLES: 6

	RANK RES	RANK X1	RANK X2	RANK X3	RANK X4	RANK X5
1	15.00	7.50	29.50	8.00	37.00	36.00
2	40.00	5.00	14.00	2.00	2.00	4.00
3	29.00	24.00	34.00	3.00	17.00	5.00
4	16.00	10.00	20.50	11.00	9.00	23.00
5	14.00	20.00	36.00	10.00	35.00	3.00
6	13.00	15.50	38.50	17.00	19.00	32.00
7	31.00	2.00	11.00	6.00	1.00	2.00
8	10.00	22.50	26.50	16.00	3.00	20.00
9	1.00	26.50	17.50	1.00	26.00	15.00
10	23.00	17.50	22.50	13.00	25.00	13.00
11	35.00	9.00	41.00	26.00	27.00	26.00
12	18.00	7.50	29.50	20.00	39.00	35.00
13	34.00	5.00	14.00	5.00	5.00	11.00
14	19.00	34.00	31.00	4.00	14.00	14.00
15	17.00	12.00	20.50	22.00	10.00	29.00
16	26.00	20.00	36.00	21.00	11.00	25.00
17	11.00	15.50	38.50	34.00	32.00	30.00
18	12.00	2.00	11.00	9.00	4.00	1.00
19	27.00	22.50	26.50	27.00	7.00	17.00
20	38.00	26.50	17.50	19.00	33.00	6.00
21	3.00	17.50	22.50	23.00	31.00	16.00
22	25.00	36.50	5.50	25.00	40.00	28.00
23	28.00	5.00	14.00	7.00	8.00	12.00
24	6.00	38.50	32.50	15.00	24.00	18.00
25	21.00	13.50	24.50	29.00	16.00	19.00
26	41.00	20.00	36.00	32.00	21.00	34.00
27	4.00	31.50	8.50	37.00	30.00	33.00
28	2.00	2.00	11.00	14.00	6.00	8.00
29	32.00	35.00	1.00	24.00	12.00	38.00
30	24.00	26.50	17.50	31.00	18.00	10.00
31	7.00	29.50	3.50	30.00	28.00	24.00
32	33.00	36.50	5.50	28.00	41.00	27.00
33	37.00	33.00	28.00	38.00	36.00	39.00
34	30.00	11.00	2.00	12.00	13.00	7.00
35	22.00	38.50	32.50	41.00	20.00	41.00
36	20.00	13.50	24.50	33.00	29.00	22.00
37	36.00	41.00	7.00	39.00	38.00	37.00
38	9.00	31.50	8.50	40.00	23.00	31.00
39	5.00	40.00	40.00	35.00	22.00	40.00
40	39.00	26.50	17.50	18.00	15.00	9.00
41	8.00	29.50	3.50	36.00	34.00	21.00

LAMPIRAN 34 (LANJUTAN)

LIST DATA RANK VARIABLES (LANJUTAN)

HEADER DATA FOR: C:SP-2 LABEL: -
 NUMBER OF CASES: 41 NUMBER OF VARIABLES: 8

	RANK X5	RANK X6
1	36.00	12.00
2	4.00	2.00
3	5.00	25.00
4	23.00	26.00
5	3.00	23.00
6	32.00	16.00
7	2.00	1.00
8	20.00	18.00
9	15.00	13.00
10	13.00	20.00
11	26.00	9.00
12	35.00	15.00
13	11.00	3.00
14	14.00	34.00
15	29.00	27.00
16	25.00	33.00
17	30.00	22.00
18	1.00	4.00
19	17.00	30.00
20	6.00	17.00
21	16.00	21.00
22	28.00	8.00
23	12.00	5.00
24	18.00	38.00
25	19.00	28.00
26	34.00	37.00
27	33.00	19.00
28	8.00	6.00
29	38.00	35.00
30	10.00	14.00
31	24.00	24.00
32	27.00	11.00
33	39.00	36.00
34	7.00	7.00
35	41.00	40.00
36	22.00	32.00
37	37.00	41.00
38	31.00	31.00
39	40.00	39.00
40	9.00	10.00
41	21.00	29.00

LAMPIRAN 35

----- CORRELATION MATRIX -----

HEADER DATA FOR: C:SP-2 LABEL: -
 NUMBER OF CASES: 41 NUMBER OF VARIABLES: 8

 KORELASI SPEARMAN

	RANK RES	RANK X1
RANK RES	1.00000	
RANK X1	-.04928	1.00000

CRITICAL VALUE (1-TAIL, .05) = + Or - .26073
 CRITICAL VALUE (2-tail, .05) = +/- .30771

N = 41

----- CORRELATION MATRIX -----

HEADER DATA FOR: C:SP-2 LABEL: -
 NUMBER OF CASES: 41 NUMBER OF VARIABLES: 8

 KORELASI SPEARMAN

	RANK RES	RANK X2
RANK RES	1.00000	
RANK X2	-.05775	1.00000

CRITICAL VALUE (1-TAIL, .05) = + Or - .26073
 CRITICAL VALUE (2-tail, .05) = +/- .30771

N = 41

LAMPIRAN 35 (LANJUTAN)

----- CORRELATION MATRIX -----

HEADER DATA FOR: C:SP-2 LABEL: -
 NUMBER OF CASES: 41 NUMBER OF VARIABLES: 8

KORELASI SPEARMAN

	RANK RES	RANK X3
RANK RES	1.00000	
RANK X3	-.04564	1.00000

CRITICAL VALUE (1-TAIL, .05) = + Or - .26073
 CRITICAL VALUE (2-tail, .05) = +/- .30771

N = 41

----- CORRELATION MATRIX -----

HEADER DATA FOR: C:SP-2 LABEL: -
 NUMBER OF CASES: 41 NUMBER OF VARIABLES: 8

KORELASI SPEARMAN

	RANK RES	RANK X4
RANK RES	1.00000	
RANK X4	-.10261	1.00000

CRITICAL VALUE (1-TAIL, .05) = + Or - .26073
 CRITICAL VALUE (2-tail, .05) = +/- .30771

N = 41

LAMPIRAN 35 (LANJUTAN)

CORRELATION MATRIX

HEADER DATA FILE: C:\MS12 LABEL: -
 NUMBER OF CASES: 41 NUMBER OF VARIABLES: 8

KORELASI SPEARMAN

	RANK RES	RANK X5
RANK RES	1.00000	
RANK X5	.08868	1.00000

CRITICAL VALUE (1-tail, .05) = + Or = .26073
 CRITICAL VALUE (2-tail, .05) = +/- .30771

n = 41

CORRELATION MATRIX

HEADER DATA FILE: C:\MS12 LABEL: -
 NUMBER OF CASES: 41 NUMBER OF VARIABLES: 8

KORELASI SPEARMAN

	RANK RES	RANK X6
RANK RES	1.00000	
RANK X6	-.10889	1.00000

CRITICAL VALUE (1-tail, .05) = + Or = .26073
 CRITICAL VALUE (2-tail, .05) = +/- .30771

n = 41

LAMPIRAN 35 (LANJUTAN)

CORRELATION MATRIX

HEADER DATA FOR: C:SP-2 LABEL: -
 NUMBER OF CASES: 41 NUMBER OF VARIABLES: 8

KORELASI SPEARMAN

	RANK RES	RANK X7
RANK RES	1.00000	
RANK X7	-.17596	1.00000

CRITICAL VALUE (1-tail, .05) = + Or - .26073
 CRITICAL VALUE (2-tail, .05) = +/- .30771

N = 41

LAMPIRAN 36

TABEL UJI STATISTIK
DURBIN WASTON

$\alpha = .05$

Number of Independent Variables k

n	1		2		3		4		5		6		7	
	DW _L	DW _U	DW _L	DW _U	DW _L	DW _U	DW _L	DW _U	DW _L	DW _U	DW _L	DW _U	DW _L	DW _U
15	1.08	1.36	0.95	1.54	0.82	1.75	0.69	1.97	0.56	2.21	0.55	2.22	0.45	2.47
16	1.10	1.37	0.98	1.54	0.86	1.73	0.74	1.93	0.62	2.15	0.62	2.16	0.50	2.39
17	1.13	1.38	1.02	1.54	0.90	1.71	0.78	1.90	0.67	2.10	0.66	2.10	0.55	2.32
18	1.16	1.39	1.05	1.53	0.93	1.69	0.82	1.87	0.71	2.06	0.71	2.06	0.60	2.26
19	1.18	1.40	1.08	1.53	0.97	1.68	0.86	1.85	0.75	2.02	0.75	2.02	0.65	2.21
20	1.20	1.41	1.10	1.54	1.00	1.68	0.90	1.83	0.79	1.99	0.79	1.99	0.69	2.16
21	1.22	1.42	1.13	1.54	1.03	1.67	0.93	1.81	0.83	1.96	0.83	1.96	0.73	2.12
22	1.24	1.43	1.15	1.54	1.05	1.66	0.96	1.80	0.86	1.94	0.86	1.94	0.77	2.09
23	1.26	1.44	1.17	1.54	1.08	1.66	0.99	1.79	0.90	1.92	0.90	1.92	0.80	2.06
24	1.27	1.45	1.19	1.55	1.10	1.66	1.01	1.78	0.93	1.90	0.93	1.90	0.84	2.04
25	1.29	1.45	1.21	1.55	1.12	1.66	1.04	1.77	0.95	1.89	0.95	1.89	0.87	2.01
26	1.30	1.46	1.22	1.55	1.14	1.65	1.06	1.76	0.98	1.88	0.98	1.87	0.89	1.99
27	1.32	1.47	1.24	1.56	1.16	1.65	1.08	1.76	1.01	1.86	1.00	1.86	0.93	1.97
28	1.33	1.48	1.26	1.56	1.18	1.65	1.10	1.75	1.03	1.85	1.03	1.85	0.95	1.96
29	1.34	1.46	1.27	1.56	1.20	1.65	1.12	1.74	1.05	1.84	1.05	1.84	0.98	1.94
30	1.35	1.49	1.28	1.57	1.21	1.65	1.14	1.74	1.07	1.83	1.07	1.83	1.00	1.93
31	1.36	1.50	1.30	1.57	1.23	1.65	1.16	1.74	1.09	1.83	1.09	1.83	1.02	1.92
32	1.37	1.50	1.31	1.57	1.24	1.65	1.18	1.73	1.11	1.82	1.11	1.82	1.04	1.91
33	1.38	1.51	1.32	1.58	1.26	1.65	1.19	1.73	1.13	1.81	1.13	1.81	1.06	1.90
34	1.39	1.51	1.33	1.58	1.27	1.65	1.21	1.73	1.15	1.81	1.14	1.81	1.08	1.89
35	1.40	1.52	1.34	1.58	1.28	1.65	1.22	1.73	1.16	1.80	1.16	1.80	1.10	1.88
36	1.41	1.52	1.35	1.59	1.29	1.65	1.24	1.73	1.18	1.80	1.18	1.80	1.11	1.88
37	1.42	1.53	1.36	1.59	1.31	1.66	1.25	1.72	1.19	1.80	1.19	1.80	1.13	1.87
38	1.43	1.54	1.37	1.59	1.32	1.66	1.26	1.72	1.21	1.79	1.20	1.79	1.15	1.86
39	1.43	1.54	1.38	1.60	1.33	1.66	1.27	1.72	1.22	1.79	1.22	1.79	1.16	1.86
40	1.44	1.54	1.39	1.60	1.34	1.66	1.29	1.72	1.23	1.79	1.23	1.79	1.18	1.85
45	1.48	1.57	1.43	1.62	1.38	1.67	1.34	1.72	1.29	1.78	1.29	1.78	1.24	1.84
50	1.50	1.59	1.46	1.63	1.42	1.67	1.38	1.72	1.34	1.77	1.34	1.77	1.29	1.82
56	1.53	1.60	1.49	1.64	1.45	1.68	1.41	1.72	1.38	1.77	1.37	1.77	1.33	1.81
60	1.55	1.62	1.51	1.65	1.48	1.69	1.44	1.73	1.41	1.77	1.41	1.77	1.37	1.81
65	1.57	1.63	1.54	1.66	1.50	1.70	1.47	1.73	1.44	1.77	1.44	1.77	1.40	1.81
70	1.58	1.64	1.55	1.67	1.52	1.70	1.49	1.74	1.46	1.77	1.46	1.77	1.43	1.80
75	1.60	1.65	1.57	1.68	1.54	1.71	1.51	1.74	1.49	1.77	1.49	1.77	1.46	1.80
80	1.61	1.66	1.59	1.69	1.56	1.72	1.53	1.74	1.51	1.77	1.51	1.77	1.48	1.80
85	1.62	1.67	1.60	1.70	1.57	1.72	1.55	1.75	1.52	1.77	1.53	1.77	1.50	1.80
90	1.63	1.68	1.61	1.70	1.58	1.73	1.57	1.75	1.54	1.78	1.54	1.78	1.52	1.80
95	1.64	1.69	1.62	1.71	1.60	1.73	1.58	1.75	1.56	1.78	1.56	1.78	1.54	1.80
100	1.65	1.69	1.63	1.72	1.61	1.74	1.59	1.76	1.57	1.78	1.57	1.78	1.55	1.80

Source: J. Durbin and G. S. Watson "Testing for Serial Correlation in Least Squares Regression II," *Biometrika*, 1951, vol. 38, pp. 173, 175. Reproduced by permission of the Biometrika Trustees. Values for $k = 6$ and $k = 7$ taken from M. E. Savin and K. J. White, "The Durbin-Watson Test for Serial Correlation with Extreme Sample Sizes or Many Regressors," *Econometrica*, 45 (1977): 1989-1996. With permission from The Econometric Society.

LAMPIRAN 36
 RASIO ANTARA JUMLAH SAHAM YANG DIEMISIKAN
 DENGAN JUMLAH SAHAM YANG DITEMPATKAN DAN DISETOR PEMU
 PERIODE 1990 - 1993

NAMA BANK	1990			1991			1992			1993		
	SAHAM DITE- PATKAN & DISE- TOR PEMU (LEMBAR)	JUMLAH EMISI (LEMBAR)	RASIO (%)	SAHAM DITE- PATKAN & DISE- TOR PEMU (LEMBAR)	JUMLAH EMISI (LEMBAR)	RASIO (%)	SAHAM DITE- PATKAN & DISE- TOR PEMU (LEMBAR)	JUMLAH EMISI (LEMBAR)	RASIO (%)	SAHAM DITE- PATKAN & DISE- TOR PEMU (LEMBAR)	JUMLAH EMISI (LEMBAR)	RASIO (%)
1. Panin Bank	23.613.370	8.745.370	37,04	48.144.370	8.745.370	18,16	240.721.850	71.822.850	29,84	240.721.850	240.721.850	100,00
2. Lippo Bank	47.610.000	14.735.000	30,95	47.610.000	14.735.000	30,95	142.830.000	31.055.000	21,74	190.440.000	190.440.000	100,00
3. Bank Surya	25.000.000	4.000.000	16,00	25.000.000	4.000.000	16,00	25.000.000	4.000.000	16,00	50.000.000	4.000.000	8,00
4. BII	140.000.000	12.000.000	8,57	203.000.000	12.000.000	5,91	263.585.920	12.000.000	4,55	263.585.920	12.000.000	4,55
5. Bank Niaga	48.261.000	5.000.000	10,36	62.524.917	6.170.953	11,75	67.777.417	11.423.453	19,77	67.777.417	11.423.453	19,77
6. Bank Danamon	112.000.000	12.000.000	10,71	112.000.000	44.400.000	39,64	112.000.000	44.400.000	39,64	224.000.000	224.000.000	100,00
7. Bank Bali	62.032.000	62.032.000	100,00	62.032.000	62.032.000	100,00	186.096.000	186.096.000	100,00	186.096.000	186.096.000	100,00
8. Tamara Bank	15.000.000	3.000.000	20,00	15.000.000	3.000.000	20,00	15.000.000	3.000.000	20,00	36.000.000	3.000.000	6,33
9. BOMI	136.000.000	11.000.000	8,09	136.000.000	136.000.000	100,00	234.601.949	136.000.000	57,97	351.601.949	351.601.949	100,00
10. Bank Duta	140.596.538	35.000.000	24,89	140.596.538	35.000.000	24,89	140.596.538	35.000.000	24,89	140.596.538	35.000.000	24,89
11. Bank Umum Nasional	98.000.000	8.000.000	8,16	98.000.000	8.000.000	8,16	156.800.089	8.000.000	5,10	156.800.089	8.000.000	5,10

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan dan catatan atas Laporan Keuangan
 Bank-Bank Go Public yang diteliti.

MILIK
 PERPUSTAKAAN
 "UNIVERSITAS AIRLANGGA"
 SURABAYA